



BUPATI TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS NOMOR : 41 TAHUN 2016

TENTANG STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI TANGGAMUS

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tercapainya efisiensi dan sefektifitas dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu adanya standar belanja sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14C, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang-Barang Milik Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang-Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2009 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2006 Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Standar Belanja Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini

Pasal 2

Standar Belanja sebagaimana dimaksud Pasal 1 sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam rangka menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kabupaten Tanggamus

Pasal 3

Susunan Kode Rekening Urusan Pemerintahan Daerah, Kode Organisasi, Kode Akun Keuangan Daerah, Kode Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan serta Kode Rekening sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 3 Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 5

Dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

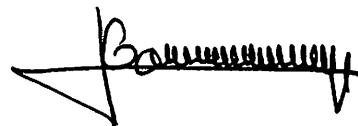
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

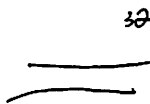
Ditetapkan di Kota Agung
Pada tanggal 27 September 2016

BUPATI TANGGAMUS,



BAMBANG KURNIAWAN

As. B. D. ADM



jt

Diundangkan di Kota Agung
Pada tanggal 27 September 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS,**



MUKHLIS BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2016 NOMOR 356

I. BELANJA TIDAK LANGSUNG

A. BELANJA PEGAWAI

1. Tambahan Penghasilan PNS.
- a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja :
Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan struktural yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan hari dan jam kerja efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), diatur dengan Surat Keputusan Kepala Daerah tersendiri.
- 2) Tambahan Perhasilan Berdasarkan Beban Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Barang Daerah :
a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Penatausahaan Keuangan Daerah :
 - Koordinator Bendahara Umum Daerah Rp. 15.000.000,-/org/bln
 - Bendahara Umum Daerah (BUD) Rp. 12.500.000,-/org/bln
 - Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Rp. 7.000.000,-/org/bln
Esselon III. a
 - Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Rp. 5.500.000,-/org/bln
Esselon III.b
 - Pelaksana Bendahara Umum Daerah Rp. 4.000.000,-/org/bln
 - Staf Pelaksana Bendahara Umum Daerah Rp. 1.250.000,-/org/bln
- b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja :
Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan hari dan kerja efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi :
Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan fungsional yang memiliki keahlian, keterampilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PROFESI	SATUAN	JUMLAH
DOKTER SPESIALIS		
• Dokter Spesialis PNS Tetap RSUD Kota Agung	Rp.	30.000.000,-
• Dokter Umum	Rp.	5.000.000,-
• Dokter Umum PTT	Rp.	2.050.000,-
• Dokter Gigi PTT	Rp.	2.050.000,-
• Dokter Internsip	Rp.	1.200.000,-
• Dokter Residen	Rp.	10.000.000,-
• Bidan PTT	Rp.	1.700.000,-
• Insentif Dokter PTT / Dokter Gigi PTT Daerah	Rp.	3.350.000,-

Terpencil		
• Insentif Dokter PTT / Dokter Gigi PTT Daerah Sangat Terpencil	Rp.	5.800.000,-
• Insentif Bidan PTT Daerah Terpencil	Rp.	1.700.000,-
• Insentif Bidan PTT Daerah Sangat Terpencil	Rp.	2.700.000,-
• Apoteker	Rp.	4.000.000,-
• Penata Anastesi	Rp.	3.000.000,-
• Kepala Instalasi	Rp.	500.000,-
• Kepala Ruangan	Rp.	300.000,-

**PEJABAT FUNGSIONAL PENGAWAS
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**

• Pengawas Pemerintahan Utama (IVd – IVe)	Rp.	5.300.000,-
• Pengawas Pemerintahan Madya (IVa – IVb)	Rp.	3.750.000,-
• Pengawas Pemerintahan Muda (IIIc – IIId)	Rp.	2.650.000,-
• Pengawas Pemerintahan Pertama (IIIa – II Ib)	Rp.	1.850.000,-

PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR AHLI

• Auditor Utama (IVd – IVe)	Rp.	5.300.000,-
• Auditor Madya (IVa – IVc)	Rp.	3.750.000,-
• Auditor Muda (IIIc – IIId)	Rp.	2.650.000,-
• Auditor Pertama (IIIa – II Ib)	Rp.	1.850.000,-

PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR TERAMPIL

• Auditor Penyedia (IIIc – IIId)	Rp.	1.500.000,-
• Auditor Pelaksana Lanjutan (IIIa – II Ib)	Rp.	1.150.000,-
• Auditor Pelaksana (IIc – IId)	Rp.	850.000,-

II. BELANJA LANGSUNG

A. BELANJA PEGAWAI

1. Honorarium PNS dan Non PNS/Belanja Pegawai

a. Honorarium *Pengelola kegiatan* :

Standar maksimum honorarium pengelola kegiatan berdasarkan nilai pagu anggaran kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

NO	Pengelola Kegiatan	JUMLAH NILAI TOTAL BIAYA UNIT KERJA/KEGIATAN (dalam juta rupiah)			
		s/d 200	Diatas 200 s/d 500	Diatas 500 s/d 1 Milyar	Diatas 1 Milyar
1	2	4	5	6	7
1	Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Pembuat Komitmen	650.000,-	750.000,-	850.000,-	1.000.000,-
2	Kuasa Pejabat Pembuat Komitmen	500.000,-	600.000,-	700.000,-	850.000,-
3	Pejabat penanggung Jawab Bidang	450.000,-	550.000,-	650.000,-	800.000,-
4	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	400.000,-	500.000,-	600.000,-	750.000,-
5	Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	350.000,-	450.000,-	550.000,-	650.000,-
6	Bendahara Pengeluaran Pembantu	250.000,-	350.000,-	450.000,-	500.000,-
7	Pelaksana Teknis	-	100.000,-	125.000,-	175.000,-

Catatan :

- 1) Apabila ada pendelegasian wewenang, maka yang bersangkutan diberikan honorarium sesuai dengan jabatan yang didelegasikan/dilimpahkan dalam pengelolaan kegiatan.
- 2) Untuk pengadaan barang fisik non konstruksi tidak diperlukannya pelaksana teknis, kecuali pengadaan barang untuk spesifikasi tertentu.
- 3) Untuk pelaksana teknis SKPD non teknis yang melaksanakan kegiatan fisik konstruksi, di syaratkan untuk melibatkan personil dari dinas teknis.
- 4) Fungsi Tim Peneliti Kontrak bila terdapat Adendum (CCO) dalam suatu kegiatan/paket kegiatan melekat pada pengelola kegiatan.
- 5) Untuk penganggaran honorarium TKK / TKS dianggarkan pada kode rekening honorarium Non PNS.

- b. Standar Maksimum Honorarium Pengelola Keuangan Daerah dan Barang Daerah :
- Pengguna Anggaran
 - a. Nilai Belanja Langsung (s/d 499 juta) Rp. 1.000.000,-/org/bln
 - b. Nilai Belanja Langsung (500 jt - 1 milyar) Rp. 1.500.000,-/org/bln
 - c. Nilai Belanja Langsung (diatas 1 Milyar) Rp. 2.000.000,-/org/bln
 - PPK – SKPD
 - a. Nilai Belanja Langsung (s/d 499 juta) Rp. 600.000,-/org/bln
 - b. Nilai Belanja Langsung (500 jt - 1 milyar) Rp. 700.000,-/org/bln
 - c. Nilai Belanja Langsung (diatas 1 Milyar) Rp. 800.000,-/org/bln
 - Bendahara Pengeluaran SKPD
 - a. Nilai Belanja Langsung (s/d 499 juta) Rp. 600.000,-/org/bln
 - b. Nilai Belanja Langsung (500 jt - 1 Milyar) Rp. 700.000,-/org/bln
 - c. Nilai Belanja Langsung (diatas 1 Milyar) Rp. 850.000,-/org/bln
 - Bendahara Pengeluaran (Pos Bantuan, Hibah, Subsidi dan Pembiayaan) Rp. 850.000,-/org/bln
 - Bendahara Penerimaan
 - a. Nilai Anggaran PAD (s/d 499 juta) Rp. 550.000,-/org/bln
 - b. Nilai Anggaran PAD (500 jt - 1 Milyar) Rp. 650.000,-/org/bln
 - c. Nilai Anggaran PAD (diatas 1 Milyar) Rp. 750.000,-/org/bln
 - Pengurus Barang
 - a. Nilai Belanja Modal (s/d 499 juta) Rp. 600.000,-/org/bln
 - b. Nilai Belanja Modal (500 jt - 1 Milyar) Rp. 700.000,-/org/bln
 - c. Nilai Belanja Modal (diatas 1 Milyar) Rp. 850.000,-/org/bln
 - Bendahara Pengeluaran Pembantu
 - a. Nilai Belanja Langsung (s/d 499 juta) Rp. 400.000,-/org/bln
 - b. Nilai Belanja Langsung (500 jt - 1 Milyar) Rp. 500.000,-/org/bln
 - c. Nilai Belanja Langsung (diatas 1 Milyar) Rp. 600.000,-/org/bln
 - Pengurus Barang Pembantu
 - a. Nilai Belanja Modal (s/d 499 juta) Rp. 400.000,-/org/bln
 - b. Nilai Belanja Modal (500 jt - 1 Milyar) Rp. 500.000,-/org/bln
 - c. Nilai Belanja Modal (diatas 1 Milyar) Rp. 550.000,-/org/bln
- c. Honorarium Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Pekon Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, Pungutan, tata Ruang dan Organisasi Pemerintahan Pekon :
- Ketua Rp. 60.000,-/org/kali
 - Wakil Ketua Rp. 55.000,-/org/kali
 - Sekretaris Rp. 50.000,-/org/kali
 - Wakil Sekretaris Rp. 45.000,-/org/kali
 - Koordinator Bidang Rp. 40.000,-/org/kali
 - Anggota Rp. 35.000,-/org/kali
 - Pelaksana Sekretariat Rp. 30.000,-/org/kali
- d. Honorarium Tim Kajian Hukum Pemerintah Kabupaten Tanggamus :
- Pengarah Rp. 1.500.000,-/org/bln
 - Ketua Rp. 1.000.000,-/org/bln
 - Sekretaris Rp. 750.000,-/org/bln
 - Anggota Rp. 700.000,-/org/bln
 - Anggota Sekretariat Rp. 300.000,-/org/bln

- e) Honorarium Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara :
- Honor Kuasa Hukum Negara
 - a) Ketua Rp. 1.600.000,-/org/bln
 - b) Anggota Rp. 1.100.000,-/org/bln
 - Honor Sekretariat
 - a) Sekretaris Rp. 800.000,-/org/bln
 - b) Anggota Rp. 550.000,-/org/bln
 - Biaya Perkara Litigasi
 - a. Biaya Perkara PTUN Rp. 60.000.000,-/Kasus
 - b. Biaya Perkara Perdata Rp. 60.000.000,-/Kasus
 - c. Biaya Perkara Banding PTUN/Perdata Rp. 25.000.000,-/Kasus
 - d. Biaya Perkara Kasasi Rp. 35.000.000,-/Kasus
 - Biaya Non Litigasi Rp. 12.500.000,-/Kasus
- f. Honorarium Berdasarkan Volume Kerja Protokol Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah :
- Protokol Rp. 1.500.000/org/bulan
- g. Honorarium Pelaksana Kegiatan Jaringan Dokumentasi Ilmu Hukum (JDIH) Kabupaten Tanggamus :
- Pembina Rp. 500.000,-/org/bln
 - Ketua Rp. 400.000,-/org/bln
 - Wakil Ketua Rp. 350.000,-/org/bln
 - Sekretaris Rp. 300.000,-/org/bln
 - Anggota Rp. 250.000,-/org/bln
 - Operator JDIH Rp. 250.000,-/org/bln
- h. Honorarium Tim Pengelola Website :
- Penanggung Jawab Rp. 500.000,-/org/bln
 - Redaktur Rp. 450.000,-/org/bln
 - Editor Rp. 400.000,-/org/bln
 - Web. Admin Rp. 350.000,-/org/bln
 - Web. Developer Rp. 300.000,-/org/bln
 - Pembuat Artikel Rp. 100.000,-/org/bln
- i. Honorarium Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah :
- Pengarah Rp. 1.000.000,-/org/hari
 - Ketua Rp. 950.000,-/org/hari
 - Wakil Ketua Rp. 850.000,-/org/hari
 - Sekretaris Rp. 800.000,-/org/hari
 - Wakil Sekretaris Rp. 750.000,-/org/hari
 - Koordinator Bidang Rp. 600.000,-/org/hari
 - Wakil Koordinator Bidang Rp. 500.000,-/org/hari
 - Anggota Bidang Rp. 400.000,-/org/hari
 - Pelaksana Sekretariat Rp. 300.000,-/org/hari
- h. Honorarium monitoring, survey, penertiban, pendataan (kegiatan) Honorarium/Upah harian untuk survey, monitoring pendataan, penertiban, dan pengawasan fisik lapangan, konfirmasi data termasuk survey awal, pematokan, pengukuran, identifikasi, Pendataan Meteran (Air Bawah Tanah), pendataan (fisik, atau yuridis) dalam rangka pengadaan tanah dan pensertifikasian tanah dengan biaya sebagai berikut :
- 1) Esselon II Rp. 90.000,-/hari
 - 2) Esselon III Rp. 85.000,-/hari
 - 3) Esselon IV Rp. 70.000,-/hari
 - 4) Esselon V Rp. 65.000,-/hari
 - 5) PNS Non Struktural Rp. 60.000,-/hari
 - 6) Pelaksanan Non PNS Rp. 50.000,-/hari

- i. Honorarium Jasa pengantar Surat antar Kecamatan dalam Daerah dapat diberikan Maksimal 5 Hari / bulan dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pelaksana PNS Rp. 30.000,-/hari
 - 2) Pelaksana Non PNS Rp. 20.000,-/hari
- j. Honorarium Tim / Kepanitiaan :
 - 1) Untuk Honorarium Tim / Kepanitiaan kegiatan yang dilaksanakan s/d 15 hari, dapat diberikan honorarium dengan besaran maksimal sebesar :
 - (a). Pembina Rp. 200.000,- /orang / hari.
 - (b). Ketua Rp. 150.000,- /orang / hari.
 - (c). Wakil Ketua Rp. 130.000,- /orang / hari.
 - (d). Sekretaris Rp. 120.000,- /orang / hari.
 - (e). Anggota Rp. 100.000,- /orang / hari.
 - 2) Untuk Honorarium Tim / Kepanitiaan kegiatan yang dilaksanakan diatas 15 hari, dapat diberikan honorarium bulanan dengan besaran maksimal sebagai berikut :
 - (a). Pembina Rp. 300.000,- /orang / bulan.
 - (b). Ketua Rp. 250.000,- /orang / bulan.
 - (c). Wakil Ketua Rp. 230.000,- /orang / bulan.
 - (d). Sekretaris Rp. 210.000,- /orang / bulan.
 - (e). Bendahara Pembantu Kegiatan Rp. 200.000,- /orang / bulan.
 - (e). Anggota Rp. 175.000,- /orang / bulan.
 - 3) Untuk Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat diberikan honorarium dengan besaran maksimal sebesar :
 - (a). Pengarah Rp. 6.000.000,- /orang / bulan.
 - (b). Ketua Rp. 5.000.000,- /orang / bulan.
 - (c). Sekretaris Rp. 4.000.000,- /orang / bulan.
 - (d). Koordinator Tim Riview Rp. 3.500.000,- /orang / bulan.
 - (e). Anggota TAPD/Koordinator Rp. 3.000.000,- /orang / bulan.
 - (f). Anggota Sekretariat TAPD Rp. 750.000,- /orang / bulan.
 - 4) Untuk Honorarium Tim Asistensi Penyusunan APBD dan P-APBD Keuangan dapat diberikan honorarium dengan besaran maksimal sebesar :
 - (a). Penanggungjawab Rp. 2.000.000,- /orang / bulan.
 - (b). Wakil Penanggung jawab Rp. 1.800.000,- /orang / bulan.
 - (c). Ketua Tim Rp. 1.600.000,- /orang / bulan.
 - (d). Anggota Tim Rp. 1.500.000,- /orang / bulan.
 - 5) Untuk Honorarium Tim Badan Pertimbangan Jabatan (Baperjab) dapat diberikan honorarium dengan besaran maksimal sebesar :
 - (a). Ketua Rp. 3.000.000,- /orang / bulan.
 - (b). Sekretaris Rp. 2.000.000,- /orang / bulan.
 - (c). Anggota Rp. 1.500.000,- /orang / bulan.
 - (d). Sekretariat Rp. 1.000.000,- /orang / bulan.
 - 6) Honorarium Panitia Yustisi dan Pembinaan Hukum (Penyelesaian Kasus-kasus PNS) dapat diberikan honorarium dengan besaran maksimal sebesar :
 - (a). Ketua Rp. 2.000.000,-/orang/bulan
 - (b). Sekretaris Rp. 1.000.000,-/orang/bulan
 - (c). Anggota Rp. 750.000,-/orang/bulan
 - (d). Sekretariat Rp. 500.000,-/orang/bulan

- 7) Honorarium Panitia Gerakan Disiplin Nasional (GDN) dapat diberikan honorarium dengan besaran maksimal sebesar :
- | | |
|------------------|-----------------------------|
| (a). Ketua | Rp. 1.000.000,-/orang/bulan |
| (b). Sekretaris | Rp. 500.000,-/orang/bulan |
| (c). Anggota | Rp. 300.000,-/orang/bulan |
| (d). Sekretariat | Rp. 250.000,-/orang/bulan |
- 8) Honorarium Penyusunan RKPD, Perubahan RKPD, KUA-PPAS, KUPA-PPAS Perubahan dan KISS(Koordinasi Integrasi Sinkronisasi dan Simplikasi) Pembiayaan Pembangunan dapat diberikan honorarium dengan besaran maksimal sebesar :
- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| (a). Pengarah | Rp. 1.000.000,-/orang/bulan |
| (b). Ketua | Rp. 950.000,-/orang/bulan |
| (c). Wakil Ketua | Rp. 850.000,-/orang/bulan |
| (d). Sekretaris | Rp. 750.000,-/orang/bulan |
| (e). Wakil Sekretaris | Rp. 700.000,-/orang/bulan |
| (f). Koordinator Kelompok | Rp. 600.000,-/orang/bulan |
| (g). Anggota Bidang | Rp. 500.000,-/orang/bulan |
| (h). Pelaksana Sekretariat | Rp. 350.000,-/orang/bulan |
- 9) Untuk Honorarium Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dapat diberikan honorarium dengan besaran maksimal sebesar :
- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| (a). Ketua | Rp. 3.000.000,- /orang / aktifitas. |
| (b). Sekretaris | Rp. 2.500.000,- /orang / aktifitas. |
| (c). Anggota | Rp. 2.000.000,- /orang / aktifitas. |
| (d). Ketua Sekretariat | Rp. 1.500.000,- /orang / aktifitas. |
| (e). Sekretaris Sekretariat | Rp. 1.000.000,- /orang / aktifitas. |
| (f). Anggota Sekretariat | Rp. 750.000,- /orang / aktifitas. |
- 10) Untuk Honorarium Penyusunan laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tanggamus, Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) :
- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| (a). Ketua | Rp. 950.000,-/orang/bulan |
| (b). Wakil Ketua | Rp. 850.000,-/orang/bulan |
| (c). Sekretaris | Rp. 750.000,-/orang/bulan |
| (d). Anggota | Rp. 500.000,-/orang/bulan |
| (e). Pelaksana Sekretariat | Rp. 350.000,-/orang/bulan |
- 11) Untuk Honorarium Tim Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus :
- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| (a). Ketua | Rp. 950.000,-/orang/triwulan |
| (b). Wakil Ketua | Rp. 850.000,-/orang/ triwulan |
| (c). Sekretaris | Rp. 750.000,-/orang/ triwulan |
| (d). Anggota | Rp. 500.000,-/orang/ triwulan |
| (e). Pelaksana Sekretariat | Rp. 350.000,-/orang/ triwulan |
- 12) Untuk Honorarium Personalia Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tanggamus :
- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| (a). Penanggungjawab | Rp. 1.000.000,-/orang/bulan |
| (b). Ketua | Rp. 750.000,-/orang/bulan |
| (c). Sekretaris | Rp. 500.000,-/orang/bulan |
| (d). Wakil Sekretaris | Rp. 350.000,-/orang/bulan |
| (e). Anggota | Rp. 250.000,-/orang/bulan |
- 13) Untuk Honorarium Personalia Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tanggamus :
- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| (a). Kepala Sekretariat | Rp. 350.000,-/orang/bulan |
| (b). Pelaksana | Rp. 250.000,-/orang/bulan |

- 14) Untuk Honorarium Personalia Perencanaan tata ruang BKPRD, Personalia Pemanfaatan dan Pengendalian tata ruang BKPRD :
- (a). Ketua Rp. 750.000,-/orang/bulan
 - (b). Wakil Ketua Rp. 600.000,-/orang/bulan
 - (c). Sekretaris Rp. 500.000,-/orang/bulan
 - (d). Anggota Rp. 250.000,-/orang/bulan
- 15) Untuk Honorarium Tim Koordinasi Sistem Inovasi Daerah (SIDa), Tim Pelaksana Study Jarlitbang Kabupaten Tanggamus :
- (a). Ketua Rp. 950.000,-/orang/bulan
 - (b). Wakil Ketua Rp. 850.000,-/orang/bulan
 - (c). Sekretaris Rp. 750.000,-/orang/bulan
 - (d). Wakil Sekretaris Rp. 700.000,-/orang/bulan
 - (e). Anggota Rp. 500.000,-/orang/bulan
 - (f). Pelaksana Sekretariat Rp. 350.000,-/orang/bulan
- 16) Untuk Honorarium Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Tanggamus :
- (a). Pembina Rp. 1.000.000,-/orang/bulan
 - (b). Ketua Rp. 950.000,-/orang/bulan
 - (c). Wakil Ketua Rp. 850.000,-/orang/bulan
 - (d). Sekretaris Rp. 750.000,-/orang/bulan
 - (e). Wakil Sekretaris Rp. 700.000,-/orang/bulan
 - (f). Ketua Kelompok Kerja /Program Rp. 600.000,-/orang/bulan
 - (g). Wakil Ketua Kelompok Kerja/Program Rp. 550.000,-/orang/bulan
 - (h). Anggota Rp. 500.000,-/orang/bulan
 - (i). Pelaksana Sekretariat Rp. 350.000,-/orang/bulan
- 17) Untuk koordinasi Unsur Muspida dan Ketua Pengadilan Negeri dapat diberikan honorarium maksimal RP. 2.000.000,- /org/ bln.
- 18) Honorarium kerja tersebut pada huruf j. Angka 1 sampai dengan angka 17. Di atas, ditetapkan dengan :
- (a) Keputusan Bupati untuk kegiatan lintas SKPD/Instansi Vertikal yang melibatkan Bupati / Wakil Bupati.
 - (b) Surat Perintah Sekretaris Daerah untuk kegiatan lintas SKPD yang tidak melibatkan Bupati / Wakil Bupati.
 - (c) Surat Perintah Tugas (Dari Kepala SKPD) untuk kegiatan dalam internal SKPD.
 - (d) Susunan panitia/tim antara lain seperti : (a). Pengarah dan/ atau Pembina; (b). Wakil Ketua (c). Sekretaris (d) Anggota (e). Sekretariat atau *sesuai kebutuhan SKPD yang bersangkutan*.

- k. Honorarium Pejabat / Panitia / Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa dan Pejabat / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
- 1) Honorarium Pejabat / Panitia/Kelompok Kerja Pengadaan barang dan jasa dan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagai berikut :

No	Nilai Pengadaan/ Paket (Rp)	Besaran Honorarium Panitia / Kelompok Kerja Pengadaan (Rp)			Besaran Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Rp)		
		Ketua	Sekretaris	Anggota	Ketua	Sekretaris	Anggota
1.	>50Jt - 100 Jt	350.000	200.000	150.000	350.000	200.000	150.000
2.	>100Jt - 200Jt	450.000	300.000	225.000	375.000	300.000	225.000

3.	>200Jt - 400Jt	675.000	525.000	450.000	525.000	450.000	375.000
4.	>400Jt - 1 M	900.000	750.000	600.000	750.000	600.000	450.000
5.	> 1 M - 3 M	1.300.000	1.200.000	900.000	1.200.000	1000.000	800.000
6.	> 3 M - 10 M	1.750.000	1.500.000	1.250.000	1.600.000	1.300.000	1.000.000
7.	> 10 M	2.100.000	1.750.000	1.500.000	2.000.000	1.700.000	1.400.000

CATATAN :Kolom 1 dan 2 hanya berlaku untuk jasa konsultasi yang nilai pengadaanya s/d 200 juta, sedangkan kolom 3 s/d 7 berlaku untuk seluruh pengadaan barang dan jasa yang nilai pengadaanya > Rp. 200 juta.

- 2) Honor untuk pejabat pengadaan barang dan jasa dan pejabat penerima hasil pekerjaan untuk pekerjaan jasa konsultasi dengan nilai > Rp 10 jt – Rp 50 jt sebesar Rp. 200.000 per paket.
- 3) Honor untuk pejabat pengadaan barang dan jasa dan pejabat penerima hasil pekerjaan dengan nilai > Rp 10 jt – Rp 200 jt sebesar Rp. 200.000 per aktifitas.
- 4) Honorarium Panitia/ Pejabat/ Kelompok Kerja Pengadaan menerima honorarium sesuai dengan jumlah Paket/ Kegiatan yang dilaksanakan dan dianggarkan yang tersedia.
- 5) Honorarium Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima honorarium sesuai dengan jumlah Paket/ Kegiatan yang dilaksanakan dan anggaran yang tersedia.
- 6) Pejabat/ Panitia / Kelompok Kerja Pengadaan tidak boleh merangkap sebagai pejabat / panitia penerima hasil pekerjaan dalam waktu yang bersamaan.

- l. Honorarium Pelayanan Pembuatan e-KTP, KTP-Siak dan KK perbulan :

1)	Camat.....	Rp.	800.000,-
2)	Sekretaris Kecamatan	Rp.	700.000,-
3)	Kasi Pemerintahan Kecamatan	Rp.	600.000,-
4)	Operator Komputer e-KTP, Siak dan KK Non PNS	Rp.	800.000,-

- m. Honorarium Tim Pengelola Aplikasi Simda Keuangan, Simda Gaji, Simda Barang dan SISMIOP dapat diberikan honorarium dengan besaran maksimal sebesar :

1)	Penanggungjawab	Rp.	1.500.000,- /org/bln
2)	Wakil Penanggungjawab	Rp.	1.350.000,- /org/bln
3)	Sekretaris	Rp.	1.200.000,- /org/bln
4)	Admin	Rp.	1.000.000,- /org/bln
5)	Operator	Rp.	600.000,- /org/bln

- n. Honorarium Tim Pengelola Aplikasi SAPK dan SIMPEG dapat diberikan honorarium dengan besaran maksimal sebesar :

1)	Admin	Rp.	700.000,- /orang/bulan
2)	Suervisor Control	Rp.	600.000,- /orang/bulan
3)	Operator Komputer	Rp.	500.000,- /orang/bulan

- o. Honorarium Operator Komputer pada SKPD dapat diberikan honorarium dengan besaran maksimal sebesar :

1)	Operator Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)		
a.	PNS	Rp.	600.000,-
b.	Non PNS	Rp.	500.000,-
2)	Operator Komputer Penatausahaan SKPD		
a.	PNS	Rp.	250.000,-
b.	Non PNS	Rp.	200.000,-
3)	Operator Komputer Kegiatan		
a.	PNS	Rp.	150.000,-
b.	Non PNS	Rp.	130.000,-
4)	Operator SIM RSUD Kota Agung		
a.	PNS	Rp.	300.000,-
b.	Non PNS.....	Rp.	300.000,-

Catatan : Operator Komputer Penatausahaan SKPD tidak diperbolehkan merangkap sebagai Operator Komputer Kegiatan

- p. Honorarium Korp. Musik pada SKPD dapat diberikan honorarium dengan besaran maksimal sebesar :

1)	Instruktur	Rp.	175.000,-/org/jam
2)	Pendamping	Rp.	200.000,-/org/bln
2)	Anggota Korp Musik		
a.	PNS	Rp.	185.000,-/org/bln
b.	Non PNS	Rp.	175.000,-/org/bln

- q. Honorarium Komite Medis RSUD Kota Agung dapat diberikan honorarium dengan besaran maksimal sebesar :

1)	Pembina	Rp.	300.000,-/org/bln
2)	Ketua	Rp.	250.000,-/org/bln
3)	Sekretaris	Rp.	200.000,-/org/bln
4)	Anggota	Rp.	175.000,-/org/bln

- r. Honorarium Komite Keperawatan RSUD Kota Agung dapat diberikan honorarium dengan besaran maksimal sebesar :

1)	Pembina	Rp.	300.000,-/org/bln
2)	Ketua	Rp.	250.000,-/org/bln
3)	Wakil Ketua	Rp.	220.000,-/org/bln
4)	Sekretaris	Rp.	200.000,-/org/bln
5)	Anggota	Rp.	175.000,-/org/bln

2. Belanja Diklat Kursus, Sosialisasi, Seminar, WorkShop dan Bimbingan Teknis :

- 1) Belanja kursus, sosialisasi, seminar, workshop dan bimbingan teknis waktu penyelenggaraanya tidak melebihi 30 jam pelajaran, (1 Jam Pelajaran = 45 menit pelajaran), dengan asumsi 1 hari maksimal 10 JP, sedangkan untuk belanja diklat waktu penyelenggaraanya 30 JP atau lebih.

- 2) Penyelenggaraan Diklat, Kursus, Sosialisasi, Seminar, WorkShop dan bimbingan Teknis ke penyelenggara di luar pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam jumlah kurang dari satu kelas (25 orang) **dianggarkan oleh SKPD bersangkutan.**

- 3) Honorarium Panitia Sosialisasi / Pelatihan / Bimbingan Teknis / Seminar (PNS dan Non PNS) :

No	Uraian	Jml.Org (max)	Tolok Ukur	Satuan	Max. Besaran Honorarium	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pembina / Pengarah	3	1	Ok	Sesuai Ketentuan	Bupati, Wakil Bupati, Sekda
2.	Ketua	1	1	OK	1.000.000	Kepala / Sekretaris SKPD
3.	Sekretaris	1	1	OK	750.000	
4.	Anggota	1	OK	400.000	
5.	Sekretariat	1	OK	300.000	

- 4) Honor Panitia Pendidikan dan Pelatihan :

No.	Uraian	Jml.Org (max)	Tolok Ukur	Satuan	Max. Besaran Honorarium	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pembina / Pengarah	3	1	Ok	Sesuai Ketentuan	Bupati, Wakil Bupati, Sekda
2.	Ketua	1	1	OK	1.750.000	Kepala / Sekretaris SKPD
3.	Sekretaris	1	1	OK	1.350.000	
4.	Anggota	1	OK	1.200.000	
5.	Sekretariat	1	OK	800.000	

- (a) Untuk kegiatan dengan jumlah peserta max 50 orang, anggota max 5 orang dan sekretariat max 2 orang.
 (b) Untuk kegiatan dengan jumlah peserta 51-100 orang, anggota max 6 orang dan sekretariat max 3 orang.
 (c) Untuk kegiatan dengan jumlah peserta lebih dari 100 orang, anggota max 7 orang dan sekretariat 4 orang.

- 5) Uang Saku Peserta :

(a) Eselon II	Rp.	300.000,-/ hari.
(b) Eselon III	Rp.	250.000,-/ hari.
(c) Eselon IV	Rp.	225.000,-/ hari.
(d) Eselon V atau Pelaksana Gol IV / III	Rp.	200.000,-/ hari.
(e) Pelaksana PNS Gol II / I	Rp.	175.000,-/ hari.
(f) Pelaksanaan Non PNS	Rp.	150.000,-/ hari.

- 6) Uang Saku Studi banding/Kursus/Seminar di Luar Negeri sebesar Rp. 2.000.000,-/orang/kegiatan

- 7) Upacara Pembukaan dan Penutupan

- (a) Pembuka / Penutupan Acara :

(1) Eselon II a	Rp.	1.350.000,- /org/aktifitas.
(2) Eselon II b	Rp.	1.200.000,- /org/aktifitas.
(3) Eselon III	Rp.	1.000.000,- /org/aktifitas.
(4) Eselon IV	Rp.	750.000,- /org/aktifitas.

- (b) Pembawa Acara / Protokol Rp. 250.000,- /org/aktifitas.
(c) Pembaca Do'a Rp. 250.000,- /org/aktifitas.

Catatan :

- Honorarium pembukaan dan penutupan disesuaikan dengan kondisi rill.
- Dalam hal Panitia merangkap sebagai pembuka / penutup, moderator, notulen, pembaca do'a, pembawa acara harus memilih salah satu jenis honorarium, kecuali untuk Pejabat Negara.

3. Belanja Diklat Pimpinan

Untuk penyelenggaraan Diklat Pimpinan dapat diberikan :

- a. Tarif indeks Peserta, Uang saku dan biaya Benchmarking peserta diklat :

No.	Jenis Diklat	Tarif Indeks / Peserta (Rp)	Uang Saku / Hari (Rp)	Biaya Benchmarking/ orang (Rp)
1	Tingkat II	30.261.000	100.000,-	5.000.000
2	Tingkat III	22.125.000	75.000,-	3.000.000
3	Tingkat IV	20.230.000	50.000,-	2.000.000
4	Prajabatan : Golongan I, II dan III			

Catatan :

1. Untuk Nomor urut 1 sampai dengan 3 Tarif Indeks/ Pesertamengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN-RI)
2. Untuk Nomor urut 4 Prajabatan tarif Indeks/Pesertamengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN-RI)

- b. Dana Kesehatan (Tenaga Medis dan obat-obatan) / angkatan Rp. 1.000.000,-

4. Belanja Diklat Teknis dan Fungsional

Untuk penyelenggaraan Diklat Teknis dan fungsional dapat diberikan :

No	Waktu Diklat	Peserta
1	Diklat 3 hari	Rp. 2.850.000,-
2	Diklat 4 hari 1. Tanpa Observasi Lapangan 2. Dengan Observasi Lapangan 3. Dengan Observasi Lapangan dan Praktek	Rp.3.500.000,- Rp.3.600.000,- Rp.3.850.000,-
3	Diklat 5 hari 1. Tanpa Observasi Lapangan 2. Dengan observasi Lapangan 3. Dengan Observasi Lapangan dan Praktek	Rp.4.050.000,- Rp.4.150.000,- Rp.4.400.000,-
4	Diklat 6 hari 1. Tanpa Observasi Lapangan 2. Dengan Observasi Lapangan 3. Dengan Observasi lapangan dan Praktek	Rp.4.600.000,- Rp.4.700.000,- Rp.4.950.000,-
5	Diklat 10 hari 1. Tanpa Observasi 2. Dengan Observasi Lapangan 3. Dengan Observasi Lapangan dan Praktek	Rp.6.600.000,- Rp.6.700.000,- Rp.6.950.000,-
6	Diklat 12 hari 1. Tanpa Observasi	Rp.7.600.000,-

	2. Dengan Observasi Lapangan	Rp.7.700.000,-
	3. Dengan Observasi Lapangan dan Praktek	Rp.7.950.000,-
7	Diklat 14 hari	
	1. Tanpa Observasi	Rp.8.600.000,-
	2. Dengan Observasi Lapangan	Rp.8.700.000,-
	3. Dengan Observasi Lapangan dan Praktek	Rp.8.950.000,-

Catatan : Untuk Pelaksanaan Diklat diluar ketentuan jumlah hari diatas dibuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersendiri.

5. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS (Tugas Belajar Dalam Negeri)

a. Belanja Beasiswa tugas belajar D1, D2 dan D3 :

1) Uang Saku	Rp.	1.800.000,-/bln/peserta
2) Biaya Penginapan	Rp.	500.000,-/bln/peserta
3) Biaya Buku-buku	Rp.	1.500.000,-/smstr/peserta
4) Biaya Penyusunan Tugas Akhir	Rp.	1.000.000,-/peserta
5) Biaya Wisuda	Rp.	1.500.000,-/peserta

b. Belanja Beasiswa tugas belajar S1 :

1) Uang Saku	Rp.	1.800.000,-/bln/peserta
2) Biaya Penginapan	Rp.	500.000,-/bln/peserta
3) Biaya Buku-buku	Rp.	1.500.000,-/smstr/peserta
4) Biaya Penyusunan Tugas Skripsi	Rp.	1.000.000,-/peserta
5) Biaya Wisuda	Rp.	1.500.000,-/peserta

c. Belanja Beasiswa tugas belajar S2

1) Uang Saku	Rp.	2.000.000,-/bln/peserta
2) Biaya Penginapan	Rp.	500.000,-/bln/peserta
3) Biaya Buku-buku	Rp.	2.000.000,-/smstr/peserta
4) Biaya Penyusunan Tesis	Rp.	2.000.000,-/peserta
5) Biaya Wisuda	Rp.	1.500.000,-/peserta

d. Belanja Beasiswa tugas belajar S3

1) Uang Saku	Rp.	2.000.000,-/bln/peserta
2) Biaya Penginapan	Rp.	500.000,-/bln/peserta
3) Biaya Buku-buku	Rp.	2.000.000,-/smstr/peserta
4) Biaya Penyusunan Desertasi	Rp.	3.000.000,-/peserta
5) Biaya Wisuda	Rp.	1.500.000,-/peserta

6. Uang Lembur

a. Uang Lembur untuk Pegawai PNS dapat diberikan sebesar:

- Golongan IV	Rp.	25.000,-/jam/orang
- Golongan III	Rp.	20.000,-/jam/orang
- Golongan II	Rp.	17.000,-/jam/orang
- Golongan I	Rp.	13.000,-/jam/orang

b. Uang Lembur untuk Pegawai non PNS dapat diberikan sebesar Rp. 13.000,-/jam/orang.

c. Uang Lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melakukan kerja lembur berdasarkan Surat Perintah dari pejabat yang berwenang.

Catatan :

- untuk angka 6 huruf a. : dikecualikan untuk PPK/Panitia Pengadaan/Kelompok Kerja Pengadaan/ pejabat pengadaan dan panitia/ atau pejabat panitia hasil pekerjaan.
- Ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 6. huruf a. berlaku juga untuk Honorarium Pegawai Non PNS.

7. Penganggaran honorarium PNS sudah termasuk untuk CPNS
8. Penyelenggaraan kursus/pelatihan sosialisasi yang melibatkan peserta Non PNS (Non Pegawai) dapat diberikan uang saku (maksimal 5 hari/kegiatan) dan diberikan sebesar Rp. 150.000/peserta/hari :

9. Kegiatan Jurnalistik (Non PNS) :

a. Press Tour	Rp. 150.000,-/orang/kehadiran
b. Press Release	Rp. 50.000,-/orang/tayangan
c. Peliputan berita	Rp. 100.000,-/orang/tayangan
d. Video Streaming :	
1) Kameramen	Rp. 100.000 /tayangan
2) Reporter	Rp. 100.000 / tayangan
3) Narator	Rp. 100.000 / tayangan
4) Editor	Rp. 100.000 / tayangan

Catatan : untuk kegiatan point 9,huruf d), dalam 1 bulan maksimaal 4 tayangan.

10. Honorarium / Gaji Tenaga Kontrak Kerja (TKK) :

- a. Tenaga Kontrak Kerja (TKK) diberikan Gaji sesuai dengan masa kerjanya yang besarnya diatur dengan Keputusan Bupati tersendiri.
- b. Tenaga Kontrak Kerja (TKK) yang diberikan tanggung jawab sebagai tenaga Pelaksana Teknis atau tenaga Administrasi pada SKPD yang bersangkutan dapat diberikan honorarium dengan besaran honorarium :
 - Petugas Teknis Kehutanan Rp. 1.750.000,-

11. Jasa / Upah tenaga Kerja tidak tetap / TKS :

- Dianggarkan pada kegiatan penyediaan jasa Administrasi Keuangan
 - a. Petugas Kebersihan Pasar Rp. 1.150.000/bln
 - b. Sopir
 - Sopir KDH/WKDH, Pimpinan DPRD Rp. 1.750.000/bln
 - Sopir Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Rp. 1.450.000/bln
 - Inspektur/Sekwan/Kepala Badan/Dinas/Kantor/Direktur RSUD/Camat/Sekretaris Rp. 1.450.000/bln
 - Sopir Bus/Sopir Truk Sampah Rp. 1.450.000/bln
 - Kondaktur Bus/Truk Sampah Rp. 1.250.000/bln
 - Sopir Ambulance/Perpustakaan Keliling Rp. 1.350.000/bln
 - Nahkoda/ABK Rp. 1.350.000/bln
 - Sopir Damkar Rp. 1.350.000/bln
 - c. Penjaga Kantor/Keamanan Pasar Rp. 1.150.000/bln
 - d. Operator Alat berat Rp. 1.150.000/bln
 - e. Assisten Operator Alat berat Rp. 1.150.000/bln
 - f. Cleaning Service kantor Rp. 1.150.000/bln
 - g. Tenaga Penjaga Pintu Air Rp. 1.150.000/bln
 - h. Instruktur Senam Rp. 500.000/bln
 - i. Petugas Pusda'i Rp. 1.150.000/bln
 - j. Tenaga Dokter Spesialis Paruh Waktu RSUD Rp. 15.000.000/bln
 - k. Tenaga Medis (Dr/Drg RSUD) Rp. 2.250.000/bln
 - l. Tenaga Paramedis Bidan/Perawat RSUD Rp. 1.750.000/bln
 - m. Tenaga Tekhnis Kesehatan RSUD Rp. 1.750.000/bln
 - n. Tenaga Tekhnis Analisis Laboratorium Rp. 1.500.000/bln

o.	Juru Masak/Juru Cuci RSUD	Rp.	1.250.000/bln
p.	Staf Administrasi	Rp.	1.150.000/bln
q.	Tenaga Teknologi Informasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/ Bappeda	Rp.	1.750.000/bln
r.	Tenaga Tekhnis Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp.	1.750.000/bln
s.	Anggota TKS Satpol PP	Rp.	1.150.000/bln
t.	Anggota TKS Dinas Perhubungan	Rp.	1.150.000/bln
u.	Anggota TKS Petugas Pemadam Kebakaran	Rp.	1.150.000/bln
v.	Guru SMP N Satu Atap	Rp.	600.000/bln
w.	Guru Sekolah Negeri	Rp.	600.000/bln
x.	Staf Sekolah Negeri	Rp.	500.000/bln
y.	Guru Sekolah Luar Biasa	Rp.	600.000/bln
z.	Staf Guru Sekolah Luar Biasa	Rp.	500.000/bln
aa.	Guru Honor Murni	Rp.	150.000/bln
bb.	Guru PAUD	Rp.	150.000/bln
cc.	Tenaga paramedis dan Administrasi	Rp.	700.000/bln
dd.	Tenaga Kader Posyandu Balita	Rp.	50.000/bln
ee.	Tenaga kader Posyandu Lansia	Rp.	50.000/bln

Catatan : Untuk penganggaran Jasa/Upah Tenaga Kerja Tidak Tetap/TKS dapat dianggarkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan SKPD Terkait.

12. Jasa Piket :

a.	Jasa Piket Pol. PP	Rp.	80.000/orang/hari
b.	Jasa Piket Anggota Keselamatan Lalu Lintas	Rp.	50.000/orang/hari
c.	Jasa Piket Anggota Pemadam Kebakaran	Rp.	80.000/orang/hari
d.	Jasa Piket Petugas Penjaga Sirine Sunami	Rp.	80.000/orang/hari

13. Jasa Konsultasi Hukum dan Phicychologi :

a.	Biaya Perkara Litigasi		
	1) Biaya Perkara PTUN	Rp.	60.000.000,-/Kasus
	2) Biaya Perkara Perdata	Rp.	60.000.000,-/Kasus
	3) Biaya Perkara Banding PTUN/Perdata	Rp.	25.000.000,-/Kasus
b.	Biaya Non Litigasi	Rp.	12.500.000,-/Kasus

14. Honorarium Pejabat Negara

a.	Honorarium sebagai Pengarah.....	Rp.	2.500.000,-/ aktifitas
b.	Honorarium Diklat, Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Seminar, Workshop dan Bimbingan teknis :		
	1) Pembuka / Penutup Acara	Rp.	3.000.000,-/ aktifitas
	2) Narasumber	Rp.	4.000.000,-/ aktifitas

15. Honorarium Tenaga Kesehatan Jaga Malam Puskesmas Rawat Inap diberikan sebesar Rp. 30.000,-/malam/orang.

B. BELANJA BARANG DAN JASA

1. Belanja Bahan Pakai Habis

Untuk belanja bahan pakai habis berpedoman kepada standar harga yang **ditetapkan dengan Keputusan Bupati**, yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip hemat, wajar dan menurut kebutuhan riil.

2. Belanja Bahan / Material

Untuk belanja bahan/ material berpedoman kepada standar harga yang **ditetapkan dengan Keputusan Bupati**, yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip hemat, wajar dan menurut kebutuhan riil.

3. Belanja Jasa Kantor

a. Belanja Telepon

- 1) Bupati , Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris daerah (Sesuai Riil Penggunaan)
- 2) Dinas/Badan/Staf Ahli/Bagian (Max 3 Rp. 750.000,-/bln/SST)
- 3) Kecamatan/Kantor/Kelurahan (Max 2 Rp. 500.000,-/bln/SST)
- 4) Rumah Dinas Camat (1 SST) . Rp. 300.000,-/bln/SST

b. Belanja Air

- 1) Untuk belanja Air SKPD Pemerintah Kabupaten Tanggamus disesuaikan dengan kebutuhan.

c. Belanja Listrik

- 1) Untuk belanja Listrik SKPD Pemerintah Kabupaten Tanggamus disesuaikan dengan kebutuhan.

d. Belanja kawat / faksimile / internet

- 1) Pengiriman faksimile Rp. 1.500.000,-/bulan/SST
- 2) Langganan Internet Rp. 1.000.000,-/bulan/SST

4. Belanja Premi Asuransi

Belanja premi asuransi diperuntukan :

- a. Barang Daerah (Alat berat, Gedung dan Rumah Dinas)
- b. Kendaraan Dinas Jabatan Bupati / Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Sekwan, Inspektur, Kepala Dinas/Badan/Kantor/Direktur RSUD/Camat

5. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

a. Kendaraan Perorangan Dinas

1. Perawatan Kendaraan Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD.
 - Biaya Reparasi dan penggantian suku cadang. Rp. 30.000.000/Unit/Tahun
 - Biaya service Rp. 15.000.000/Unit/Tahun
 - Bantuan biaya pembelian BBM Rp. 13.200.000/Unit/Bulan
 - Bantuan biaya pembelian Pelumas Rp. 750.000/Unit/Bulan
 - Pembelian Accu Rp. 1.000.000/Unit/Tahun
 - Pembelian Ban Rp. 7.500.000/Unit/Tahun
2. Perawatan kendaraan dinas Sekretaris Daerah
 - Biaya Reparasi dan penggantian suku cadang. Rp. 12.000.000/Unit/Tahun
 - Biaya service Rp. 6.000.000/Unit/Tahun
 - Bantuan biaya pembelian BBM Rp. 8.954.000/Unit/Bulan
 - Bantuan biaya pembelian Pelumas Rp. 700.000/Unit/Bulan
 - Pembelian Accu Rp. 1.000.000/Unit/Tahun
 - Pembelian Ban Rp. 7.500.000/Unit/Tahun
3. Perawatan kendaraan dinas Komisi DPRD
 - Biaya Reparasi dan penggantian suku cadang. Rp. 6.000.000/Unit/Tahun
 - Biaya service Rp. 3.000.000/Unit/Tahun
 - Bantuan biaya pembelian BBM Rp. 5.808.000/Unit/Bulan
 - Bantuan biaya pembelian Pelumas Rp. 700.000/Unit/Bulan
 - Pembelian Accu Rp. 1.000.000/Unit/Tahun
 - Pembelian Ban Rp. 5.000.000/Unit/Tahun

b. Kendaraan Operasional Dinas Jabatan dan Dinas Lapangan :

1) Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas

(a) Belanja Bahan Bakar Minyak :

- 1). Kendaraan Roda 4 (BBM Non Subsidi) Rp. 2.420.000,-/bln
- 2). Kendaraan Roda 2 (BBM Non Subsidi) Rp. 484.000,-/bln
- 3). Kendaraan Roda 4 (Solar Non Subsidi) Rp. 2.420.000,-/bln

(b) Belanja Pelumas

- (1) Kendaraan Roda 4 Rp. 600.000,-/bln
- (2) Kendaraan Roda 2 Rp. 100.000,-/bln

(c) Belanja Service

- (1) Kendaraan Roda 4 Rp. 1.500.000,-/3 bln
- (2) Kendaraan Roda 2 Rp. 150.000,-/3 bln

(d) Belanja Ban dan/atau Accu dan/atau Suku Cadang :

- (1) Kendaraan Roda 4 Rp. 5.000.000,-/Thn
- (2) Kendaraan Roda 2 Rp. 400.000,-/Thn

Catatan :

- 1) Harga BBM Non Subsidi untuk laporan pertanggungjawaban disesuaikan dengan harga riil.
- 2) Untuk Kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang baru, dapat diberikan penggantian ban dan/atau accu dan/atau suku cadang setelah pemakaian minimal satu tahun terhitung sejak pengadaan kendaraan apabila kondisi sudah tidak layak pakai.
- 3) Untuk Kegiatan Monitoring, Ketertiban, Patwal, Damkar dapat ditambah BBM sesuai kebutuhan mobil 15 liter/hari dan motor 5 liter/hari.
- 4) Untuk kendaraan Operasional jabatan/Lapangan yang rusak dalam melaksanakan tugas kedinasan karena kecelakaan/tabrakan yang dibuktikan dengan **berita acara Tim Pemeriksa Tekhnis (Dishub dan Dinas PPKAD)** dan bukti visual (photo) dapat diberikan biaya perbaikan maksimal sebesar :

NO	JENIS KENDARAAN	Kecelakaan / Tabrakan (Rp)	
		Rusak Berat/ Over houl	Rusak Ringan
I	Kendaraan Roda 4 (Mobil)	15.000.000	5.000.000,-
II	Kendaraan Roda 2 (Motor)	2.000.000,-	750.000,-

- 5) Untuk kendaraan Operasional Jabatan/Lapangan yang kondisinya rusak berat dalam melaksanakan tugas kedinasan yang dibuktikan dengan Berita Acara Tim Pemeriksa Teknis Dinas PPKAD (Bidang Aset) dan dilampirkan bukti visual (photo) dapat diberikan biaya perbaikan maksimal sebesar :

NO	JENIS KENDARAAN	Rusak Berat/ Over houl	Pengecatan (body repair)
I	Kendaraan Roda 4 (mobil) ≤ Tahun 2004	12.500.000,-	8.000.000

2	Kendaraan Roda 2	1.250.000,-	500.000,-
---	------------------	-------------	-----------

Catatan : Untuk Kendaraan yang termasuk dalam daftar rencana penghapusan/lelang tidak dapat diberikan biaya perbaikan rusak berat dan pengecatan.

c. Kendaraan Operasional Dinas Lapangan

NO	Jenis Kendaraan	JENIS BELANJA (Rp)					
		BBM Perbulan	Pelumas Perbulan	Service Tahunan	Accu Tahunan	Pembelian Ban Tahunan	Reparasi dan Penggantian Suku Cadang Tahunan
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Bus Kota Agung	1.210.000	500.000	2.800.000	1.200.000	6.250.000	3.600.000
II	Bus Sekolah Non AC	3.650.000	700.000	2.800.000	1.200.000	9.375.000	8.300.000
III	Bus Sekolah AC	7.286.000	700.000	3.800.000	1.200.000	9.375.000	8.300.000
IV	Mobil Skylift	3.650.000	700.000	3.800.000	1.200.000	9.375.000	8.300.000
V	Bus (Kt.Agung-B.Lampung)	6.050.000	700.000	3.800.000	1.200.000	9.375.000	8.300.000
VI	Truck	3.300.000	700.000	2.300.000	1.200.000	9.375.000	5.000.000
VII	Mini Bus, Jeep (Pertamax)	2.420.000	400.000	1.500.000	700.000	5.000.000	2.400.000
VIII	Mini Bus, Jeep (Solar)	1.210.000	400.000	1.500.000	700.000	5.000.000	2.400.000
IX	Kend. Damkar	Sesuai Kebutuhan	700.000	3.300.000	4.150.000	7.500.000	5.000.000
X	Sepeda Motor	484.000	60.000	600.000	150.000	400.000	600.000
XI	Mobil Polreiders	4.840.000	400.000	2.500.000	700.000	5.000.000	2.800.000
XII	Mobil Polreiders, Double Cabin	2.420.000	500.000	2.800.000	1.200.000	6.250.000	3.000.000

Catatan :

- Harga BBM Non Subsidi untuk laporan pertanggungjawaban disesuaikan dengan harga riil.
- Untuk Harga BBM Non Subsidi tersebut diberikan kepada pemegang kendaraan yang ditunjuk dan SPJ dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran.
- Khusus untuk Truk Pengangkut Sampah BBM dan Pelumas Menyesuaikan dengan Kebutuhan
- Khusus untuk Mobil Skylift diberikan Belanja Pelumas Hidrolik sebesar Rp. 500.000,-/Perbulan

6. Belanja Perawatan / Pemeliharaan Gedung Kantor, Kantor Kecamatan, Rumah Dinas Camat/Rumah Dokter, Kantor Kelurahan, Gedung Puskesmas.

- Pemeliharaan Gedung Kantor Rp. 25.000.000,-/Thn
- Pemeliharaan Rumah Dinas Asisten Rp. 10.000.000,-/Thn
- Pemeliharaan Kantor Kecamatan Rp. 10.000.000,-/Thn
- Pemeliharaan Rumah Dinas Camat / Dokter Rp. 5.000.000,-/Thn
- Pemeliharaan Kantor Kelurahan Rp. 3.000.000,-/Thn
- Pemeliharaan Gedung Puskesmas Rp. 5.000.000,-/Thn

Catatan :

- Belanja pemeliharaan Gedung Kantor Sekretariat Pemda dan Sekretariat Dewan menyesuaikan dengan kebutuhan.

7. Belanja Perawatan / Pemeliharaan Peralatan Kantor :

- Pemeliharaan Komputer / Notebook Rp. 730.000,-/thn/unit
- Pemeliharaan Printer Rp. 690.000,-/thn/unit
- Pemeliharaan Mesin Tik Rp. 150.000,-/thn/unit
- Pemeliharaan AC Rp. 610.000,-/thn/unit
- Genset lebih kecil dari 50 KVA Rp. 7.190.000,-/thn/unit
- Genset 75 KVA Rp. 8.640.000,-/thn/unit

g. Genset 100 KVA	Rp.10.150.000,-/thn/unit
h. Genset 125 KVA	Rp.10.780.000,-/thn/unit
i. Genset 150 KVA	Rp.13.260.000,-/thn/unit
j. Genset 175 KVA	Rp.14.810.000,-/thn/unit
k. Genset 200 KVA	Rp.15.850.000,-/thn/unit
l. Genset 250 KVA	Rp.16.790.000,-/thn/unit
m. Genset 275 KVA	Rp.17.760.000,-/thn/unit
n. Genset 300 KVA	Rp.20.960.000,-/thn/unit
o. Genset 350 KVA	Rp.22.960.000,-/thn/unit
p. Genset 450 KVA	Rp.25.620.000,-/thn/unit
q. Genset 500 KVA	Rp.31.770.000,-/thn/unit

Catatan :

- Nilai dimaksud sudah termasuk sparepart

8. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gedung Pabrik

a. Belanja Sewa Gedung

1) Badan / Dinas / UPTD	Rp. 2.500.000,-/bln
2) Kecamatan / Kantor	Rp. 2.000.000,-/bln
3) Kelurahan	Rp. 1.500.000,-/bln
4) Bangunan Non Pemerintah untuk KBM	Rp. 200.000,-/1kl/bln

b. Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan

1). Biaya Penyelenggaraan di luar Kota Kabupaten Tanggamus (makan, snack, penginapan, ruang sidang) :

(a) Setara gedung milik Pemerintah Rp. 350.000,-/org/hr

(b) Hotel :

(1) Fullboard (penginapan, 3 x makan, 2 x snack, ruang sidang) Rp. 550.000,-/org/hr

(2) Fullday (1 x makan, 2 x snack, ruang sidang) Rp. 350.000,-/org/hr

(3) Halfday (1x makan, 1 x snack, ruang sidang) Rp. 250.000,-/org/hr

2) Biaya penyelenggaraan di dalam Kota Kabupaten Tanggamus (makan, snack dan ruang sidang)

- Menggunakan fasilitas gedung milik Non Pemerintah Rp. 250.000,-/org/hr

3) Biaya ruang sidang/Pertemuan (diluar point 1 dan 2) disesuaikan dengan kebutuhan dan harga pasar yang berlaku.

c. Belanja Sewa Tempat parkir / uang tambat / hanggar / pool sarana mobilitas.

(disesuaikan dengan kebutuhan dan harga pasar yang berlaku).

9. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat terdiri dari :

- Sewa kendaraan roda dua
- Sewa kendaraan roda empat (mini bus)
- Sewa kendaraan roda empat (bus micro)
- Sewa kendaraan roda empat (bus macro)
- Sewa kendaraan roda empat (truck)

(Disesuaikan kendaraan dengan kebutuhan dan harga pasar yang berlaku).

10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor.

a. Belanja Sewa LCD Proyektor	Rp.	400.000,-set/hari
b. Belanja sewa Generator	Rp.	30.000,-/kva/hari
c. Belanja Sewa Sound System	Rp.	1.000,-/watt/hari

d. Belanja Sewa AC	Rp.	250.000,-/PK/hari
e. Belanja Sewa Pakaian adat / tradisional	Rp.	150.000,-set/hari

(Disesuaikan dengan kebutuhan dan harga pasar yang berlaku).

11. Belanja Makanan dan Minuman :

Dalam Kota maksimal :

1) Jamuan makan (Nasi Kotak)	Rp.	35.000,-/orang
2) Jamuan makan prasmanan (untuk Penataran, Penyuluhan, Diklat, DII)	Rp.	40.000,-/orang
3) Jamuan ringan (snack)	Rp.	10.000,-/orang
4) VIP/Catering (acara tertentu)	Rp.	50.000,-/porsi

12. Belanja Pakaian Dinas dan Atribut :

Pakaian Sipil Lengkap (PSL)/Jas

• Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Rp.	3.000.000,-/Stel
• Pimpinan/Anggota DPRD	Rp.	3.000.000,-/Stel
• Sekretaris daerah/Assisten	Rp.	2.750.000,-/Stel
• Kepala SKPD	Rp.	2.500.000,-/Stel

Pakaian Sipil Resmi (PSR) Lengan Panjang

• Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Rp.	2.700.000,-/Stel
• Pimpinan/Anggota DPRD	Rp.	2.700.000,-/Stel
• Sekretaris Daerah/Assisten	Rp.	2.500.000,-/Stel
• Kepala SKPD	Rp.	2.250.000,-/Stel

Pakaian Sipil Harian (PSH) Lengan Pendek

• Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Rp.	2.500.000,-/Stel
• Pimpinan/Anggota DPRD	Rp.	2.500.000,-/Stel
• Sekretaris Daerah/Assisten	Rp.	2.250.000,-/Stel
• Kepala SKPD	Rp.	2.000.000,-/Stel

Pakaian Dinas Harian (PDH)

• Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Rp.	1.000.000,-/Stel
• Pimpinan/Anggota DPRD	Rp.	1.000.000,-/Stel
• Sekretaris Daerah/Assisten	Rp.	850.000,-/Stel
• SKPD		
Esselon II	Rp.	750.000,-/Stel
Esselon III	Rp.	600.000,-/Stel
Esselon IV	Rp.	500.000,-/Stel
Staff	Rp.	400.000,-/Stel

Atribut Pakaian Kerja

• Tanda Pangkat KDH/WKDH	Rp.	350.000/Pasang
• Tanda Pangkat/Golongan	Rp.	150.000/Pasang
• Lencana Jabatan Esselon	Rp.	150.000/Pasang
• Ikat Pinggang Korpri	Rp.	100.000/Buah
• Pin Korpri	Rp.	50.000/Buah
• Topi KDH/WKDH	Rp.	200.000/Buah
• Topi Linmas	Rp.	75.000/Buah
• Sepatu Olah Raga	Rp.	350.000/Buah

13. Belanja Pakaina Khusus dan Hari hari tertentu :

Pakaian Resmi Lampung Lengkap (PRL)

• Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Rp.	3.250.000,-/Stel
• Pimpinan/Anggota DPRD	Rp.	3.250.000,-/Stel
• Sekretaris Daerah/Assisten	Rp.	3.000.000,-/Stel
• Kepala SKPD	Rp.	2.750.000,-/Stel

Pakaian Dinas Upacara (PDU)

• Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Rp.	3.500.000,-/Stel
• Camat	Rp.	2.500.000,-/Stel

Pakaian Batik

• Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Rp.	500.000,-/Stel
• Pimpinan/Anggota DPRD	Rp.	500.000,-/Stel
• Sekretaris Daerah/Assisten	Rp.	300.000,-/Stel
• SKPD	Rp.	300.000,-/Stel

Pakaian Olah Raga

• Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Rp.	500.000,-/Stel
• Sekretaris Daerah/Assisten	Rp.	400.000,-/Stel
• SKPD	Rp.	350.000,-/Stel

14. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Praktisi/Penceramah / Narasumber (PNS) :

I. DALAM KABUPATEN

(a) Pimpinan MUSPIDA	Rp.	2.500.000,- /org/aktifitas/hr
(b) Tenaga Ahli / Praktisi	Rp.	2.000.000,- /org/aktifitas/hr
(c) Eselon II/a	Rp.	1.750.000,- /org/aktifitas/hr
(d) Eselon II/b	Rp.	1.500.000,- /org/aktifitas/hr
(e) Eselon III	Rp.	1.000.000,- /org/aktifitas/hr
(f) Eselon IV	Rp.	750.000,- /org/aktifitas/hr
(g) Eselon V / Staf	Rp.	350.000,- /org/aktifitas/hr

II. DALAM PROVINSI

(a) Guru Besar	Rp.	3.750.000,- /org/aktifitas/hr
(b) Pimpinan MUSPIDA	Rp.	3.500.000,- /org/aktifitas/hr
(c) Tenaga Ahli / Praktisi	Rp.	3.000.000,- /org/aktifitas/hr
(d) Eselon I	Rp.	2.500.000,- /org/aktifitas/hr
(e) Eselon II/a	Rp.	2.000.000,- /org/aktifitas/hr
(f) Eselon II/b	Rp.	1.750.000,- /org/aktifitas/hr
(g) Eselon III	Rp.	1.500.000,- /org/aktifitas/hr
(h) Eselon IV	Rp.	1.000.000,- /org/aktifitas/hr
(i) Eselon V / Staf	Rp.	750.000,- /org/aktifitas/hr

III. LUAR PROVINSI

(a) Guru Besar	Rp.	4.000.000,- /org/aktifitas/hr
(b) Pimpinan MUSPIDA	Rp.	3.750.000,- /org/aktifitas/hr
(c) Tenaga Ahli / Praktisi	Rp.	3.500.000,- /org/aktifitas/hr
(d) Eselon I	Rp.	3.000.000,- /org/aktifitas/hr
(e) Eselon II/a	Rp.	2.500.000,- /org/aktifitas/hr
(f) Eselon II/b	Rp.	2.000.000,- /org/aktifitas/hr
(g) Eselon III	Rp.	1.750.000,- /org/aktifitas/hr
(h) Eselon IV	Rp.	1.500.000,- /org/aktifitas/hr
(i) Eselon V / Staf	Rp.	1.000.000,- /org/aktifitas/hr

Catatan :

- Jika yang hadir diwakilkan, maka diberikan jasa sesuai Eselon yang mewakili.

15. Belanja Jasa Moderator

(a) Tenaga Ahli / Praktisi	Rp.	2.500.000,- /org/aktifitas/hr
(b) Eselon II dan sederajat	Rp.	1.500.000,- /org/aktifitas/hr
(c) Eselon III dan sederajat	Rp.	1.000.000,- /org/aktifitas/hr
(d) Eselon IV dan sederajat	Rp.	750.000,- /org/aktifitas/hr
(e) Eselon V dan sederajat	Rp.	550.000,- /org/aktifitas/hr
(f) Pelaksana	Rp.	350.000,- /org/aktifitas/hr

Catatan :

- 1 (satu) hari maksimal 2 (dua) orang moderator yang berbeda.

16. Belanja Jasa Notulen

(a) Gol. IV / III	Rp.	350.000,- /org/aktifitas/hr
(b) Gol. II / I	Rp.	250.000,- /org/aktifitas/hr

17. Belanja Jasa Pengajar / Penyaji / Widya Iswara	Rp.	250.000,- /org/Jam
18. Jasa Pedamping Akreditasi Puskesmas	Rp.	250.000,- /org/Jam
19. Jasa Instruktur / Pembahas/Juri	Rp.	250.000,- /org/aktifitas/hr
20. Jasa Pembantu Instruktur	Rp.	100.000,- /org/aktifitas/hr
21. Jasa Tutor Paket A,B,C	Rp.	200.000,- /org/aktifitas/hr
22. Jasa Pengamat Kelas Diklat	Rp.	50.000,- / jam pljr.
23. Jasa Operator Multimedia	Rp.	50.000,- / jam pljr.
24. Jasa Pembuatan Materi	Rp.	300.000,- / materi.

25. Jasa Maksimal Penceramah / Narasumber (Non PNS) :

(a) Guru Besar	Rp.	3.500.000,- /org/kehadiran.
(b) Instruktur	Rp.	200.000,- /jam pljr.
(c) Asisten Instruktur	Rp.	100.000,- /jam pljr.
(d) Praktisi gelar :		
(1) S3	Rp.	1.500.000,-/org/Mtri
(2) S2	Rp.	1.250.000,-/org/Mtri
(3) S1	Rp.	1.000.000,-/org/Mtri
(e) Praktisi non gelar :	Rp.	1.000.000,-/org/Mtri

26. Jasa Penceramah Agama :

(a) Jasa Penceramah Agama Dalam Kabupaten	Rp.	1.500.000,- /org/aktifitas.
(b) Jasa Penceramah Agama Dalam Propinsi	Rp.	3.000.000,- /org/aktifitas.
(c) Jasa Penceramah Agama Luar Propinsi	Rp.	25.000.000,- /org/aktifitas.
(d) Jasa Penceramah Agama Nasional	Rp.	50.000.000,- /org/aktifitas.

27.	Pengamat Kelas	Rp.	500.000,- /org/hari.
28.	Piket Kelas	Rp.	300.000,- /org/hari.
29.	Pendamping Benchmarking/OL	Rp.	1.500.000,- /org/hari.
30.	Instruktur Senam Diklat	Rp.	300.000,- / aktifitas.
31.	Leason Orgonation (LO)	Rp.	500.000,- /org/hari.
32.	Pengawas/Pengamat Ujian Propinsi	Rp.	500.000,- /org/kali.
33.	Pengawas/Pengamat Ujian Propinsi	Rp.	3.500.000,- /org/hari.
34.	Honorarium Rohaniwan		
	a. Honorarium PNS Rohaniwan	Rp.	500.000,- /org/aktifitas.
	b. Honorarium Non PNS Rohaniwan	Rp.	500.000,- /org/aktifitas.

Catatan : Honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang ditugaskan sebagai rohaniawan pada saat pengambilan sumpah. Honorarium sudah termasuk uang transport bagi rohaniawan.

35.	Jasa Assessor/Penguji	Rp.	3.000.000,-/PNS
36.	Jasa Pengolahan data peserta dengan system CAT	Rp.	1.500.000,-/orang/hari

37. **Belanja Perjalanan Dinas**

Belanja perjalanan dinas telah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus.

38. **Belanja akomodasi dan Transportasi (Dianggarkan pada Belanja Honorarium PNS dan Non PNS)**

- a. Penceramah, Narasumber, Guru Besar, Moderator, Pengajar/ Penyaji, Instruktur/ Pembahas, Pembantu Instruktur, Praktisi Gelar, Praktisi Non Gelar dari luar Kota dapat ditambahkan biaya Akomodasi dan Transportasi dengan ketentuan (Maksimal):
 - (1) Akomodasi Rp. 400.000/orang/hari
 - (2) Transportasi :
 - Wilayah Propinsi Lampung, sebesar Rp. 750.000/ orang / Pulang Pergi.
 - Diluar Wilayah tersebut diatas dapat diberikan sebesar Rp.2.000.000 / orang / Pulang Pergi.

Catatan : Sepanjang tidak diberikan akomodasi dan transport dari instansinya.

- b. Penyelenggaraan kursus/ pelatihan/ sosialisasi yang melibatkan peserta Non PNS (Non Pegawai) dapat diberikan penggantian biaya transport sebagai berikut :
 - 1) Kelurahan / Kecamatan di dalam Kabupaten Tanggamus Rp. 50.000,-
 - 2) Kelurahan kecamatan diluar Kabupaten Tanggamus Rp. 100.000,-

39. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri

- a. Biaya Perjalanan Dinas Dikelompokkan dalam 4 (Empat) golongan terdiri dari :
 - Golongan A, untuk Menteri, Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Tinggi Negara, Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh/Kepala Perwakilan dan Pejabat Negara lainnya yang setara termasuk pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pimpinan Lembaga Lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - Golongan B, untuk Duta Besar, Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/c ke atas, Pejabat Eselon I, Perwira Tinggi TNI/Polri, Anggota Lembaga Tinggi Negara, utusan khusus Presiden (Spesial envoy) dan Pejabat lainnya yang setara;
 - Golongan C, untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan III/c sampai dengan Golongan IV/b dan Perwira Menengah TNI/Polri; dan
 - Golongan D, untuk Pegawai Negeri Sipil dan Anggota TNI/Polri selain yang dimaksud pada huruf b dan huruf c.
- b. Perjalanan Dinas Luar Negeri hanya dapat dilaksanakan apabila mendapat surat dari Bupati.
 - Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dianggarkan pada SKPD Sekretariat daerah dan Sekretariat DPRD.
 - Untuk biaya transport dapat diberikan secara riil cost dan untuk besarnya menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017.
 - Uang harian (Uang saku, Uang Makan Minum, transport lokal, biaya penginapan) dibayarkan secara lumpsum dengan tarif sebagai berikut :

NO	NEGARA	GOLONGAN			
		A (US \$)	B (US \$)	C (US \$)	D (US \$)
	AMERIKA UTARA				
1.	Amerika Serikat	578	513	440	382
2.	Kanada	447	404	368	307
	AMERIKA SELATAN				
3.	Argentina	534	402	351	349
4.	Venezuela	557	388	344	343
5.	Brazil	436	341	291	241
6.	Chile	415	316	270	222
7.	Columbia	436	323	276	254
8.	Peru	459	347	320	276
9.	Suriname	398	295	252	207
10.	Ekuador	385	273	242	241
	AMERIKA TENGAH				
11.	Mexico	493	366	324	323
12.	Kuba	406	305	261	221

13.	Panama	414	342	306	271
	EROPA BARAT				
14.	Austria	504	453	318	317
15.	Belgia	466	419	282	281
16.	Perancis	512	464	382	381
17.	Rep. Federasi Jerman	447	415	285	285
18.	Belanda	463	416	272	271
19.	Swiss	636	570	403	401
	EROPA UTARA				
20.	Denmark	567	491	343	301
21.	Finlandia	453	409	354	313
22.	Norwegia	621	559	389	386
23.	Swedia	466	436	342	341
24.	Kerajaan Inggris	792	774	583	582
	EROPA SELATAN				
25.	Bosnia Herzegovina	456	420	334	333
26.	Kroasia	555	506	406	405
27.	Spanyol	457	413	287	286
28.	Yunani	422	379	242	241
29.	Italia	702	637	446	427
30.	Portugal	425	382	242	241
31.	Serbia	417	375	326	288
	EROPA TIMUR				
32.	Bulgaria	406	367	320	284
33.	Czech	618	526	447	367
34.	Hongaria	485	438	390	345
35.	Polandia	461	415	360	319
36.	Rumania	416	381	313	277
37.	Rusia	556	512	407	406
38.	Slovakia	437	394	341	303
39.	Ukraina	485	436	375	331
	AFRIKA BARAT				
40.	Nigeria	361	313	292	291
41.	Sinegal	384	317	237	231
	AFRIKA TIMUR				
42.	Ethiopia	358	295	221	193
43.	Kenya	384	317	237	225
44.	Madagaskar	296	244	182	181
45.	Tanzania	350	290	244	218
46.	Zimbabwe	328	281	248	247
47.	Mozambique	399	329	265	264
	AFRIKA SELATAN				
48.	Namibia	405	334	268	233
49.	Afrika Selatan	380	313	253	251
	AFRIKA UTARA				
50.	Aljazair	342	308	287	286
51.	Mesir	409	303	235	211
52.	Maroko	304	251	192	191
53.	Tunisia	293	241	187	186
54.	Sudan	342	282	210	184
55.	Libya	308	254	189	165
	ASIA BARAT				
56.	Azerbaijan	498	459	365	364
57.	Bahrain	416	294	228	214
58.	Irak	447	325	253	231
59.	Yordania	406	292	236	225
60.	Kuwait	456	325	296	294
61.	Libanon	357	267	207	186
62.	Qatar	386	276	215	196
63.	Arab Suriah	358	257	200	196
64.	Turki	456	364	283	253
65.	Pst. Arab Emirat	459	323	302	301
66.	Yaman	353	241	197	198
67.	Saudi Arabia	450	331	269	251
68.	Kesultanan Oman	413	292	247	249
	ASIA TIMUR				
69.	Rep. Rakyat Cina	378	238	207	206
70.	Hongkong	472	320	287	286
71.	Jepang	519	303	262	261
72.	Korea Selatan	421	326	297	296

73.	Korea Utara	494	321	300	278
	ASIA SELATAN				
74.	Afganistan	385	226	173	172
75.	Bangladesh	339	196	167	166
76.	India	422	329	327	325
77.	Pakistan	343	203	182	181
78.	Srilanka	380	242	209	199
79.	Iran	421	312	243	217
	ASIA TENGAH				
80.	Uzbekistan	392	352	287	254
81.	Kazakstan	456	420	334	333
	ASIA TENGGARA				
82.	Philipina	412	278	222	221
83.	Singapura	530	363	279	276
84.	Malaysia	394	262	219	218
85.	Thailand	392	275	211	201
86.	Myanmar	368	250	197	196
87.	Laos	380	262	202	196
88.	Vietnam	383	265	204	196
89.	Brunei Darussalam	374	256	197	196
90.	Kamboja	296	223	197	196
91.	Timor Leste	392	354	229	196
	ASIA PASIFIK				
92.	Australia	636	585	394	393
93.	Selandia Baru	451	308	278	276
94.	Kaledonia Baru	425	387	276	224
95.	Papua Nugini	520	476	319	259
96.	Fiji	363	329	221	179

Catatan :

- Untuk penganggaran uang transport menggunakan tarif pesawat (termasuk airport tax, boarding pass dan asuransi) pada saat penyusunan RKA ditambah kenaikan 10% dengan tarif tertinggi negara tujuan.
- Untuk penganggaran uang harian menggunakan Kurs yang berlaku pada saat penyusunan RKA ditambah kenaikan 10% dengan tarif tertinggi negara tujuan.

40. Belanja Hadiah

Belanja hadiah dapat diberikan dalam bentuk barang atau uang untuk kegiatan lomba-lomba bersifat prestasi tingkat Kota, Propinsi, Nasional dan Internasional. Bidang : Olah Raga, Pendidikan, Seni dan budaya, KESMAS, Kesehatan dan Lingkungan Hidup, Ekonomi dan Pemerintah, (dibuatkan matrik / tabel).

No	BIDANG LOMBA	J U A R A	BIAYA BELANJA HADIAH MAKSIMAL (Rp)					
			TINGKAT					
			Kecamatan	Kabupaten	Propinsi	Nasional	Internasional	Ket.
1	2	2	3	4	5	6	7	8
I	Olah Raga	I	6.000.000	8.000.000	10.000.000	12.000.000	14.000.000	Perorangan
		II	4.000.000	6.000.000	8.000.000	10.000.000	12.000.000	
		III	3.000.000	5.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000	
		I	12.500.000	15.500.000	20.000.000	25.000.000	30.000.000	Beregu (≤ 10 orang)
		II	10.500.000	12.500.000	15.500.000	20.500.000	25.000.000	
		III	8.500.000	10.500.000	12.500.000	15.500.000	20.500.000	
		I	15.500.000	20.000.000	25.000.000	30.000.000	40.000.000	Beregu (> 10 orang)
		II	12.500.000	15.500.000	20.500.000	25.000.000	30.000.000	
		III	10.500.000	12.500.000	15.500.000	20.500.000	22.500.000	

2	Pendidikan	I	6.000.000	8.000.000	10.000.000	12.000.000	14.000.000	Perorangan
		II	4.000.000	6.000.000	8.000.000	10.000.000	12.000.000	
		III	3.000.000	5.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000	
		I	10.000.000	12.000.000	14.000.000	16.000.000	18.000.000	Beregu
		II	8.500.000	10.500.000	12.500.000	14.500.000	16.500.000	
		III	6.000.000	8.000.000	10.000.000	12.000.000	14.000.000	
3	Seni dan Budaya	I	6.000.000	8.000.000	10.000.000	12.000.000	14.000.000	Perorangan
		II	4.000.000	6.000.000	8.000.000	10.000.000	12.000.000	
		III	3.000.000	5.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000	
		I	10.000.000	12.000.000	14.000.000	16.000.000	18.000.000	Beregu
		II	8.500.000	10.500.000	12.500.000	14.500.000	16.500.000	
		III	6.000.000	8.000.000	10.000.000	12.000.000	14.000.000	
4	KESMAS	I	6.000.000	8.000.000	10.000.000	12.000.000	14.000.000	Perorangan
		II	4.000.000	6.000.000	8.000.000	10.000.000	12.000.000	
		III	3.000.000	5.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000	
		I	10.000.000	12.000.000	14.000.000	16.000.000	18.000.000	Beregu
		II	8.500.000	10.500.000	12.500.000	14.500.000	16.500.000	
		III	6.000.000	8.000.000	10.000.000	12.000.000	14.000.000	
5	Kesehatan dan Lingkungan Hidup	I	6.000.000	8.000.000	10.000.000	12.000.000	14.000.000	Perorangan
		II	4.000.000	6.000.000	8.000.000	10.000.000	12.000.000	
		III	3.000.000	5.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000	
		I	10.000.000	12.000.000	14.000.000	16.000.000	18.000.000	Beregu
		II	8.500.000	10.500.000	12.500.000	14.500.000	16.500.000	
		III	6.000.000	8.000.000	10.000.000	12.000.000	14.000.000	
6	Ekonomi dan Pemerintahn	I	10.000.000	12.000.000	14.000.000	16.000.000	18.000.000	Per-Badan Hukum
		II	8.500.000	10.500.000	12.500.000	14.500.000	16.500.000	
		III	6.000.000	8.000.000	10.000.000	12.000.000	14.000.000	

Catatan :

- Untuk Juara Favorit, Juara Harapan menyesuaikan.
- Untuk penganggaran belanja hadiah/penghargaan berbentuk barang disesuaikan dengan standar harga barang (SHB).

41. Belanja Penghargaan untuk Seniman/ Budayawan dan Pelatih Olahraga.
Seniman/ Budayawan dan Pelatih Olahraga dapat diberikan penghargaan sebesar Rp. 5.000.000,- /orang

42. Belanja Jasa Pelayanan Masyarakat :

a. Insentif Guru Ngaji, PPPN, Penceramah :

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 1) Guru Ngaji | Rp. 600.000,-/orang/tahun |
| 2) Pembantu Penghulu Pencatat Nikah | Rp. 750.000,-/orang/tahun |
| 3) Penceramah | Rp. 600.000,-/orang/tahun |
| 4) Majelis Taklim | Rp. 500.000,-/tahun |

43. **Belanja Barang dan Jasa untuk Kantor Kelurahan :**
 Belanja Barang dan Jasa untuk Kantor Kelurahan dianggarkan dalam program pelayanan administrasi perkantoran pada SKPD Kecamatan **alokasi anggaran maksimal sebesar Rp. 1.000.000/bulan.**

44. **Biaya Tenaga Ahli Berdasarkan Pengalaman Profesi**

BIAYA TENAGA AHLI BERDASARKAN PENGALAMAN PROFESI	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
A. Pendidikan S1			
- Ahli Muda Pengalaman 1 Tahun	Orang/Bulan	18.568.000	Surat Edaran No. 03 / SE / M / 2013, Tentang Pedoman Besaran Biaya Langsung Personil / Remunerasi Dalam Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Jasa Konsultansi di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum
- Ahli Muda Pengalaman 2 Tahun	Orang/Bulan	20.152.000	
- Ahli Muda Pengalaman 3 Tahun	Orang/Bulan	21.648.000	
- Ahli Muda Pengalaman 4 Tahun	Orang/Bulan	23.232.000	
- Ahli Madya Pengalaman 1 Tahun	Orang/Bulan	24.816.000	
- Ahli Madya Pengalaman 2 Tahun	Orang/Bulan	26.400.000	
- Ahli Madya Pengalaman 3 Tahun	Orang/Bulan	27.896.000	
- Ahli Madya Pengalaman 4 Tahun	Orang/Bulan	29.480.000	
- Ahli Utama Pengalaman 1 Tahun	Orang/Bulan	31.064.000	
- Ahli Utama Pengalaman 2 Tahun	Orang/Bulan	32.648.000	
- Ahli Utama Pengalaman 3 Tahun	Orang/Bulan	34.144.000	
- Ahli Utama Pengalaman 4 Tahun	Orang/Bulan	35.728.000	
- Ahli Utama Pengalaman 5 Tahun	Orang/Bulan	37.312.000	
- Ahli Utama Pengalaman 6 Tahun	Orang/Bulan	38.808.000	
- Ahli Utama Pengalaman 7 Tahun	Orang/Bulan	40.392.000	
- Ahli Utama Pengalaman 8 Tahun	Orang/Bulan	41.976.000	
- Ahli Utama Pengalaman 9 Tahun	Orang/Bulan	43.560.000	
- Ahli Utama Pengalaman 10 Tahun	Orang/Bulan	45.056.000	
- Ahli Utama Pengalaman 11 Tahun	Orang/Bulan	46.640.000	
- Ahli Utama Pengalaman 12 Tahun	Orang/Bulan	48.224.000	
- Asisten Muda Pengalaman 1 Tahun	Orang/Bulan	2.800.000	
- Asisten Muda Pengalaman 4 Tahun	Orang/Bulan	3.400.000	

- Teknisi SO/D3 Pengalaman 3 tahun	Orang/Bulan	2.550.000		
- Teknisi SO/D3 Pengalaman 4 tahun	Orang/Bulan	2.700.000		
- Teknisi SO/D3 Pengalaman 7 tahun	Orang/Bulan	3.250.000		
- Teknisi SO/D3 Pengalama n 8 tahun	Orang/Bulan	3.600.000		
- Teknisi SO/D3 Pengalaman 11 tahun	Orang/Bulan	4.800.000		
- Teknisi SO/D3 Pengalaman 12 tahun	Orang/Bulan	5.100.000		
- Teknisi SO/D3 Pengalaman 15 tahun	Orang/Bulan	6.000.000		
- Teknisi SO/D3 Pengalaman 16 tahun	Orang/Bulan	6.500.000		
- Teknisi SO/D3 Pengalaman 20 tahun	Orang/Bulan	7.500.000		
- Teknisi SMK/D1/D2 Pengalaman 3 tahun	Orang/Bulan	1.800.000		
- Teknisi SMK/D1/D2 Pengalaman 7 tahun	Orang/Bulan	2.500.000		
- Teknisi SMK/D1/D2 Pengalaman 8 tahun	Orang/Bulan	2.700.000		
- Teknisi SMK/D1/D2 Pengalaman 11 tahun	Orang/Bulan	3.250.000		
- Teknisi SMK/D1/D2 Pengalaman 12 tahun	Orang/Bulan	3.600.000		
- Teknisi SMK/D1/D2 Pengalaman 15 tahun	Orang/Bulan	4.800.000		
- Teknisi SMK/D1/D2 Pengalaman 16 tahun	Orang/Bulan	5.100.000		
- Teknisi SMK/D1/D2 Pengalaman 20 tahun	Orang/Bulan	6.500.000		
B. Pendidikan S2				
- Ahli Madya Pengalaman 1 Tahun	Orang/Bulan	29.500.000		
- Ahli Madya Pengalaman 2 Tahun	Orang/Bulan	27.808.000		
- Ahli Madya Pengalaman 3 Tahun	Orang/Bulan	29.568.000		
- Ahli Madya Pengalaman 4 Tahun	Orang/Bulan	31.504.000		
- Ahli Utama Pengalaman 1 Tahun	Orang/Bulan	33.264.000		
- Ahli Utama Pengalaman 2 Tahun	Orang/Bulan	35.024.000		
- Ahli Utama Pengalaman 3 Tahun	Orang/Bulan	36.872.000		
- Ahli Utama Pengalaman 4 Tahun	Orang/Bulan	38.632.000		
- Ahli Utama Pengalaman 5 Tahun	Orang/Bulan	40.568.000		
- Ahli Utama Pengalaman 6 Tahun	Orang/Bulan	42.328.000		
- Ahli Utama Pengalaman 7 Tahun	Orang/Bulan	44.088.000		

- Ahli Utama Pengalaman 8 Tahun	Orang/Bulan	45.936.000	
- Ahli Utama Pengalaman 9 Tahun	Orang/Bulan	47.696.000	
- Ahli Utama Pengalaman 10 Tahun	Orang/Bulan	49.456.000	
- Ahli Utama Pengalaman 11 Tahun	Orang/Bulan	51.392.000	
- Ahli Utama Pengalaman 12 Tahun	Orang/Bulan	53.152.000	
- Asisten Muda Pengalaman 1 Tahun	Orang/Bulan	2.800.000	
- Asisten Muda Pengalaman 4 Tahun	Orang/Bulan	3.400.000	
- Teknisi SO/D3 Pengalaman 1 tahun	Orang/Bulan	2.200.000	
- Teknisi SO/D3 Pengalaman 3 tahun	Orang/Bulan	2.550.000	
- Teknisi SO/D3 Pengalaman 4 tahun	Orang/Bulan	2.700.000	
- Teknisi SO/D3 Pengalaman 7 tahun	Orang/Bulan	3.250.000	
- Teknisi SO/D3 Pengalaman 8 tahun	Orang/Bulan	3.600.000	
- Teknisi SO/D3 Pengalaman 11 tahun	Orang/Bulan	4.800.000	
- Teknisi SO/D3 Pengalaman 12 tahun	Orang/Bulan	5.100.000	
- Teknisi SO/D3 Pengalaman 15 tahun	Orang/Bulan	6.000.000	
- Teknisi SO/D3 Pengalaman 16 tahun	Orang/Bulan	6.500.000	
- Teknisi SO/D3 Pengalaman 20 tahun	Orang/Bulan	7.500.000	
- Teknisi SMK/D1/D2 Pengalaman 3 tahun	Orang/Bulan	1.800.000	
- Teknisi SMK/D1/D2 Pengalaman 7 tahun	Orang/Bulan	2.500.000	
- Teknisi SMK/D1/D2 Pengalaman 8 tahun	Orang/Bulan	2.700.000	
- Teknisi SMK/D1/D2 Pengalaman 11 tahun	Orang/Bulan	3.250.000	
- Teknisi SMK/D1/D2 Pengalaman 12 tahun	Orang/Bulan	3.600.000	
- Teknisi SMK/D1/D2 Pengalaman 15 tahun	Orang/Bulan	4.800.000	
- Teknisi SMK/D1/D2 Pengalaman 16 tahun	Orang/Bulan	5.100.000	
- Teknisi SMK/D1/D2 Pengalaman 20 tahun	Orang/Bulan	6.500.000	
C. Pendidikan S3			
- Ahli Utama Pengalaman 1 Tahun	Orang/Bulan	36.432.000	
- Ahli Utama Pengalaman 2 Tahun	Orang/Bulan	38.456.000	

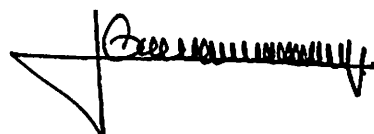
- Ahli Utama Pengalaman 3 Tahun	Orang/Bulan	40.480.000	
- Ahli Utama Pengalaman 4 Tahun	Orang/Bulan	42.416.000	
- Ahli Utama Pengalaman 5 Tahun	Orang/Bulan	44.352.000	
- Ahli Utama Pengalaman 6 Tahun	Orang/Bulan	46.464.000	
- Ahli Utama Pengalaman 7 Tahun	Orang/Bulan	48.400.000	
- Ahli Utama Pengalaman 8 Tahun	Orang/Bulan	50.336.000	
- Ahli Utama Pengalaman 9 Tahun	Orang/Bulan	52.272.000	
- Ahli Utama Pengalaman 10 Tahun	Orang/Bulan	54.384.000	
- Ahli Utama Pengalaman 11 Tahun	Orang/Bulan	56.496.000	
- Ahli Utama Pengalaman 12 Tahun	Orang/Bulan	58.784..000	

45.Besaran Prosentase Kegiatan Fisik

PROSENTASE KEGIATAN FISIK		PROSENTASE	KETERANGAN
A . sampai dengan Rp. 250.000.000,-			
<ul style="list-style-type: none">- Perencanaan Konstruksi- Pengawasan Konstruksi- Pengelolaan Kegiatan	8,23 5,35 14,00	Peraturan Menteri-Pekerjaan Umum No : 45/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.	
B. Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,-			
<ul style="list-style-type: none">- Perencanaan Konstruksi- Pengawasan Konstruksi- Pengelolaan Kegiatan	8,23 s.d 6,83 5,35 s.d 4,62 14,00 s.d 10,00		
C. Rp. 500.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,-			
<ul style="list-style-type: none">- Perencanaan Konstruksi- Pengawasan Konstruksi- Pengelolaan Kegiatan	6,83 s.d 5,63 4,62 s.d 3,90 10,00 s.d 6,75		
D. Rp. 1.000.000.000,- sampai dengan Rp. 2.500.000.000,-			
<ul style="list-style-type: none">- Perencanaan Konstruksi- Pengawasan Konstruksi- Pengelolaan Kegiatan	5,63 s.d 4,65 3,90 s.d 3,27 6,75 s.d 4,20		
E. Rp. 2.500.000.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000.000,-			
<ul style="list-style-type: none">- Perencanaan Konstruksi- Pengawasan Konstruksi- Pengelolaan Kegiatan	4,65 s.d 3,90 3,27 s.d 2,73 4,20 s.d 2,85		

F. Rp. 5.000.000.000,-sampai dengan Rp. 10.000.000.000,-		
- Perencanaan Konstruksi		3,90 s.d 3,28
- Pengawasan Konstruksi		2,73 s.d 2,27
- Pengelolaan Kegiatan		2,85 s.d 1,90
G. Rp. 10.000.000.000,- sampai dengan Rp. 25.000.000.000,-		
- Perencanaan Konstruksi		3,28 s.d 2,82
- Pengawasan Konstruksi		2,27 s.d 1,92
- Pengelolaan Kegiatan		1,90 s.d 1,20
H. Rp. 25.000.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000.000,-		
- Perencanaan Konstruksi		2,82 s.d 2,44
- Pengawasan Konstruksi		1,92 s.d 1,65
- Pengelolaan Kegiatan		1,20 s.d 0,80
I. Rp. 50.000.000.000,- sampai dengan Rp. 100.000.000.000,-		
- Perencanaan Konstruksi		2,44 s.d 2,16
- Pengawasan Konstruksi		1,65 s.d 1,43
- Pengelolaan Kegiatan		0,80 s.d 0,50
J. Rp. 100.000.000.000,-sampai dengan Rp. 250.000.000.000,-		
- Perencanaan Konstruksi		2,16 s.d 1,94
- Pengawasan Konstruksi		1,43 s.d 1,26
- Pengelolaan Kegiatan		0,50 s.d 0,28
J. Rp. 250.000.000.000,-sampai dengan Rp. 500.000.000.000,-		
- Perencanaan Konstruksi		1,94 s.d 1,80
- Pengawasan Konstruksi		1,26 s.d 1,18
- Pengelolaan Kegiatan		0,28 s.d 0,18

BUPATI TANGGAMUS



BAMBANG KURNIAWAN

As. B.10. 001

32

It



KODE REKENING

Tahun Anggaran 2017

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
1	ASET		
1.1	ASET LANCAR		
1.1.1	Kas	D	
1.1.1.01	Kas Di Kas Daerah		
1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah PT. Bank Lampung Cabang Kota Agung		
1.1.1.02	Kas Di Bendahara Penerimaan		
1.1.1.02.01	Kas Di Bendahara Penerimaan		
1.1.1.03	Kas Di Bendahara Pengeluaran		
1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		
1.1.1.03.02	Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai		
1.1.1.04	Kas Di Badan Layanan Umum Daerah		
1.1.1.04.01	Kas Di Badan Layanan Umum Daerah		
1.1.2	Investasi Jangka Pendek	D	
1.1.2.01	Investasi Dalam Saham		
1.1.2.01.01	Investasi Dalam Saham		
1.1.2.02	Investasi Dalam Obligasi		
1.1.2.02.01	Investasi Dalam Obligasi		
1.1.3	Piutang	D	
1.1.3.01	Piutang Pajak		
1.1.3.01.01	Piutang Pajak		
1.1.3.02	Piutang Retribusi		
1.1.3.02.01	Piutang Retribusi		
1.1.3.03	Piutang Dana Bagi Hasil		
1.1.3.03.01	Piutang Dana Bagi Hasil Pajak		
1.1.3.03.02	Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak		
1.1.3.04	Piutang Dana Alokasi Umum		
1.1.3.04.01	Piutang Dana Alokasi Umum		
1.1.3.05	Piutang Dana Alokasi Khusus		
1.1.3.05.01	Piutang Dana Alokasi Khusus		
1.1.4	Piutang Lain-lain	D	
1.1.4.01	Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran		
1.1.4.01.01	Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran Cicilan Kendaraan Bermotor		
1.1.4.01.02	Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran Cicilan Rumah		
1.1.4.02	Piutang Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah		
1.1.4.02.01	Piutang Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah		
1.1.4.03	Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah		
1.1.4.03.01	Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah		
1.1.4.04	Piutang Dividen		
1.1.4.04.01	Piutang Dividen		
1.1.4.05	Piutang Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah		
1.1.4.05.01	Piutang Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah		
1.1.4.06	Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum		
1.1.4.06.01	Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum		
1.1.4.07	Piutang Lain-lain - Lainnya		
1.1.4.07.01	Panjar Kegiatan		
1.1.4.07.02	Uang Muka Operasional		
1.1.5	Persediaan	D	
1.1.5.01	Persediaan Alat Tulis Kantor		
1.1.5.01.01	Persediaan Alat Tulis Kantor		
1.1.5.02	Persediaan Alat Listrik		
1.1.5.02.01	Persediaan Alat Listrik		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
1.1.5.03	Persediaan Material/Bahan		
1.1.5.03.01	Persediaan Bahan Baku Bangunan		
1.1.5.03.02	Persediaan Suku Cadang Sarana Mobilitas		
1.1.5.03.03	Persediaan Bahan/Bibit Tanaman		
1.1.5.03.04	Persediaan Bibit Ternak		
1.1.5.03.05	Persediaan Obat-obatan		
1.1.5.03.06	Persediaan Bahan Kimia		
1.1.5.04	Persediaan Benda Pos		
1.1.5.04.01	Persediaan Perangko		
1.1.5.04.02	Persediaan Materai		
1.1.5.04.03	Persediaan Kertas Segel		
1.1.5.05	Persediaan Bahan Bakar		
1.1.5.05.01	Persediaan Bahan Bakar Minyak		
1.1.5.06	Persediaan Bahan Makanan Pokok		
1.1.5.06.01	Persediaan Bahan Makanan Pokok		
1.1.8	R/K SKPD	D	
1.1.8.01	R/K SKPD		
1.1.8.01.01	R/K SKPD		
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
1.2.1	Investasi Non Permanen	D	
1.2.1.01	Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		
1.2.1.01.01	Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		
1.2.1.02	Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		
1.2.1.02.01	Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		
1.2.1.03	Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya		
1.2.1.03.01	Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya		
1.2.1.04	Investasi Dalam Surat Utang Negara		
1.2.1.04.01	Investasi Dalam Surat Utang Negara		
1.2.1.05	Investasi Non Permanen Lainnya		
1.2.1.05.01	Investasi Non Permanen Lainnya		
1.2.2	Investasi Permanen	D	
1.2.2.01	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
1.2.2.01.01	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
1.2.2.02	Penyertaan Modal Dalam Proyek Pembangunan		
1.2.2.02.01	Penyertaan Modal Dalam Proyek Pembangunan		
1.2.2.03	Penyertaan Modal Perusahaan Patungan		
1.2.2.03.01	Penyertaan Modal Perusahaan Patungan		
1.2.2.04	Invertasi Permanen Lainnya		
1.2.2.04.01	Investasi Permanen Lainnya		
1.3	ASET TETAP		
1.3.1	Tanah	D	
1.3.1.01	Tanah Perkampungan		
1.3.1.01.01	Tanah Kampung		
1.3.1.01.02	Tanah Emplasmen		
1.3.1.01.03	Tanah Kuburan		
1.3.1.02	Tanah Pertanian		
1.3.1.02.01	Tanah Sawah Satu Tahun Ditanami		
1.3.1.02.02	Tanah Tegalan		
1.3.1.02.03	Tanah Ladang		
1.3.1.03	Tanah Perkebunan		
1.3.1.03.01	Tanah Perkebunan		
1.3.1.04	Tanah Kebun Campuran		
1.3.1.04.01	Bidang Tanah Kebun Yang Tidak Ada Jaringan Pengairan		
1.3.1.04.02	Kebun Tumbuh Liar Bercampur Jenis Lain		
1.3.1.05	Tanah Hutan		
1.3.1.05.01	Hutan Lebat		
1.3.1.05.02	Hutan Belukar		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
1.3.1.05.03	Hutan Tanaman Jenis		
1.3.1.05.04	Hutan Alam Sejenis/Hutan Rawa		
1.3.1.05.05	Hutan Untuk Penggunaan Khusus		
1.3.1.06	Tanah Kolam Ikan		
1.3.1.06.01	Kolam Ikan Tambak		
1.3.1.06.02	Kolam Ikan Air Tawar		
1.3.1.07	Tanah Danau/Rawa		
1.3.1.07.01	Tanah Rawa		
1.3.1.07.02	Tanah Danau		
1.3.1.08	Tanah Tandus/Rusak		
1.3.1.08.01	Tanah Tandus		
1.3.1.08.02	Tanah Rusak		
1.3.1.09	Tanah Alang-alang dan Padang Rumput		
1.3.1.09.01	Tanah Alang-alang		
1.3.1.09.02	Tanah Padang Rumput		
1.3.1.10	Tanah Pengguna Lain		
1.3.1.10.01	Tanah Penggalian		
1.3.1.11	Tanah Untuk Bangunan Gedung		
1.3.1.11.01	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal		
1.3.1.11.02	Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan		
1.3.1.11.03	Tanah Untuk Bangunan Industri		
1.3.1.11.04	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa		
1.3.1.11.05	Tanah Kosong		
1.3.1.11.06	Tanah Peternakan		
1.3.1.11.07	Tanah Bangunan Pengairan		
1.3.1.11.08	Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan		
1.3.1.11.09	Tanah Lembiran/Bantaran/Lepe-lepe/Setren dst		
1.3.1.12	Tanah Untuk Pertambangan		
1.3.1.12.01	Tanah Pertambangan		
1.3.1.13	Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung		
1.3.1.13.01	Tanah Lapangan Olah Raga		
1.3.1.13.02	Tanah Lapangan Parkir		
1.3.1.13.03	Tanah Lapangan Penimbun Barang		
1.3.1.13.04	Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam		
1.3.1.13.05	Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan		
1.3.1.13.06	Tanah Lapangan Terbang		
1.3.1.13.07	Tanah Untuk Bangunan Jalan		
1.3.1.13.08	Tanah Untuk Bangunan Air		
1.3.1.13.09	Tanah Untuk Bangunan Instalasi		
1.3.1.13.10	Tanah Untuk Bangunan Jaringan		
1.3.1.13.11	Tanah Untuk Bangunan Bersejarah		
1.3.1.13.12	Tanah Untuk Bangunan Gedung Olah Raga		
1.3.1.13.13	Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah		
1.3.2	Peralatan dan Mesin	D	
1.3.2.01	Alat-Alat Besar Darat		
1.3.2.01.01	Alat-Alat Besar Darat Tractor		
1.3.2.01.02	Alat-Alat Besar Darat Grader		
1.3.2.01.03	Alat-Alat Besar Darat Excavator		
1.3.2.01.04	Alat-Alat Besar Darat Pile Driver		
1.3.2.01.05	Alat-Alat Besar Darat Hauler		
1.3.2.01.06	Alat-Alat Besar Darat Asphal Equipment		
1.3.2.01.07	Alat-Alat Besar Darat Compacting Equipment		
1.3.2.01.08	Alat-Alat Besar Darat Aggregate Concrete Equipment		
1.3.2.01.09	Alat-Alat Besar Darat Loader		
1.3.2.01.10	Alat-Alat Besar Darat Alat Pengangkat		
1.3.2.01.11	Alat-Alat Besar Darat Mesin Proses		
1.3.2.02	Alat-Alat Besar Apung		
1.3.2.02.01	Alat-Alat Besar Apung Dredger		
1.3.2.02.02	Alat-Alat Besar Apung Floating Excavator		
1.3.2.02.03	Alat-Alat Besar Apung Amphibi Dredger		
1.3.2.02.04	Alat-Alat Besar Apung Kapal Tarik		
1.3.2.02.05	Alat-Alat Besar Apung Mesin Proses Agung		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
1.3.2.03	Alat-alat Bantu		
1.3.2.03.01	Alat-alat Bantu Alat Penarik		
1.3.2.03.02	Alat-alat Bantu Feeder		
1.3.2.03.03	Alat-alat Bantu Compressor		
1.3.2.03.04	Alat-alat Bantu Electric Generating Set		
1.3.2.03.05	Alat-alat Bantu Pompa		
1.3.2.03.06	Alat-alat Bantu Mesin Bor		
1.3.2.03.07	Alat-alat Bantu Unit Pemeliharaan Lapangan		
1.3.2.03.08	Alat-alat Bantu Alat Pengolahan Air Kotor		
1.3.2.03.09	Alat-alat Bantu Pembangkit Uap Air Panas/Sistem Generator		
1.3.2.04	Alat Angkutan Darat Bermotor		
1.3.2.04.01	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan		
1.3.2.04.02	Kendaraan Bermotor Penumpang		
1.3.2.04.03	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang		
1.3.2.04.04	Kendaraan Bermotor Khusus		
1.3.2.04.05	Kendaraan Bermotor Beroda Dua		
1.3.2.04.06	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga		
1.3.2.04.07	Angkutan Darat Bermotor Truck		
1.3.2.04.08	Angkutan Darat Bermotor Tangki (Air,Minyak,Tinja)		
1.3.2.04.09	Angkutan Darat Bermotor Pick Up		
1.3.2.04.10	Angkutan Darat Bermotor Ambulans		
1.3.2.04.11	Angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran		
1.3.2.05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor		
1.3.2.05.01	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang		
1.3.2.05.02	Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang		
1.3.2.06	Alat Angkut Apung Bermotor		
1.3.2.06.01	Alat Angkut Apung Bermotor Barang		
1.3.2.06.02	Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang		
1.3.2.06.03	Alat Angkut Apung Bermotor Khusus		
1.3.2.07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor		
1.3.2.07.01	Alat Angkut Apung Tak Bermotor Untuk Barang		
1.3.2.07.02	Alat Angkut Apung Tak Bermotor Penumpang		
1.3.2.07.03	Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus		
1.3.2.08	Alat Angkut Bermotor Udara		
1.3.2.08.01	Kapal Terbang		
1.3.2.09	Alat Bengkel Bermesin		
1.3.2.09.01	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi		
1.3.2.09.02	Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah		
1.3.2.09.03	Perkakas Bengkel Listrik		
1.3.2.09.04	Perkakas Bengkel Service		
1.3.2.09.05	Perkakas Pengangkat Bermesin		
1.3.2.09.06	Perkakas Bengkel Kayu		
1.3.2.09.07	Perkakas Bengkel Khusus		
1.3.2.09.08	Peralatan Las		
1.3.2.09.09	Perkakas Pabrik Es		
1.3.2.10	Alat Bengkel Tak Bermesin		
1.3.2.10.01	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam		
1.3.2.10.02	Perkakas Bengkel Listrik		
1.3.2.10.03	Perkakas Bengkel Service		
1.3.2.10.04	Perkakas Pengangkat		
1.3.2.10.05	Perkakas Standar (Standart Tool)		
1.3.2.10.06	Perkakas Khusus (Special Tool)		
1.3.2.10.07	Perkakas Bengkel Kerja		
1.3.2.10.08	Peralatan Tukang-tukang Besi		
1.3.2.10.09	Peralatan Tukang Kayu		
1.3.2.10.10	Peralatan Tukang Kulit		
1.3.2.10.11	Peralatan Ukur, Gip & Feting		
1.3.2.11	Alat Ukur		
1.3.2.11.01	Alat Ukur universal		
1.3.2.11.02	Alat Ukur/Test Intelegensia		
1.3.2.11.03	Alat Ukur/Test Alat Kepribadian		
1.3.2.11.04	Alat Ukur /Test Klinis Lain		
1.3.2.11.05	Alat Calibrasi		
1.3.2.11.06	Alat Ukur Oscilloscope		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
1.3.2.11.07	Alat Ukur Universal Tester		
1.3.2.11.08	Alat Ukur/Pembanding		
1.3.2.11.09	Alat Ukur Lainnya		
1.3.2.11.10	Alat Timbangan/Blora		
1.3.2.11.11	Anak Timbangan/Biasa		
1.3.2.11.12	Takaran Kering		
1.3.2.11.13	Takaran Bahan Bangunan 2 HL		
1.3.2.11.14	Takaran Latex/Getah Susu		
1.3.2.11.15	Gelas Takar Berbagai Kapasitas		
1.3.2.12	Alat Pengolahan		
1.3.2.12.01	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman		
1.3.2.12.02	Alat Panen/Pengolahan		
1.3.2.12.03	Alat-Alat Peternakan		
1.3.2.12.04	Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian		
1.3.2.12.05	Alat Laboratorium Pertanian		
1.3.2.12.06	Alat Prosesing		
1.3.2.12.07	Alat Pasca Panen		
1.3.2.12.08	Alat Produksi Perikanan		
1.3.2.12.09	Tong Sampah		
1.3.2.13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan		
1.3.2.13.01	Alat Pemeliharaan Tanaman		
1.3.2.13.02	Alat Panen		
1.3.2.13.03	Alat Penyimpanan		
1.3.2.13.04	Alat Laboratorium		
1.3.2.13.05	Alat Penangkap Ikan		
1.3.2.14	Alat Kantor		
1.3.2.14.01	Mesin Tik		
1.3.2.14.02	Mesin Hitung/Jumlah		
1.3.2.14.03	Alat Reproduksi (Pengganda)		
1.3.2.14.04	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor		
1.3.2.14.05	Alat Kantor Lainnya		
1.3.2.14.06	Mesin Jilid		
1.3.2.14.07	Mesin Absensi		
1.3.2.14.08	Mesin Absensi		
1.3.2.14.09	Papan Tulis Elektronik		
1.3.2.14.10	Peralatan Pemetaan		
1.3.2.14.11	Multi Media Display		
1.3.2.14.12	Papan Nama Dinas		
1.3.2.14.13	Meja Komputer		
1.3.2.14.14	Papan Informasi		
1.3.2.14.15	Sarana Kerja Petugas Lapangan KB		
1.3.2.14.17	Papan Reklame Informasi		
1.3.2.14.18	Mesin Penghancur Kertas		
1.3.2.14.19	Tiang Bendera Kantor		
1.3.2.15	Alat Rumah Tangga		
1.3.2.15.01	Meubelair		
1.3.2.15.02	Alat Pengukur Waktu		
1.3.2.15.03	Alat Pembersih		
1.3.2.15.04	Alat Pendingin		
1.3.2.15.05	Alat Dapur		
1.3.2.15.06	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		
1.3.2.15.07	Alat Pemadam Kebakaran		
1.3.2.15.08	Pengadaan TV		
1.3.2.15.09	Penghias Ruangan Rumah Tangga		
1.3.2.15.10	Pompa Air		
1.3.2.15.11	Tower Air		
1.3.2.15.12	Kursi		
1.3.2.15.13	Karpet		
1.3.2.15.14	Spring Bed		
1.3.2.16	Peralatan Komputer		
1.3.2.16.01	Komputer Unit/Jaringan		
1.3.2.16.02	Personal Komputer		
1.3.2.16.03	Peralatan Komputer Mainframe		
1.3.2.16.04	Peralatan Mini Komputer		
1.3.2.16.05	Peralatan Personal Komputer		
1.3.2.16.06	Peralatan Jaringan		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
1.3.2.16.07	Notebook		
1.3.2.16.08	Scanner		
1.3.2.16.09	Printer		
1.3.2.16.10	Monitor/Display		
1.3.2.16.11	UPS/Stabilizer		
1.3.2.16.12	Kelengkapan Komputer		
1.3.2.17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat		
1.3.2.17.01	Meja Kerja Pejabat		
1.3.2.17.02	Meja Rapat Pejabat		
1.3.2.17.03	Kursi Kerja Pejabat		
1.3.2.17.04	Kursi Rapat Pejabat		
1.3.2.17.05	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat		
1.3.2.17.06	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat		
1.3.2.17.07	Lemari dan Arsip Pejabat		
1.3.2.18	Alat Studio		
1.3.2.18.01	Peralatan Studio Visual		
1.3.2.18.02	Peralatan Studio Video dan Film		
1.3.2.18.03	Peralatan Studio Video dan Film A		
1.3.2.18.04	Peralatan Cetak		
1.3.2.18.05	Peralatan Computing		
1.3.2.18.06	Peralatan Pemetaan Ukur		
1.3.2.18.07	Perlengkapan Audio Visual		
1.3.2.18.08	Proyektor/LCD		
1.3.2.19	Alat Komunikasi		
1.3.2.19.01	Alat Komunikasi Telephone		
1.3.2.19.02	Alat Komunikasi Radio SSB		
1.3.2.19.03	Alat Komunikasi Radio HF/FM		
1.3.2.19.04	Alat Komunikasi Radio VHF		
1.3.2.19.05	Alat Komunikasi Radio UHF		
1.3.2.19.06	Alat Komunikasi Sosial		
1.3.2.19.07	Alat-alat Sandi		
1.3.2.20	Peralatan Pemancar		
1.3.2.20.01	Peralatan Pemancar MF/MW		
1.3.2.20.02	Peralatan Pemancar HF/SW		
1.3.2.20.03	Peralatan Pemancar VHF/FM		
1.3.2.20.04	Peralatan Pemancar UHF		
1.3.2.20.05	Peralatan Pemancar SHF		
1.3.2.20.06	Peralatan Antena MF/MW		
1.3.2.20.07	Peralatan Antena HF/SW		
1.3.2.20.08	Peralatan Antena VHF/FM		
1.3.2.20.09	Peralatan Antena UHF		
1.3.2.20.10	Peralatan Antena SHF/Parabola		
1.3.2.20.11	Peralatan Translator VHF/VHF		
1.3.2.20.12	Peralatan Translator UHF/UHF		
1.3.2.20.13	Peralatan Translator VHF/UHF		
1.3.2.20.14	Peralatan Translator UHF/VHF		
1.3.2.20.15	Peralatan Microvawe FPU		
1.3.2.20.16	Peralatan Microvawe Terrestrial		
1.3.2.20.17	Peralatan Microvawe TVRO		
1.3.2.20.18	Peralatan Dummy Load		
1.3.2.20.19	Switcher Antena		
1.3.2.20.20	Switcher/Menara Antena		
1.3.2.20.21	Feeder		
1.3.2.20.22	Humidity Control		
1.3.2.20.23	Program Input Equipment		
1.3.2.20.24	Peralatan Antena Penerima VHF		
1.3.2.21	Alat Kedokteran		
1.3.2.21.01	Alat Kedokteran Umum		
1.3.2.21.02	Alat Kedokteran Gigi		
1.3.2.21.03	Alat Kedokteran Keluarga Berencana		
1.3.2.21.04	Alat Kedokteran Mata		
1.3.2.21.05	Alat Kedokteran T.H.T		
1.3.2.21.06	Alat Rotgen		
1.3.2.21.07	Alat Farmasi		
1.3.2.21.08	Alat Kedokteran Bedah		
1.3.2.21.09	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
1.3.2.21.10	Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam		
1.3.2.21.11	Alat Kedokteran Mortuary		
1.3.2.21.12	Alat Kesehatan Anak		
1.3.2.21.13	Alat Kedokteran Poliklinik Set		
1.3.2.21.14	Alat Kedokteran Penderita Cacat Tubuh		
1.3.2.21.15	Alat Kedokteran Neurologi (syaraf)		
1.3.2.21.16	Alat Kedokteran Jantung		
1.3.2.21.17	Alat Kedokteran Nuklir		
1.3.2.21.18	Alat Kedokteran Radiologi		
1.3.2.21.19	Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin		
1.3.2.21.20	Alat Kedokteran Gawat Darurat		
1.3.2.21.21	Alat Kedokteran Jiwa		
1.3.2.21.22	Alat Kedokteran Hewan		
1.3.2.22	Alat Kesehatan		
1.3.2.22.01	Alat Kesehatan Perawatan		
1.3.2.22.02	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis		
1.3.2.22.03	Alat Kesehatan Matra Laut		
1.3.2.22.04	Alat Kesehatan Matra Udara		
1.3.2.22.05	Alat Kesehatan Kedokteran Kepolisian		
1.3.2.22.06	Alat Kesehatan Olahraga		
1.3.2.23	Alat Unit-Unit Laboratorium		
1.3.2.23.01	Alat Laboratorium Kimia Air		
1.3.2.23.02	Alat Laboratorium Microbiologi		
1.3.2.23.03	Alat Laboratorium Hidro Kimia		
1.3.2.23.04	Alat Laboratorium Model/Hidrolika		
1.3.2.23.05	Alat laboratorium Buatan/Geologi		
1.3.2.23.06	Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi		
1.3.2.23.07	Alat Laboratorium Aspal Cat & Kimia		
1.3.2.23.08	Alat Laboratorium Mekanik Tanah dan Batuan		
1.3.2.23.09	Alat Laboratorium Cocok Tanam		
1.3.2.23.10	Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik		
1.3.2.23.11	Alat Laboratorium Logam, Mesin Listrik A		
1.3.2.23.12	Alat Laboratorium Umum		
1.3.2.23.13	Alat Laboratorium Umum A		
1.3.2.23.14	Alat Laboratorium Kedokteran		
1.3.2.23.15	Alat Laboratorium Microbiologi		
1.3.2.23.16	Alat Laboratorium Kimia		
1.3.2.23.17	Alat Laboratorium Microbiologi A		
1.3.2.23.18	Alat Laboratorium Patologi		
1.3.2.23.19	Alat Laboratorium Immunologi		
1.3.2.23.20	Alat Laboratorium Hematologi		
1.3.2.23.21	Alat Laboratorium Film		
1.3.2.23.22	Alat Laboratorium Makanan		
1.3.2.23.23	Alat Laboratorium Standarisasi, Kalibrasi dan Instrumentasi		
1.3.2.23.24	Alat Laboratorium Farmasi		
1.3.2.23.25	Alat Laboratorium Fisika		
1.3.2.23.26	Alat Laboratorium Hidrodinamika		
1.3.2.23.27	Alat Laboratorium Klimatologi		
1.3.2.23.28	Alat Laboratorium Proses Peleburan		
1.3.2.23.29	Alat Laboratorium Pasir		
1.3.2.23.30	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan		
1.3.2.23.31	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pola		
1.3.2.23.32	Alat Laboratorium Metalography		
1.3.2.23.33	Alat Laboratorium Proses Pengelasan		
1.3.2.23.34	Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan		
1.3.2.23.35	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam		
1.3.2.23.36	Alat Laboratorium Matrologie		
1.3.2.23.37	Alat Laboratorium Proses Pelapisan Logam		
1.3.2.23.38	Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas		
1.3.2.23.39	Alat Laboratorium Proses Teknologi Textil		
1.3.2.23.40	Alat Laboratorium Uji Tekstel		
1.3.2.23.41	Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik		
1.3.2.23.42	Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit Karet		
1.3.2.23.43	Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik		
1.3.2.23.44	Alat Laboratorium Uji Keramik		
1.3.2.23.45	Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa		
1.3.2.23.46	Alat Laboratorium Pertanian		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
1.3.2.23.47	Alat Laboratorium Pertanian A		
1.3.2.23.48	Alat Laboratorium Pertanian B		
1.3.2.23.49	Alat Laboratorium Elektronika dan Daya		
1.3.2.23.50	Alat Laboratorium Energi Surya		
1.3.2.23.51	Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas		
1.3.2.23.52	Alat Laboratorium Oceanografi		
1.3.2.23.53	Alat Laboratorium Lingkungan Perairan		
1.3.2.23.54	Alat Laboratorium Biologi Peralatan		
1.3.2.23.55	Alat Laboratorium Biologi		
1.3.2.23.56	Alat Laboratorium Geofisika		
1.3.2.23.57	Alat Laboratorium Tambang		
1.3.2.23.58	Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia		
1.3.2.23.59	Alat Laboratorium Proses Industri		
1.3.2.23.60	Alat Laboratorium Kesehatan Kerja		
1.3.2.23.61	Laboratorium Kearsipan		
1.3.2.23.62	Laboratorium Hematologi & Urinalisis		
1.3.2.23.63	Alat Laboratorium Lainnya		
1.3.2.23.64	Laboratorium Hematologi & Urinalisis A		
1.3.2.24	Alat Peraga/Praktek Sekolah		
1.3.2.24.01	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Bahasa Indonesia		
1.3.2.24.02	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Matematika		
1.3.2.24.03	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Dasar		
1.3.2.24.04	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Lanjutan		
1.3.2.24.05	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Menengah		
1.3.2.24.06	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Atas		
1.3.2.24.07	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPS		
1.3.2.24.08	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Agama Islam		
1.3.2.24.09	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Ketrampilan		
1.3.2.24.10	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Kesenian		
1.3.2.24.11	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Olah Raga		
1.3.2.24.12	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : PMP		
1.3.2.24.13	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain		
1.3.2.25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir		
1.3.2.25.01	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Analytical Instrument		
1.3.2.25.02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Instrument Probe/Sensor		
1.3.2.25.03	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir General Laboratory Tool		
1.3.2.25.04	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Instrument Probe/Sensor A		
1.3.2.25.05	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Glassware Plastic/Utensils		
1.3.2.25.06	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Laboratory Safety Equipment		
1.3.2.26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika		
1.3.2.26.01	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Radiation Detector		
1.3.2.26.02	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Modular Counting and Scientific		
1.3.2.26.03	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Assembly/Accounting System		
1.3.2.26.04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Recorder Display		
1.3.2.26.05	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika System/Power Supply		
1.3.2.26.06	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Measuring / Testing Device		
1.3.2.26.07	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Opto Electronics		
1.3.2.26.08	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Accelator		
1.3.2.26.09	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Reactor Experimental System		
1.3.2.27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan		
1.3.2.27.01	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan Alat Ukur Fisika Kesehatan		
1.3.2.27.02	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan Alat Kesehatan Kerja		
1.3.2.27.03	Proteksi Lingkungan		
1.3.2.27.04	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan Meteorological Equipment		
1.3.2.27.05	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan Sumber Radiasi		
1.3.2.28	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)		
1.3.2.28.01	Radiation Application Equipment		
1.3.2.28.02	Non Destructive Test (NDT) Device		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
1.3.2.28.03	Peralatan Umum Kedokteran /Klinik Nuklir		
1.3.2.28.04	Peralatan Hidrologi		
1.3.2.29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup		
1.3.2.29.01	Alat laboratorium Kualitas Air dan Tanah		
1.3.2.29.02	Alat Laboratorium Kualitas Udara		
1.3.2.29.03	Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran		
1.3.2.29.04	Laboratorium Lingkungan		
1.3.2.29.05	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Penunjang		
1.3.2.30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika		
1.3.2.30.01	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Towing Carriage		
1.3.2.30.02	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Wave Generator and Absorber		
1.3.2.30.03	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Data Acquisition and Analyzing System		
1.3.2.30.04	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Cavitation Tunnel		
1.3.2.30.05	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Overhead Cranes		
1.3.2.30.06	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Peralatan umum		
1.3.2.30.07	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Model Ship Workshop		
1.3.2.30.08	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Propeller Model Workshop		
1.3.2.30.09	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Mechanical Workshop		
1.3.2.30.10	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Precision Mechanical Workshop		
1.3.2.30.11	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan Painting Shop		
1.3.2.30.12	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Ship Model Preparation Shop		
1.3.2.30.13	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Electrical Workshop		
1.3.2.30.14	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika MOB		
1.3.2.30.15	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Photo and Film Equipment		
1.3.2.31	Senjata Api		
1.3.2.31.01	Senjata Genggam		
1.3.2.31.02	Senjata Pinggang		
1.3.2.31.03	Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang		
1.3.2.31.04	Senapan Mesin		
1.3.2.31.05	Senjata Api Mortir		
1.3.2.31.06	Senjata Api Anti Lapis Baja		
1.3.2.31.07	Senjata Api Artileri Medan (Armed)		
1.3.2.31.08	Senjata Api Artileri Pertahanan Udara (Arhanud)		
1.3.2.31.09	Senjata Api Peluru Kendali/Rudal		
1.3.2.31.10	Senjata Api Kavaleri		
1.3.2.31.11	Senjata Lain-lain		
1.3.2.32	Persenjataan Non Senjata Api		
1.3.2.32.01	Alat Keamanan		
1.3.2.32.02	Non Senjata Api		
1.3.2.33	Amunisi		
1.3.2.33.01	Amunisi Umum		
1.3.2.33.02	Amunisi Darat		
1.3.2.34	Senjata Sinar		
1.3.2.34.01	Senjata Sinar Laser		
1.3.2.35	Alat Keamanan dan Perlindungan		
1.3.2.35.01	Alat Bantu Kemanan		
1.3.2.35.02	Alat Perlindungan		
1.3.2.35.03	CCTV		
1.3.3	Gedung dan Bangunan	D	
1.3.3.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja		
1.3.3.01.01	Bangunan Gedung Kantor		
1.3.3.01.02	Bangunan Gudang		
1.3.3.01.03	Bangunan Gudang Untuk Bengkel		
1.3.3.01.04	Bangunan Gedung Instalasi		
1.3.3.01.05	Bangunan Gedung Laboratorium		
1.3.3.01.06	Bangunan Kesehatan		
1.3.3.01.07	Bangunan Oceanarium/Opsevatorium		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
1.3.3.01.08	Bangunan Gedung Tempat Ibadah		
1.3.3.01.09	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		
1.3.3.01.10	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan		
1.3.3.01.11	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga		
1.3.3.01.12	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar		
1.3.3.01.13	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga		
1.3.3.01.14	Bangunan Gedung Garasi/Pool		
1.3.3.01.15	Bangunan Gedung Pemotongan Hewan		
1.3.3.01.16	Bangunan Gedung Pabrik		
1.3.3.01.17	Bangunan Stasiun Bus		
1.3.3.01.18	Bangunan Kandang Hewan/Ternak		
1.3.3.01.19	Bangunan Gedung Perpustakaan		
1.3.3.01.20	Bangunan Gedung Museum		
1.3.3.01.21	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar		
1.3.3.01.22	Bangunan Pengujian Kelaikan		
1.3.3.01.23	Bangunan Lembaga Pemasyarakatan		
1.3.3.01.24	Bangunan Rumah Tahanan		
1.3.3.01.25	Bangunan Gedung Kramatorium		
1.3.3.01.26	Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan		
1.3.3.01.27	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		
1.3.3.01.28	Teralis Kantor		
1.3.3.01.29	Bangunan Water Close		
1.3.3.01.30	Bangunan Papan Nama Dinas		
1.3.3.01.31	Pemasangan Paving Blok Kantor		
1.3.3.01.32	Lantai Jemur Lumbung Pangan		
1.3.3.01.33	Tempat/Lahan Parkir Kantor		
1.3.3.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal		
1.3.3.02.01	Rumah Negara Golongan I		
1.3.3.02.02	Rumah Negara Golongan II		
1.3.3.02.03	Rumah Negara Golongan III		
1.3.3.02.04	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan		
1.3.3.02.05	Asrama		
1.3.3.02.06	Hotel		
1.3.3.02.07	Motel		
1.3.3.02.08	Flat/Rumah Susun		
1.3.3.03	Bangunan Menara		
1.3.3.03.01	Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai		
1.3.3.03.02	Bangunan Perambut Penerangan Pantai		
1.3.3.03.03	Bangunan Menara Telekomunikasi		
1.3.3.04	Bangunan Bersejarah		
1.3.3.04.01	Istana Peringatan		
1.3.3.04.02	Rumah Adat		
1.3.3.04.03	Rumah Peninggalan Sejarah		
1.3.3.04.04	Makam Sejarah		
1.3.3.04.05	Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah		
1.3.3.05	Tugu Peringatan		
1.3.3.05.01	Tugu Kemerdekaan		
1.3.3.05.02	Tugu Pembangunan		
1.3.3.05.03	Tugu Peringatan Lainnya		
1.3.3.06	Candi		
1.3.3.06.01	Candi Hindhu		
1.3.3.06.02	Candi Budha		
1.3.3.06.03	Candi Lainnya		
1.3.3.07	Monomen/Bangunan Bersejarah		
1.3.3.07.01	Bangunan Bersejarah Lainnya		
1.3.3.08	Tugu Peringatan Lain		
1.3.3.08.01	Tugu Peringatan		
1.3.3.09	Tugu Titik Kontrol/Pasti		
1.3.3.09.01	Tugu/ Tanda Batas		
1.3.3.09.02	Tugu/ Tanda Batas		
1.3.3.10	Rambu-Rambu		
1.3.3.10.01	Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat		
1.3.3.10.02	Rambu Tidak Bersuar		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
1.3.3.11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	D	
1.3.3.11.01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Runway/Threshold Light		
1.3.3.11.02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Visual Approach Slope Indicator (VASI)		
1.3.3.11.03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Approach Light		
1.3.3.11.04	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Runway Identification Light(Rells)		
1.3.3.11.05			
1.3.3.11.06	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Signal		
1.3.3.12	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Flood Light		
1.3.3.12.01	Penerangan		
1.3.3.12.02	Penerangan Jalan Umum		
1.3.4	Penerangan Taman		
1.3.4.01	Jalan, Jaringan dan Instalasi		
1.3.4.01.01	Jalan		
1.3.4.01.02	Jalan Negara/Nasional		
1.3.4.01.03	Jalan Propinsi		
1.3.4.01.04	Jalan Kabupaten/Kota		
1.3.4.01.05	Jalan Desa		
1.3.4.01.06	Jalan Khusus		
1.3.4.01.07	Jalan Tol		
1.3.4.01.08	Jalan Kereta		
1.3.4.02	Landasan Pacu Pesawat Terbang		
1.3.4.02.01	Jembatan		
1.3.4.02.02	Jembatan Negara/Nasional		
1.3.4.02.03	Jembatan Propinsi		
1.3.4.02.04	Jembatan Kabupaten/Kota		
1.3.4.02.05	Jembatan Desa		
1.3.4.02.06	Jembatan Khusus		
1.3.4.02.07	Jembatan Pada Jalan Tol		
1.3.4.02.08	Jembatan Pada Jalan Kereta Api		
1.3.4.02.09	Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang		
1.3.4.03	Jembatan Penyeberangan		
1.3.4.03.01	Bangunan Air Irigasi		
1.3.4.03.02	Bangunan Waduk Irigasi		
1.3.4.03.03	Bangunan Pengambilan Irigasi		
1.3.4.03.04	Bangunan Pembawa Irigasi		
1.3.4.03.05	Bangunan Pembuang Irigasi		
1.3.4.03.06	Bangunan Pengaman Irigasi		
1.3.4.04	Bangunan Pelengkap Irigasi		
1.3.4.04.01	Bangunan Air Pasang Surut		
1.3.4.04.02	Bangunan Waduk Pasang Surut		
1.3.4.04.03	Bangunan Pengambilan Pasang Surut		
1.3.4.04.04	Bangunan Pembawa Pasang Surut		
1.3.4.04.05	Bangunan Pembuang Pasang Surut		
1.3.4.04.06	Bangunan Pengaman Pasang Surut		
1.3.4.04.07	Bangunan Pelengkap Pasang Surut		
1.3.4.05	Bangunan Sawah Pasang Surut		
1.3.4.05.01	Bangunan Air Rawa		
1.3.4.05.02	Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder		
1.3.4.05.03	Bangunan Pengembalian Pasang Rawa		
1.3.4.05.04	Bangunan Pembawa Pasang Rawa		
1.3.4.05.05	Bangunan Pembuang Pasang Rawa		
1.3.4.05.06	Bangunan Pengamanan Pasang Surut		
1.3.4.05.07	Bangunan Pelengkap Pasang Rawa		
1.3.4.06	Bangunan Sawah Pengembangan Rawa		
1.3.4.06.01	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam		
1.3.4.06.02	Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai		
1.3.4.06.03	Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai		
1.3.4.06.04	Bangunan Pembuang Pengaman		
1.3.4.06.05	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai		
1.3.4.06.06	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai		
1.3.4.07	Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai		
1.3.4.07.01	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah		
	Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
1.3.4.07.02	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air		
1.3.4.07.03	Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air		
1.3.4.07.04	Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air		
1.3.4.07.05	Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air		
1.3.4.07.06	Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air		
1.3.4.08	Bangunan Air Bersih/Baku		
1.3.4.08.01	Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku		
1.3.4.08.02	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku		
1.3.4.08.03	Bangunan Pembawa Air Bersih		
1.3.4.08.04	Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku		
1.3.4.08.05	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku		
1.3.4.09	Bangunan Air Kotor		
1.3.4.09.01	Bangunan Pembawa Air Kotor		
1.3.4.09.02	Bangunan Waduk Air Kotor		
1.3.4.09.03	Bangunan Pembuangan Air Kotor		
1.3.4.09.04	Bangunan Pengaman Air Kotor		
1.3.4.09.05	Bangunan Pelengkap Air Kotor		
1.3.4.10	Bangunan Air		
1.3.4.10.01	Bangunan Air Laut		
1.3.4.10.02	Bangunan Air Tawar		
1.3.4.11	Instalasi Air Minum/Air Bersih		
1.3.4.11.01	Instalasi Air Muka Tanah		
1.3.4.11.02	Instalasi Air Sumber /Mata Air		
1.3.4.11.03	Instalasi Air Tanah Dalam		
1.3.4.11.04	Instalasi Air Tanah Dangkal		
1.3.4.11.05	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya		
1.3.4.12	Instalasi Air Kotor		
1.3.4.12.01	Instalasi Air Kotor		
1.3.4.12.02	Instalasi Air Buangan Industri		
1.3.4.12.03	Instalasi Air Buangan Pertanian		
1.3.4.13	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik		
1.3.4.13.01	Instalasi Pengolahan Sampah Organik		
1.3.4.13.02	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik		
1.3.4.14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan		
1.3.4.14.01	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan		
1.3.4.15	Instalasi Pembangkit Listrik		
1.3.4.15.01	Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)		
1.3.4.15.02	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)		
1.3.4.15.03	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro (Hidro)		
1.3.4.15.04	Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)		
1.3.4.15.05	Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)		
1.3.4.15.06	Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)		
1.3.4.15.07	Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)		
1.3.4.15.08	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)		
1.3.4.15.09	Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)		
1.3.4.15.10	Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)		
1.3.4.15.11	Pembangkit Listrik Tenaga Samudra/Gelombang Samudra (PLTSm)		
1.3.4.16	Instalasi Gardu Listrik		
1.3.4.16.01	Instalasi Gardu Listrik Induk		
1.3.4.16.02	Instalasi Gardu Listrik Distribusi		
1.3.4.16.03	Instalasi Pusat Pengatur Listrik		
1.3.4.17	Instalasi Pertahanan		
1.3.4.17.01	Instalasi Pertahanan Di Darat		
1.3.4.18	Instalasi Gas		
1.3.4.18.01	Instalasi Gardu Gas		
1.3.4.18.02	Instalasi Jaringan Pipa Gas		
1.3.4.19	Instalasi Pengaman		
1.3.4.19.01	Instalasi Pengaman Penangkal Petir		
1.3.4.20	Jaringan Air Minum		
1.3.4.20.01	Jaringan Pembawa		
1.3.4.20.02	Jaringan Induk Distribusi		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
1.3.4.20.03	Jaringan Cabang Distribusi	D	
1.3.4.20.04	Jaringan Sambungan ke rumah		
1.3.4.21	Jaringan Listrik		
1.3.4.21.01	Jaringan Transmisi		
1.3.4.21.02	Jaringan Distribusi		
1.3.4.22	Jaringan Telepon		
1.3.4.22.01	Jaringan Telepon Di atas Tanah		
1.3.4.22.02	Jaringan Telepon Di bawah Tanah		
1.3.4.22.03	Jaringan Telepon Didalam Air		
1.3.4.23	Jaringan Gas		
1.3.4.23.01	Jaringan Pipa Gas Transmisi		
1.3.4.23.02	Jaringan Pipa Distribusi		
1.3.4.23.03	Jaringan Pipa Dinas		
1.3.4.23.04	Jaringan BBM		
1.3.5	Aset Tetap Lainnya		
1.3.5.01	Buku dan Perpustakaan		
1.3.5.01.01	Buku Umum		
1.3.5.01.02	Buku Filsafat		
1.3.5.01.03	Buku Agama		
1.3.5.01.04	Buku Ilmu Sosial		
1.3.5.01.05	Buku Ilmu Bahasa		
1.3.5.01.06	Buku Matematika & Pengetahuan alam		
1.3.5.01.07	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis		
1.3.5.01.08	Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga		
1.3.5.01.09	Buku Geografi, Biografi, Sejarah		
1.3.5.01.10	Terbitan Berkala		
1.3.5.01.11	Terbitan Buku Laporan		
1.3.5.01.12	Barang-Barang Perpustakaan Peta		
1.3.5.01.13	Barang-Barang Perpustakaan Naskah (Manuskrip)		
1.3.5.01.14	Barang-Barang Perpustakaan Musik		
1.3.5.01.15	Barang-Barang Perpustakaan Karya Grafika (Graphic Material)		
1.3.5.01.16	Barang-Barang Perpustakaan Three Dimensional Artetacs and Realita		
1.3.5.01.17	Barang-Barang Perpustakaan Bentuk Micro (Microform)		
1.3.5.01.18	Barang-Barang Perpustakaan Rekaman Suara Sound Recording		
1.3.5.01.19	Barang-Barang Perpustakaan Berkas Komputer (Computer Files)		
1.3.5.01.20	Barang-Barang Perpustakaan Film Bergerak dan Rekaman Video		
1.3.5.01.21	Barang-Barang Perpustakaan Tarscalt		
1.3.5.02	Barang Bercorak Kebudayaan		
1.3.5.02.01	Barang Bercorak Kebudayaan-Pahatan		
1.3.5.02.02	Barang Bercorak Kebudayaan-Lukisan		
1.3.5.02.03	Barang Bercorak Kebudayaan-Alat Kesenian		
1.3.5.02.04	Barang Bercorak Kebudayaan-Alat Olah Raga		
1.3.5.02.05	Barang Bercorak Kebudayaan-Tanda Penghargaan		
1.3.5.02.06	Barang Bercorak Kebudayaan-Maket dan Foto Dokumen		
1.3.5.02.07	Barang Bercorak Kebudayaan-Benda-benda Bersejarah		
1.3.5.02.08	Barang Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan		
1.3.5.03	Hewan dan Ternak serta Tanaman		
1.3.5.03.01	Binatang Ternak		
1.3.5.03.02	Binatang Unggas		
1.3.5.03.03	Binatang Melata		
1.3.5.03.04	Binatang Ikan		
1.3.5.03.05	Hewan Kebun Binatang		
1.3.5.03.06	Hewan Pengamanan		
1.3.5.03.07	Tanaman Perkebunan		
1.3.5.03.08	Tanaman Holtikultura		
1.3.5.03.09	Tanaman Kehutanan		
1.3.5.03.10	Tanaman Hias		
1.3.5.03.11	Tanaman Obat dan Kosmetika		
1.3.5.04	Alat Olah Raga Lainnya		
1.3.5.04.01	Alat Olah Raga Lainnya-Senam		
1.3.5.04.02	Alat Olah Raga Air		
1.3.5.04.03	Alat Olah Raga Udara		
1.3.5.04.04	Alat Olah Raga Lainnya		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
1.3.5.05	Aset Tetap Renovasi		
1.3.5.05.01	Aset Tetap Renovasi		
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan		
1.3.6.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	D	
1.3.6.01.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan		
1.3.7	Akumulasi Penyusutan		
1.3.7.01	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	D	
1.3.7.01.01	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		
1.4	DANA CADANGAN		
1.4.1	Dana Cadangan		
1.4.1.01	Dana Cadangan	D	
1.4.1.01.01	Dana Cadangan		
1.5	ASET LAINNYA		
1.5.1	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran		
1.5.1.01	Tagihan Penjualan Angsuran/Cicilan Kendaraan Bermotor	D	
1.5.1.01.01	Tagihan Penjualan Angsuran Cicilan Kendaraan Bermotor		
1.5.1.02	Tagihan Penjualan Angsuran/Cicilan Rumah		
1.5.1.02.01	Tagihan Penjualan Angsuran Cicilan Rumah		
1.5.2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		
1.5.2.01	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	D	
1.5.2.01.01	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		
1.5.3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
1.5.3.01	Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT)	D	
1.5.3.01.01	Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT)		
1.5.3.02	Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO)		
1.5.3.02.01	Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO)		
1.5.3.03	Kerjasama Operasi (KSO)		
1.5.3.03.01	Kerjasama Operasi (KSO)		
1.5.4	Aset Tidak Berwujud		
1.5.4.01	Aset Tidak Berwujud	D	
1.5.4.01.01	Aset Tidak Berwujud		
1.5.5	Aset Lain-lain		
1.5.5.01	Aset Lain-lain	D	
1.5.5.01.01	Aset Lain-lain		
2	KEWAJIBAN		
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
2.1.1.01	Utang Taspen	K	
2.1.1.01.01	Utang Taspen		
2.1.1.02	Utang Askes		
2.1.1.02.01	Utang Askes		
2.1.1.03	Utang PPh Pusat		
2.1.1.03.01	Utang PPh Ps 21		
2.1.1.03.02	Utang PPh Ps 22		
2.1.1.03.03	Utang PPh Ps 23		
2.1.1.03.04	Utang PPh Ps 25		
2.1.1.03.05	Utang PPh Ps 4		
2.1.1.03.06	Utang PPh Ps 15		
2.1.1.03.07	Utang PPh Ps 26		
2.1.1.03.08	Utang PPh Ps 21 Tunjangan Perumahan dan TKI		
2.1.1.04	Utang PPN Pusat		
2.1.1.04.01	Utang PPN Pusat		
2.1.1.05	Utang Taperum		
2.1.1.05.01	Utang Taperum		
2.1.1.06	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
2.1.1.06.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya		
2.1.1.06.02	Utang Sewa Rumah		
2.1.1.06.03	Utang Beras (Bulog)		
2.1.1.07	Utang Iuran Wajib Pegawai		
2.1.1.07.01	Utang IWP		
2.1.1.08	Utang LHP BPK-RI		
2.1.1.08.01	Utang LHP BPK-RI		
2.1.1.09	Utang Potongan Tim PHO		
2.1.1.09.01	Utang Potongan Tim PHO		
2.1.1.10	Utang LHP Inspektorat		
2.1.1.10.01	Utang LHP Inspektorat		
2.1.1.11	Utang PFK - JKM		
2.1.1.11.01	Utang PFK - JKM		
2.1.1.12	Utang PFK - JKK		
2.1.1.12.01	Utang PFK - JKK		
2.1.1.13	Utang Potongan Denda Keterlambatan		
2.1.1.13.01	Utang Potongan Denda Keterlambatan		
2.1.2	Utang Bunga	K	
2.1.2.01	Utang Bunga Kepada Pemerintah Pusat		
2.1.2.01.01	Utang Bunga Kepada Pemerintah Pusat		
2.1.2.02	Utang Bunga Kepada Daerah Otonom Lainnya		
2.1.2.02.01	Utang Bunga Kepada Daerah Otonom Lainnya		
2.1.2.03	Utang Bunga Kepada BUMN/BUMD		
2.1.2.03.01	Utang Bunga Kepada BUMN		
2.1.2.03.02	Utang Bunga Kepada BUMD		
2.1.2.04	Utang Bunga Kepada Bank/Lembaga Keuangan		
2.1.2.04.01	Utang Bunga Kepada Bank		
2.1.2.04.02	Utang Bunga Kepada Lembaga Keuangan		
2.1.2.05	Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya		
2.1.2.05.01	Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya		
2.1.2.06	Utang Bunga Luar Negeri		
2.1.2.06.01	Utang Bunga Luar Negeri		
2.1.3	Utang Pajak	K	
2.1.3.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21		
2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21		
2.1.3.02	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22		
2.1.3.02.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22		
2.1.3.03	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai		
2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai		
2.1.4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	K	
2.1.4.01	Utang Bank		
2.1.4.01.01	Utang Bank		
2.1.4.02	Utang Obligasi		
2.1.4.02.01	Utang Obligasi		
2.1.4.03	Utang Pemerintah Pusat		
2.1.4.03.01	Utang Pemerintah Pusat		
2.1.4.04	Utang Pemerintah Provinsi		
2.1.4.04.01	Utang Pemerintah Provinsi		
2.1.4.05	Utang Pemerintah Kabupaten/Kota		
2.1.4.05.01	Utang Pemerintah Kabupaten		
2.1.4.05.02	Utang Pemerintah Kota		
2.1.5	Pendapatan Diterima Dimuka	K	
2.1.5.01	Setoran Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak III		
2.1.5.01.01	Setoran Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak III		
2.1.5.02	Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III		
2.1.5.02.01	Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
2.1.5.03	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah		
2.1.5.03.01	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah		
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	K	
2.1.6.01	Utang Jangka Pendek Lainnya		
2.1.6.01.01	Utang Jangka Pendek Lainnya		
2.1.8	R/K Pusat	K	
2.1.8.01	R/K Pusat		
2.1.8.01.01	R/K Pusat		
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
2.2.1	Utang Dalam Negeri	K	
2.2.1.01	Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan		
2.2.1.01.01	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan		
2.2.1.02	Utang Dalam Negeri-Obligasi		
2.2.1.02.01	Utang Dalam Negeri - Obligasi		
2.2.1.03	Utang Pemerintah Pusat		
2.2.1.03.01	Utang Pemerintah Pusat		
2.2.1.04	Utang Pemerintah Provinsi		
2.2.1.04.01	Utang Pemerintah Provinsi		
2.2.1.05	Utang Pemerintah Kabupaten/Kota		
2.2.1.05.01	Utang Pemerintah Kabupaten/Kota		
2.2.2	Utang Luar Negeri	K	
2.2.2.01	Utang Luar Negeri-Sektor Perbankan		
2.2.2.01.01	Utang Luar Negeri - Sektor Perbankan		
3	EKUITAS DANA		
3.1	EKUITAS DANA LANCAR		
3.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	K	
3.1.1.01	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		
3.1.1.01.01	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		
3.1.2	Cadangan untuk Piutang	K	
3.1.2.01	Cadangan Untuk Piutang		
3.1.2.01.01	Cadangan Piutang		
3.1.3	Cadangan untuk Persediaan	K	
3.1.3.01	Cadangan Untuk Persediaan		
3.1.3.01.01	Cadangan Persediaan		
3.1.4	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	K	
3.1.4.01	Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek		
3.1.4.01.01	Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek		
3.1.5	Pendapatan yang Ditangguhkan	K	
3.2	EKUITAS DANA INVESTASI		
3.2.1	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	K	
3.2.1.01	Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang		
3.2.1.01.01	Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang		
3.2.2	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	K	
3.2.2.01	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap		
3.2.2.01.01	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap		
3.2.3	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak termasuk Dana Cadangan)	K	
3.2.3.01	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya (Tidak Termasuk Dana Cadangan)		
3.2.3.01.01	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya (Tidak Termasuk Dana Cadangan)		
3.2.4	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang Jangka Panjang	K	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
3.2.4.01	Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang		
3.2.4.01.01	Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang		
3.3	EKUITAS DANA CADANGAN		
3.3.1	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	K	
3.3.1.01	Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan		
3.3.1.01.01	Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan		
3.4	KOREKSI EKUITAS		
3.4.1	Koreksi Ekuitas	K	
3.4.1.01	KOREKSI EKUITAS		
3.4.1.01.01	Koreksi Nilai Persediaan		
3.4.1.01.02	Selisih Revaluasi Aset Tetap		
3.4.1.01.03	Lain-lain		
4	PENDAPATAN		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH		
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	K	
4.1.1.01	Pajak Hotel		
4.1.1.01.01	Hotel Bintang Lima Berlian		PERDA NO. 03 TAHUN 2011
4.1.1.01.02	Hotel Bintang Lima		
4.1.1.01.03	Hotel Bintang Empat		
4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga		
4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua		
4.1.1.01.06	Hotel Bintang Satu		
4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga		
4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua		
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu		PERDA NO. 03 TAHUN 2011
4.1.1.01.10	Motel		
4.1.1.01.11	Pajak Hotel / Cottage		
4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos		
4.1.1.01.13	Wisma Pariwisata		
4.1.1.01.14	Rumah Penginapan dan Sejenisnya		
4.1.1.01.15	Gubuk Pariwisata		
4.1.1.01.16	Pesanggrahan		
4.1.1.01.17	Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)		
4.1.1.02	Pajak Restoran		
4.1.1.02.01	Restoran		PERDA NO. 04 TAHUN 2011
4.1.1.02.02	Rumah Makan		
4.1.1.02.03	Café		
4.1.1.02.04	Kantin		
4.1.1.02.05	Katering		
4.1.1.02.06	Warung		
4.1.1.02.07	Bar		
4.1.1.03	Pajak Hiburan		
4.1.1.03.01	Tontonan Film/Bioskop		
4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana		
4.1.1.03.03	Kontes Kecantikan		
4.1.1.03.04	Kontes Binaraga		
4.1.1.03.05	Pameran		
4.1.1.03.06	Diskotik		
4.1.1.03.07	Karaoke		
4.1.1.03.08	Klub Malam		
4.1.1.03.09	Sirkus/Akrobat/Sulap		
4.1.1.03.10	Permainan Biliar		
4.1.1.03.11	Permainan Golf		
4.1.1.03.12	Permainan Bowling		
4.1.1.03.13	Pacuan Kuda		
4.1.1.03.14	Balap Kendaraan Bermotor		
4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan		
4.1.1.03.16	Panti Pijat/Refleksi		
4.1.1.03.17	Mandi Uap/Spa		
4.1.1.03.18	Pusat Kebugaran		
4.1.1.03.19	Pajak Hiburan		PERDA NO. 15 TAHUN 2012
4.1.1.04	Pajak Reklame		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron		PERDA NO. 11 TAHUN 2011
4.1.1.04.02	Reklame Kain		
4.1.1.04.03	Reklame Melekat/Stiker		
4.1.1.04.04	Reklame Selebaran		
4.1.1.04.05	Reklame Berjalan		
4.1.1.04.06	Reklame Udara		
4.1.1.04.07	Reklame Apung		
4.1.1.04.08	Reklame Suara		
4.1.1.04.09	Reklame Film/Slide		
4.1.1.04.10	Reklame Peragaan		
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan		PERDA NO. 12 TAHUN 2011
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan		
4.1.1.05.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain		
4.1.1.06	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		PERDA NO. 13 TAHUN 2011
4.1.1.06.01	Asbes		
4.1.1.06.02	Batu Tulis		
4.1.1.06.03	Batu Setengah Permata		
4.1.1.06.04	Batu Kapur		
4.1.1.06.05	Batu Apung		
4.1.1.06.06	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		
4.1.1.06.07	Sirtu		
4.1.1.06.08	Pasir		
4.1.1.06.09	Tanah Timbun		
4.1.1.06.10	Batu Pecah/Kerikil		
4.1.1.06.11	Batu Permata		
4.1.1.06.12	Bentonit		
4.1.1.06.13	Dolomit		
4.1.1.06.14	Feldspar		
4.1.1.06.15	Garam Batu (Halite)		
4.1.1.06.16	Grafit		
4.1.1.06.17	Granit/Andesit		
4.1.1.06.18	Gips		
4.1.1.06.19	Kalsit		
4.1.1.06.20	Kaolin		
4.1.1.06.21	Leusit		
4.1.1.06.22	Magnesit		
4.1.1.06.23	Mika		
4.1.1.06.24	Marmer		
4.1.1.06.25	Nitrat		
4.1.1.06.26	Opsidien		
4.1.1.06.27	Oker		
4.1.1.06.28	Pasir Kuarsa		
4.1.1.06.29	Perlit		
4.1.1.06.30	Phospat		
4.1.1.06.31	Talk		
4.1.1.06.32	Tanah Serap (Fullers earth)		
4.1.1.06.33	Tanah Liat		
4.1.1.06.34	Tawas (Alum)		
4.1.1.06.35	Tras		
4.1.1.06.36	Yarosif		
4.1.1.06.37	Zeolit		
4.1.1.06.38	Basal		
4.1.1.06.39	Trakit		
4.1.1.06.40	Mineral Bukan Logam dan Lainnya		
4.1.1.07	Pajak Parkir		PERDA NO. 02 TAHUN 2011
4.1.1.07.01	Pajak Parkir		
4.1.1.08	Pajak Air Tanah		
4.1.1.08.01	Pajak Air Tanah		
4.1.1.09	Pajak Sarang Burung Walet		
4.1.1.09.01	Pajak Sarang Burung Walet		
4.1.1.10	Pajak Lingkungan		
4.1.1.10.01	Pajak Lingkungan		
4.1.1.11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)		
4.1.1.11.01	PBB Sektor Perkotaan		
4.1.1.11.02	PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan		PERDA NO. 14 TAHUN 2012 PERDA NO. 14 TAHUN 2012

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
4.1.1.12	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	K	PERDA NO. 05 TAHUN 2011
4.1.1.12.01	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		
4.1.1.12.02	BPHTB - Pemberian Hak Baru		
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah		
4.1.2.00	Pendapatan Retribusi Daerah		PERDA NO. 06 TAHUN 2012
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum		
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas		
4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas keliling		
4.1.2.01.03	Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas pembantu		
4.1.2.01.04	Retribusi Pelayanan Kesehatan Balai Pengobatan		
4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah		
4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Kesehatan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki dan/atau Dikelola oleh Pemda		
4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan		PERDA NO. 18 TAHUN 2012
4.1.2.01.08	Retribusi Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/atau Lokasi Pembuangan Sementara ke Lokasi Pembuangan/Pembuangan Akhir Sampah		
4.1.2.01.09	Retribusi Penyediaan Lokasi Pembuangan/Pemusnahan Akhir Sampah		PERDA NO. 05 TAHUN 2012
4.1.2.01.10	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil - KTP		
4.1.2.01.11	Retribusi Penggantian Biaya Kartu Keterangan Bertempat Tinggal		
4.1.2.01.12	Retribusi Penggantian Biaya Kartu Identitas Kerja		
4.1.2.01.13	Retribusi Penggantian Biaya Kartu Penduduk Sementara		
4.1.2.01.14	Retribusi Penggantian Biaya Kartu Identitas Penduduk Musiman		
4.1.2.01.15	Retribusi Penggantian Biaya Kartu Keluarga		
4.1.2.01.16	Retribusi Penggantian Biaya Akta Catatan Sipil		
4.1.2.01.17	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman		
4.1.2.01.18	Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat		
4.1.2.01.19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum		PERDA NO. 06 TAHUN 2011
4.1.2.01.20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran		
4.1.2.01.21	Retribusi Pelayanan Pasar - Los		
4.1.2.01.22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios		
4.1.2.01.23	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Sedan		
4.1.2.01.24	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Jeep		
4.1.2.01.25	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus		
4.1.2.01.26	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus		
4.1.2.01.27	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus		
4.1.2.01.28	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up		
4.1.2.01.29	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck		PERDA NO. 07 TAHUN 2012 PERDA NO. 10 TAHUN 2012
4.1.2.01.30	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck		
4.1.2.01.31	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2		
4.1.2.01.32	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3		
4.1.2.01.33	Retribusi PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air		
4.1.2.01.34	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran		
4.1.2.01.35	Retribusi Alat Penanggulangan Kebakaran		
4.1.2.01.36	Retribusi Alat Penyelamatan Jiwa		
4.1.2.01.37	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Penyediaan Peta Dasar (Garis)		
4.1.2.01.38	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Penyediaan Peta Foto		
4.1.2.01.39	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Penyediaan Peta Digital		PERDA NO. 03 TAHUN 2013
4.1.2.01.40	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Penyediaan Peta Tematik		
4.1.2.01.41	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Penyediaan Peta Teknis (Struktur)		
4.1.2.01.42	Retribusi Pelayanan Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan		
4.1.2.01.43	Retribusi Pelayanan Pendidikan Pelatihan Teknis		
4.1.2.01.44	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi		
4.1.2.01.45	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor		
4.1.2.01.46	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan		
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha		
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan		
4.1.2.02.02	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium		
4.1.2.02.03	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN		
4.1.2.02.04	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	K	PERDA NO. 09 TAHUN 2012		
4.1.2.02.05	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan				
4.1.2.02.06	Retribusi Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan				
4.1.2.02.07	Retribusi Pasar atau Pertokoan yang Disediakan/Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah				
4.1.2.02.08	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan				
4.1.2.02.09	Retribusi Tempat pelelangan Ternak				
4.1.2.02.10	Retribusi Tempat Pelelangan Hasil Bumi				
4.1.2.02.11	Retribusi Tempat Pelelangan Hasil Hutan				
4.1.2.02.12	Retribusi Tempat Jasa Pelelangan serta Fasilitas Lainnya yang Disediakan di Tempat Pelelangan				
4.1.2.02.13	Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum				
4.1.2.02.14	Retribusi Terminal - Tempat Kegiatan Usaha				
4.1.2.02.15	Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal				
4.1.2.02.16	Retribusi Tempat Khusus Parkir				
4.1.2.02.17	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa				
4.1.2.02.18	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong				
4.1.2.02.19	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sesudah Dipotong				
4.1.2.02.20	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan				
4.1.2.02.21	Retribusi Tempat Rekreasi				
4.1.2.02.22	Retribusi Tempat Pariwisata				
4.1.2.02.23	Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga				
4.1.2.02.24	Retribusi Penyebrangan Orang				
4.1.2.02.25	Retribusi Pelayanan Penyebrangan Barang				
4.1.2.02.26	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah				
4.1.2.02.27	Retribusi Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga				
4.1.2.02.28	Retribusi Pengolahan Limbah Cair Perkantoran				
4.1.2.02.29	Retribusi Pengolahan Limbah Cair Industri				
4.1.2.02.30	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus				
4.1.2.02.31	Retribusi Terminal		PERDA NO. 10 TAHUN 2012		
4.1.2.02.32	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Sewa Alat Berat		PERDA NO. 03 TAHUN 2012		
4.1.2.02.33	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Pengelolaan Islamic Center		PERDA NO. 03 TAHUN 2013		
4.1.2.02.34	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Pengelolaan Mess Pemda		PERDA NO. 03 TAHUN 2013		
4.1.2.02.35	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Balai Benih		PERDA NO. 03 TAHUN 2013		
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu		PERDA NO. 14 TAHUN 2011		
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan				
4.1.2.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol				
4.1.2.03.03	Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi				
4.1.2.03.04	Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan				
4.1.2.03.05	Retribusi Pemberian Izin Trayek				
4.1.2.03.06	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan				
4.1.2.03.07	Retribusi Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang Pribadi				
4.1.2.03.08	Retribusi Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Badan				
4.1.2.03.09	Retribusi Penggunaan Ruas Jalan Tertentu				
4.1.2.03.10	Retribusi Penggunaan Koridor Tertentu				
4.1.2.03.11	Retribusi Penggunaan Kawasan Tertentu pada Waktu Tertentu oleh Kendaraan Bermotor Perseorangan dan Barang				
4.1.2.03.12	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LRA		PERDA NO. 08 TAHUN 2012 PERDA NO. 02 TAHUN 2012		
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	K			
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD				
4.1.3.01.01	PT. Bank Perkeriditan Syariah Tanggamus				
4.1.3.01.02	PT. Bank Lampung				
4.1.3.01.03	PT. Aneka Usaha Tanggamus Jaya				
4.1.3.02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN				
4.1.3.02.01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN				
4.1.3.03	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta				
4.1.3.03.01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta				
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			K	
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan				
KODE REKENING					

Printed By SimDa

Halaman 20 dari 58

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
4.1.4.01.01	Pelepasan Hak Atas Tanah		
4.1.4.01.02	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai		
4.1.4.01.03	Penjualan Mesin/Alat-alat Berat Tidak Terpakai		
4.1.4.01.04	Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas		
4.1.4.01.05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua		
4.1.4.01.06	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat		
4.1.4.01.07	Penjualan Drum Bekas		
4.1.4.01.08	Penjualan Hasil Penebangan Pohon		
4.1.4.01.09	Penjualan Lampu Hias Bekas		
4.1.4.01.10	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan		
4.1.4.01.11	Penjualan Perlengkapan Lalu Lintas		
4.1.4.01.12	Penjualan Obat-obatan dan Hasil Farmasi		
4.1.4.01.13	Penjualan Hasil Pertanian		
4.1.4.01.14	Penjualan Hasil Kehutanan		
4.1.4.01.15	Penjualan Hasil Perkebunan		
4.1.4.01.16	Penjualan Hasil Peternakan		
4.1.4.01.17	Penjualan Hasil Perikanan		
4.1.4.01.18	Penjualan Hasil Sitaan		
4.1.4.01.19	Hasil Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan		
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro		
4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah		
4.1.4.02.02	Jasa Giro Pemegang Kas		
4.1.4.02.03	Jasa Giro Dana Cadangan		
4.1.4.03	Penerimaan Bunga Deposito		
4.1.4.03.01	Rekening Deposito Pada Bank		
4.1.4.03.02	Pendapatan Bunga Dana Bergulir		
4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)		
4.1.4.04.01	Kerugian Uang		
4.1.4.04.02	Kerugian Barang		
4.1.4.05	Komisi, Potongan, dan Selisih Nilai Tukar Rupiah		
4.1.4.05.01	Penerimaan Komisi Dari Penempatan Kas Daerah		
4.1.4.05.02	Penerimaan Potongan Dari		
4.1.4.05.03	Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah Dari		
4.1.4.06	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		
4.1.4.06.01	Bidang Pendidikan		
4.1.4.06.02	Bidang Kesehatan		
4.1.4.06.03	Bidang Pekerjaan Umum		
4.1.4.06.04	Bidang Perumahan Rakyat		
4.1.4.06.05	Bidang Penataan Ruang		
4.1.4.06.06	Bidang Perencanaan Pembangunan		
4.1.4.06.07	Bidang Perhubungan		
4.1.4.06.08	Bidang Lingkungan Hidup		
4.1.4.06.09	Bidang Pertanahan		
4.1.4.06.10	Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil		
4.1.4.06.11	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
4.1.4.06.12	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera		
4.1.4.07	Pendapatan Denda Pajak		
4.1.4.07.01	Pendapatan Denda Pajak Hotel		
4.1.4.07.02	Pendapatan Denda Pajak Restoran		
4.1.4.07.03	Pendapatan Denda Pajak Hiburan		
4.1.4.07.04	Pendapatan Denda Pajak Reklame		
4.1.4.07.05	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan		
4.1.4.07.06	Pendapatan Denda Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C		
4.1.4.07.07	Pendapatan Denda Pajak Parkir		
4.1.4.07.08	Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah		
4.1.4.07.09	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet		
4.1.4.07.10	Pendapatan Denda Pajak Lingkungan		
4.1.4.07.11	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		
4.1.4.07.12	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan		
4.1.4.08	Pendapatan Denda Retribusi		
4.1.4.08.01	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan		
4.1.4.08.02	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
4 . 1 . 4 . 08 . 03	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil		
4 . 1 . 4 . 08 . 04	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat		
4 . 1 . 4 . 08 . 05	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum		
4 . 1 . 4 . 08 . 06	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar		
4 . 1 . 4 . 08 . 07	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor		
4 . 1 . 4 . 08 . 08	Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran		
4 . 1 . 4 . 08 . 09	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta		
4 . 1 . 4 . 08 . 10	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus		
4 . 1 . 4 . 08 . 11	Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair		
4 . 1 . 4 . 08 . 12	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang		
4 . 1 . 4 . 08 . 13	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan		
4 . 1 . 4 . 08 . 14	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi		
4 . 1 . 4 . 08 . 15	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		
4 . 1 . 4 . 08 . 16	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan		
4 . 1 . 4 . 08 . 17	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan		
4 . 1 . 4 . 08 . 18	Pendapatan Denda Retribusi Terminal		
4 . 1 . 4 . 08 . 19	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir		
4 . 1 . 4 . 08 . 20	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa		
4 . 1 . 4 . 08 . 21	Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan		
4 . 1 . 4 . 08 . 22	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhan		
4 . 1 . 4 . 08 . 23	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga		
4 . 1 . 4 . 08 . 24	Pendapatan Denda Retribusi Penyebrangan Air		
4 . 1 . 4 . 08 . 25	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah		
4 . 1 . 4 . 08 . 26	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan		
4 . 1 . 4 . 08 . 27	Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol		
4 . 1 . 4 . 08 . 28	Pendapatan Denda Retribusi Izin Gangguan		
4 . 1 . 4 . 08 . 29	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek		
4 . 1 . 4 . 08 . 30	Pendapatan Denda Retribusi Izin Perikanan		
4 . 1 . 4 . 08 . 31	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas		
4 . 1 . 4 . 08 . 32	Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)		
4 . 1 . 4 . 09	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan		
4 . 1 . 4 . 09 . 01	Hasil Eksekusi Jaminan Atas Pelaksanaan Pekerjaan		
4 . 1 . 4 . 09 . 02	Hasil Eksekusi Jaminan Atas Pembongkaran Reklame		
4 . 1 . 4 . 09 . 03	Hasil Eksekusi Jaminan Atas KTP Musiman		
4 . 1 . 4 . 10	Pendapatan Dari Pengembalian		
4 . 1 . 4 . 10 . 01	Pendapatan Dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21		
4 . 1 . 4 . 10 . 02	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan		
4 . 1 . 4 . 10 . 03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan		
4 . 1 . 4 . 10 . 04	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas		
4 . 1 . 4 . 10 . 05	Pendapatan Dari Pengembalian dari Uang Muka		
4 . 1 . 4 . 10 . 06	Pendapatan Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak Ketiga		
4 . 1 . 4 . 10 . 07	Pendapatan Dari Pengembalian Belanja Lainnya		
4 . 1 . 4 . 11	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum		
4 . 1 . 4 . 11 . 01	Fasilitas Sosial		
4 . 1 . 4 . 11 . 02	Fasilitas Umum		
4 . 1 . 4 . 12	Pendapatan Dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		
4 . 1 . 4 . 12 . 01	Uang Pendaftaran/Ujian Masuk		
4 . 1 . 4 . 12 . 02	Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan		
4 . 1 . 4 . 12 . 03	Uang Ujian Kenaikan Tingkat/Kelas		
4 . 1 . 4 . 13	Pendapatan Dari Angsuran/Cicilan Penjualan		
4 . 1 . 4 . 13 . 01	Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah		
4 . 1 . 4 . 13 . 02	Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan		
4 . 1 . 4 . 13 . 03	Angsuran/Cicilan Penjualan Ruko/Toko/Kios		
4 . 1 . 4 . 14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah		
4 . 1 . 4 . 14 . 01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
4.1.4.14.02	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerjasama Pemanfaatan		
4.1.4.14.03	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah		
4.1.4.14.04	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna		
4.1.4.15	Pendapatan Zakat		
4.1.4.15.01	Pendapatan Zakat		
4.1.4.16	Pendapatan BLUD		
4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD		
4.1.4.16.02	Pendapatan Hibah BLUD		
4.1.4.16.03	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD		
4.1.4.16.04	Pendapatan Lain-lain BLUD		
4.1.4.17	Hasil dari pengelolaan dana bergulir		
4.1.4.17.01	Hasil dari pengelolaan dana bergulir		
4.1.4.18	Lelang Bongkaran Aset		
4.1.4.18.01	Lelang Bongkaran Aset		
4.1.4.19	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda		
4.1.4.19.01	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda		
4.1.4.20	Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah		
4.1.4.20.01	Pendapatan Denda Sewa Aset Daerah		
4.1.4.20.02	Pendapatan Denda Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah		
4.1.4.20.03	Pendapatan Denda Bangun Guna Serah		
4.1.4.20.04	Pendapatan Denda Bangun Serah Guna		
4.1.4.21	Hasil Penjualan Aset Lainnya		
4.1.4.21.01	Hasil Penjualan Aset Lainnya		
4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN		
4.1.4.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN		
4.1.4.23	Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat		
4.1.4.23.01	Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah		
4.1.4.23.02	Pendapatan Penyelenggaraan Diklat		
4.1.4.24	Pendapatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		
4.1.4.24.01	Pendapatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		
4.1.4.25	Pendapatan Taspen		
4.1.4.25.01	Pendapatan Taspen		
4.1.4.26	Setoran Tindak Lanjut Atas LHP Inspektorat / BPK		
4.1.4.26.01	Setoran Tindak Lanjut Atas LHP Inspektorat / BPK		
4.1.4.27	Pendapatan KSO Hand Tranctor		
4.1.4.27.01	Pendapatan KSO Hand Tranctor		
4.1.4.28	Pendapatan Lainnya		
4.1.4.28.01	Penerimaan dari Menara Telekomunikasi		
4.1.4.28.02	Penerimaan Kontribusi Pelaksanaan MTQ Tk. Provinsi Lampung		
4.1.4.28.03	Penerimaan Atas Setoran Lainnya		
4.2	DANA PERIMBANGAN		
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	K	
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak		
4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan		
4.2.1.01.02	Bagi Hasil Dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan		
4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi		
4.2.1.01.04	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan		
4.2.1.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan		
4.2.1.01.06	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau		
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam		
4.2.1.02.01	Bagi Hasil Dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan		
4.2.1.02.02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan		
4.2.1.02.03	Bagi Hasil Dari Dana Reboisasi		
4.2.1.02.04	Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent)		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
4.2.1.02.05	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)		
4.2.1.02.06	Bagi Hasil Dari Pungutan Pengusahaan Perikanan		
4.2.1.02.07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan		
4.2.1.02.08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi		
4.2.1.02.09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi		
4.2.1.02.10	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi		
4.2.1.02.11	Bagi Hasil Cukai Tembakau		
4.2.1.02.12	Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil		
4.2.1.02.13	Dana Transfer Lainnya		
4.2.1.02.14	Bagi Hasil Dari Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi		
4.2.1.02.15	Bagi Hasil Dari Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara		
4.2.2	Dana Alokasi Umum	K	
4.2.2.01	Dana Alokasi Umum		
4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum		
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	K	
4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik		
4.2.3.01.01	DAK Reguler Bidang Pendidikan Sub Bidang SD/SLB		
4.2.3.01.02	DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Pelayanan Dasar		
4.2.3.01.03	DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian		
4.2.3.01.04	DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Keluarga Berencana		
4.2.3.01.05	DAK Reguler Bidang Perumahan, Air Minum dan Sanitasi Sub Bidang Air Minum		
4.2.3.01.06	DAK Reguler Bidang Perumahan, Air Minum dan Sanitasi Sub Bidang Sanitasi		
4.2.3.01.07	DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah		
4.2.3.01.08	DAK Reguler Bidang Kelautan dan Perikanan		
4.2.3.01.09	DAK Reguler Bidang Kedaulatan Pangan Sub Bidang Pertanian		
4.2.3.01.10	DAK Reguler Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Bidang Lingkungan Hidup		
4.2.3.01.11	DAK Reguler Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Bidang Kehutanan		
4.2.3.01.12	DAK Bidang Sarana Prasarana Perdesaan		
4.2.3.01.13	DAK Reguler Bidang Transportasi Sub Bidang Transportasi Perdesaan		
4.2.3.01.14	DAK Reguler Bidang Sarana Prasarana Perdagangan Sub Bidang Sarana Perdagangan		
4.2.3.01.15	DAK Reguler Bidang Transportasi Sub Bidang Perhubungan		
4.2.3.01.16	DAK Bidang Sarana Prasarana Daerah Tertinggal		
4.2.3.01.17	DAK Bidang Sarana Prasarana Kawasan Perbatasan		
4.2.3.01.18	DAK Bidang Perumahan dan Permukiman		
4.2.3.01.19	DAK Bidang Bidang Perdagangan/Pasar		
4.2.3.01.20	DAK Bidang Listrik Perdesaan		
4.2.3.01.21	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi		
4.2.3.01.22	DAK Bidang Pendidikan SMA		
4.2.3.01.23	DAK Bidang Pendidikan SMK		
4.2.3.01.24	DAK Bidang Prasarana Pemerintah Daerah		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
4.2.3.01.25	DAK Bidang Transportasi Infrastruktur Jalan		
4.2.3.01.26	DAK Tambahan P3K2		
4.2.3.01.27	DAK Tambahan Usulan Daerah		
4.2.3.01.28	DAK Reguler Bidang Pendidikan Sub Bidang SMP/SMPLB		
4.2.3.01.29	DAK Bidang Infrastruktur Publik Irigasi		
4.2.3.01.30	DAK Bidang Infrastruktur Publik Perhubungan		
4.2.3.01.31	DAK Tambahan Bidang Irigasi		
4.2.3.01.32	DAK Bidang Infrastruktur Jalan		
4.2.3.01.33	DAK Reguler Bidang Sarana dan Prasarana Penunjang Sub Bidang Jalan		
4.2.3.01.34	DAK Reguler Bidang Sarana dan Prasarana Penunjang Sub Bidang Sarpras Kesehatan		
4.2.3.01.35	DAK Infrastruktur Publik Daerah		
4.2.3.01.36	DAK Reguler Bidang Pertanian		
4.2.3.01.37	DAK Reguler Bidang Pariwisata		
4.2.3.01.38	DAK Penugasan Bidang Kesehatan Sub Bidang Pelayanan Rujukan		
4.2.3.01.39	DAK Penugasan Bidang Air Minum		
4.2.3.01.40	DAK Penugasan Bidang Sanitasi		
4.2.3.01.41	DAK Penugasan Bidang Jalan		
4.2.3.01.42	DAK Penugasan Bidang Pasar		
4.2.3.01.43	DAK Penugasan Bidang Irigasi		
4.2.3.01.44	DAK Afirmasi Bidang Transportasi		
4.2.3.02	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik		
4.2.3.02.01	DAK Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		
4.2.3.02.02	DAK Tunjangan Profesi Guru PNSD		
4.2.3.02.03	DAK Tambahan Penghasilan Guru PNSD		
4.2.3.02.04	DAK Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)		
4.2.3.02.05	DAK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)		
4.2.3.02.06	DAK Akreditasi Puskesmas		
4.2.3.02.07	DAK Jaminan Persalinan		
4.2.3.02.08	DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD		
4.2.3.02.09	DAK Bantuan Operasional KB		
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		
4.3.1	Pendapatan Hibah	K	
4.3.1.01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah		
4.3.1.01.01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah		
4.3.1.01.02	Pendapatan Hibah Non Kas dari Pemerintah Pusat		
4.3.1.02	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Daerah Lainnya		
4.3.1.02.01	Pemerintah Daerah		
4.3.1.03	Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri		
4.3.1.03.01	Badan/Lembaga/Organisasi Swasta		
4.3.1.04	Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat/Perorangan		
4.3.1.04.01	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat		
4.3.1.04.02	Pendapatan Hibah dari perorangan		
4.3.1.05	Pendapatan Hibah Dari Luar Negeri		
4.3.1.05.01	Pendapatan Hibah Dari Bilateral		
4.3.1.05.02	Pendapatan Hibah Dari Multilateral		
4.3.1.05.03	Pendapatan Hibah Dari Donor Lainnya		
4.3.2	Dana Darurat	K	
4.3.2.01	Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam		
4.3.2.01.01	Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam		
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	K	
4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
4.3.3.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	K	
4.3.3.01.02	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Diatas Air		
4.3.3.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		
4.3.3.01.04	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air		
4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		
4.3.3.01.06	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah		
4.3.3.01.07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan		
4.3.3.01.08	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok		
4.3.3.02	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi		
4.3.3.02.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi		
4.3.3.03	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Kabupaten		
4.3.3.03.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Kabupaten		
4.3.3.04	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Kota		
4.3.3.04.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Kota		
4.3.3.05	Dana Bagi hasil Lainnya		
4.3.3.05.01	Dana Bagi hasil Lainnya		
4.3.4	Dana Penyesuaian		
4.3.4.01	Dana Penyesuaian		
4.3.4.01.01	Tunjangan Profesi Guru PNSD		
4.3.4.01.02	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD		
4.3.4.01.03	Dana Insentif Daerah		
4.3.4.01.04	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Provinsi		
4.3.4.01.05	Bantuan Operasional Sekolah		
4.3.4.01.06	Dana Penyesuaian		
4.3.4.02	Dana Otonomi Khusus		
4.3.4.02.01	Dana Otonomi Khusus		
4.3.4.02.02	Dana Tambahan Infrastruktur		
4.3.4.03	Dana Keistimewaan		
4.3.4.03.01	Dana Keistimewaan		
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	K	
4.3.5.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi		
4.3.5.01.01	Bantuan Keuangan Bidang Infrastruktur		
4.3.5.02	Bantuan Keuangan Dari Kabupaten		
4.3.5.02.01	Bantuan Keuangan Dari Kabupaten....		
4.3.5.03	Bantuan Keuangan Dari Kota		
4.3.5.03.01	Bantuan Keuangan Dari Kota.....	K	
4.3.6	Pendapatan Lainnya		
4.3.6.01	Pendapatan Lainnya		
4.3.6.01.01	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PNSD		
4.3.6.01.02	Dana Jamkesmas di Pelayanan Dasar dan Dana JAMPERSAL di Pelayanan Dasar (Sumber Dana APBN)		
4.3.6.01.03	Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		
4.3.6.01.04	Dana Jaminan Kesehatan Nasional Pelayanan Dasar Non Kapitasi		
4.3.6.01.05	Dana Jamkesmas (Sumber Dana APBN)		
4.3.6.01.06	Alokasi Dana Desa (Sumber Dana APBN)		
4.3.6.01.07	Kompensasi Kenaikan BBM		
4.3.6.01.08	Pendapatan BLUD		
4.3.6.01.09	Dana Insentif Daerah (DID)		
4.3.6.01.10	Kontribusi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam rangka Penyelenggaraan MTQ Ke 44	D	
5	BELANJA		
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG		
5.1.1	Belanja Pegawai		
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi		
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga		
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan		
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional		
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum		
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras		
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus		
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji		
5.1.1.01.09	Iuran BPJS Kesehatan		
5.1.1.01.10	Uang Paket		
5.1.1.01.11	Tunjangan Panitia Musyawarah		
5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi		
5.1.1.01.13	Tunjangan Panitia Anggaran		
5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan		
5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya		
5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan		
5.1.1.01.17	Uang Duka Wafat/Tewas		
5.1.1.01.18	Uang Jasa Pengabdian		
5.1.1.01.19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD		
5.1.1.01.20	Tunjangan Kesehatan DPRD		
5.1.1.01.21	Iuran JKM		
5.1.1.01.22	Iuran JKK		
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS		
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja		
5.1.1.02.02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas		
5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja		
5.1.1.02.04	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi		
5.1.1.02.05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja		
5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH		
5.1.1.03.01	Belanja Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota DPRD		
5.1.1.03.02	Belanja Penunjang Operasional Bupati/Wakil Bupati		
5.1.1.04	Biaya Pemungutan Pajak Daerah		
5.1.1.04.01	Biaya Pemungutan PBB		
5.1.1.04.02	Biaya Pemungutan Pajak Daerah		
5.1.1.04.03	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan		
5.1.1.04.04	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan		
5.1.1.04.05	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan		
5.1.1.04.06	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan		
5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah		
5.1.1.05.01	Insentif Pemungutan Pajak Daerah		
5.1.1.05.02	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Kendaraan Bermotor		
5.1.1.05.03	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		
5.1.1.05.04	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		
5.1.1.05.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Permukaan		
5.1.1.05.06	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Rokok		
5.1.1.05.07	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel		
5.1.1.05.08	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran		
5.1.1.05.09	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan		
5.1.1.05.10	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame		
5.1.1.05.11	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan		
5.1.1.05.12	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir		
5.1.1.05.13	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah		
5.1.1.05.14	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet		
5.1.1.05.15	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		
5.1.1.05.16	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		
5.1.1.05.17	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan		
5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah		
5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah		
5.1.1.06.02	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
5.1.1.06.03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/Kebersihan	D	
5.1.1.06.04	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil		
5.1.1.06.05	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat		
5.1.1.06.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum		
5.1.1.06.07	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar		
5.1.1.06.08	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor		
5.1.1.06.09	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran		
5.1.1.06.10	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Peta		
5.1.1.06.11	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus		
5.1.1.06.12	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengolahan Limbah Cair		
5.1.1.06.13	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang		
5.1.1.06.14	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pendidikan		
5.1.1.06.15	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi		
5.1.1.06.16	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah		
5.1.1.06.17	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan		
5.1.1.06.18	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Pelelangan		
5.1.1.06.19	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal		
5.1.1.06.20	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir		
5.1.1.06.21	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa		
5.1.1.06.22	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan		
5.1.1.06.23	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kepelabuhan		
5.1.1.06.24	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga		
5.1.1.06.25	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyebrangan Air		
5.1.1.06.26	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan Produksi Usaha Daerah		
5.1.1.06.27	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan		
5.1.1.06.28	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol		
5.1.1.06.29	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan		
5.1.1.06.30	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek		
5.1.1.06.31	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Perikanan		
5.1.1.06.32	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Lalu Lintas		
5.1.1.06.33	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)		
5.1.1.07	Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru		
5.1.1.07.01	Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru		
5.1.2	Belanja Bunga	D	
5.1.2.01	Bunga Utang Pinjaman		
5.1.2.01.01	Bunga Utang Pinjaman Kepada Pemerintah		
5.1.2.01.02	Bunga Utang Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya		
5.1.2.01.03	Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bank		
5.1.2.01.04	Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		
5.1.2.01.05	Bunga Utang Pinjaman kepada BUMD		
5.1.2.01.06	Bunga Utang Pinjaman kepada BUMN		
5.1.2.01.07	Bunga Utang Pinjaman Lainnya		
5.1.2.02	Bunga Utang Obligasi		
5.1.2.02.01	Bunga Utang Obligasi		
5.1.3	Belanja Subsidi		
5.1.3.01	Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga	D	
5.1.3.01.01	Belanja Subsidi kepada Perusahaan		
5.1.3.01.02	Belanja Subsidi kepada Lembaga		
5.1.3.01.03	Belanja Subsidi kepada Pihak Ketiga Lainnya		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
5.1.4	Belanja Hibah	D	
5.1.4.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat		
5.1.4.01.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat		
5.1.4.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya		
5.1.4.02.01	Hibah kepada Pemerintah Provinsi		
5.1.4.02.02	Hibah kepada Pemerintah Kabupaten		
5.1.4.02.03	Hibah kepada Pemerintah Kota		
5.1.4.03	Belanja Hibah Kepada Pemerintahan Desa		
5.1.4.03.01	Belanja Hibah Kepada Pemerintahan Desa....		
5.1.4.04	Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD		
5.1.4.04.01	Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah		
5.1.4.04.02	Belanja Hibah kepada BUMD		
5.1.4.05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi		
5.1.4.05.01	Belanja Hibah Kepada Organisasi / Komite Sekolah / Panitia Pembangunan		
5.1.4.05.02	Belanja Hibah Kepada Organisasi Profesi		
5.1.4.05.03	Belanja Hibah Kepada Organisasi Keagamaan		
5.1.4.05.04	Belanja Hibah Kepada Organisasi Kepemudaan		
5.1.4.05.05	Belanja Hibah Kepada Organisasi Wanita		
5.1.4.05.06	Belanja Hibah Kepada Organisasi / Dewan		
5.1.4.05.07	Belanja Hibah Kepada Pondok Pesantren		
5.1.4.05.08	Belanja Hibah Kepada LPTQ Kabupaten Tanggamus		
5.1.4.06	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat		
5.1.4.06.01	Belanja Hibah Pembangunan Fisik Gerbang Helau		
5.1.4.06.02	Belanja Hibah Pembangunan Sanitasi Lingkungan		
5.1.4.06.03	Belanja Hibah Kepada Kelompok Tani		
5.1.4.06.04	Belanja Hibah Kepada Kelompok Koperasi		
5.1.4.06.05	Belanja Hibah Pembangunan Masjid Jami' Al-Islah		
5.1.4.06.06	Belanja Hibah Pembangunan Masjid Way Jaha		
5.1.4.06.07	Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan		
5.1.4.07	Belanja Hibah Untuk Sarana Peribadatan		
5.1.4.07.01	Belanja Hibah Untuk Sarana Peribadatan Masjid		
5.1.4.07.02	Belanja Hibah Untuk Sarana Peribadatan Gereja		
5.1.4.07.03	Belanja Hibah Untuk Sarana Peribadatan Pure		
5.1.4.07.04	Belanja Hibah Untuk Sarana Peribadatan Vihara		
5.1.4.08	Belanja Hibah Kepada Sekolah		
5.1.4.08.01	Belanja Hibah Kepada SMA		
5.1.4.08.02	Belanja Hibah Kepada SMK		
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	D	
5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan		
5.1.5.01.01	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan		
5.1.5.02	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat		
5.1.5.02.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat		
5.1.5.03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat		
5.1.5.03.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat		
5.1.5.04	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik		
5.1.5.04.01	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik.....		
5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	D	
5.1.6.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi		
5.1.6.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi		
5.1.6.02	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota		
5.1.6.02.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota		
5.1.6.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa		
5.1.6.03.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa		
5.1.6.04	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota		
5.1.6.04.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota		
5.1.6.05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
5.1.6.05.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa		
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	D	
5.1.7.01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi		
5.1.7.01.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi		
5.1.7.02	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota		
5.1.7.02.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota		
5.1.7.03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa		
5.1.7.03.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa		
5.1.7.04	Cost Sharing Program Pengembangan Kecamatan		
5.1.7.04.01	Cost Sharing Program Pengembangan Kecamatan		
5.1.7.05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik		
5.1.7.05.01	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik		
5.1.7.06	Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota		
5.1.7.06.01	Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota		
5.1.7.07	Belanja Bantuan Kepada Pendidikan Anak Usia Dini		
5.1.7.07.01	Belanja Bantuan Kepada Pendidikan Anak Usia Dini		
5.1.8	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	D	
5.1.8.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik		
5.1.8.01.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik		
5.1.9	Belanja Tidak Terduga	D	
5.1.9.01	Belanja Tak Terduga		
5.1.9.01.01	Belanja Tidak Terduga		
5.1.9.01.02	Belanja Tak Terduga Bencana Alam		
5.1.9.01.03	Bencana Tak Terduga Luar Biasa Lainnya		
5.2	BELANJA LANGSUNG		
5.2.1	Belanja Pegawai	D	
5.2.1.01	Honorarium PNS		
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa		
5.2.1.01.04	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa		
5.2.1.01.05	Honorarium Operator Komputer		
5.2.1.01.06	Belanja Honorarium Moderator		
5.2.1.01.07	Belanja Honorarium Notulen		
5.2.1.01.08	Belanja Honorarium Pengajar / Penyaji		
5.2.1.01.09	Belanja Honorarium Instruktur / PembahasBelanja Honorarium Instruktur / Pembahas		
5.2.1.01.10	Honorarium Tutor Paket A, B, C		
5.2.1.01.11	Honorarium Pengamat Kelas Diklat		
5.2.1.01.12	Honorarium Operator Multimedia		
5.2.1.01.13	Honorarium Instalasi, Ruangan dan Dokter RSUD		
5.2.1.01.14	Honorarium Pengawas Fungsional		
5.2.1.01.15	Honorarium Guru Daerah Khusus / Terpencil		
5.2.1.01.16	Honorarium Operator Multimedia		
5.2.1.01.17	Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan		
5.2.1.01.18	Honorarium Pembuka / Penutup Acara		
5.2.1.01.19	Honorarium Pengelola Aplikasi SIMDA danSISMIOP		
5.2.1.01.20	Honorarium Operator Incenerator dan Ipal		
5.2.1.01.21	Honorarium Perawat Jaga Malam		
5.2.1.01.22	Honorarium Pengelola Aplikasi SAPK dan SIMPEG		
5.2.1.01.23	Honorarium MC dan Pembaca Do'a		
5.2.1.01.24	Honorarium Dirijen Lagu Indonesia Raya		
5.2.1.01.25	Honorarium Protokol Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah		
5.2.1.01.26	Belanja Kesejahteraan Pegawai		
5.2.1.01.27	Honorarium Petugas Piket Kelas		
5.2.1.01.28	Honorarium Pengelola Keuangan dan Barang Daerah		
5.2.1.02	Honorarium Non PNS		
5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		
5.2.1.02.02	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
5.2.1.02.03	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
5.2.1.02.04	Honorarium Tenaga Teknologi Informasi (TI) Dinas PPKAD, Bappeda		
5.2.1.02.05	Honorarium Tenaga Teknis Akuntansi Dinas PPKAD		
5.2.1.02.06	Honorarium Anggota TKS Satuan Pol. PP		
5.2.1.02.07	Honorarium Anggota TKS Dinas Perhubungan		
5.2.1.02.08	Honorarium Anggota TKS Pemadam Kebakaran		
5.2.1.02.09	Honorarium Penyuluh Pertanian / Perikanan / Peternakan / Perkebunan		
5.2.1.02.10	Honorarium Komisi Penyiaran Indonesia Daerah		
5.2.1.02.11	Honorarium Musyawarah Pimpinan Daerah		
5.2.1.02.12	Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan		
5.2.1.02.13	Honorarium Badan Layanan Umum Daerah		
5.2.1.02.14	Honorarium Penunjang Operasional Pimpinan DPRD		
5.2.1.02.15	Honorarium Petugas Kebersihan		
5.2.1.02.16	Honorarium Supir		
5.2.1.02.17	Honorarium Operator Alat Berat		
5.2.1.02.18	Honorarium Cleaning Service Kantor		
5.2.1.02.19	Honorarium Instruktur Senam		
5.2.1.02.20	Honorarium Penjaga Kantor		
5.2.1.02.21	Honorarium Operator Komputer		
5.2.1.02.22	Honorarium Operasional Kepala Lingkungan		
5.2.1.02.23	Honorarium Operasional Ketua RT		
5.2.1.02.24	Honorarium Sekretariat Tim Penggerak PKK		
5.2.1.02.25	Honorarium Petugas Keamanan		
5.2.1.02.26	Honorarium Dharmawanita Persatuan		
5.2.1.02.27	Honorarium Tenaga Paud / TK		
5.2.1.02.28	Honorarium Pengurus Olahraga		
5.2.1.02.29	Honorarium Staf Administrasi		
5.2.1.02.30	Honorarium Guru SMPN Satu Atap		
5.2.1.02.31	Honorarium Pelaksanaan Bidang Keagamaan		
5.2.1.02.32	Honorarium Operator Telephone		
5.2.1.02.33	Honorarium Juru Masak		
5.2.1.02.34	Honorarium Juru Cuci		
5.2.1.02.35	Honorarium Tenaga Medis / Paramedis		
5.2.1.02.36	Honorarium Teknisi Prasarana Rumah Sakit		
5.2.1.02.37	Honorarium Petugas Pusdal		
5.2.1.02.38	Honorarium Pengelola Aplikasi SAPK dan SIMPEG		
5.2.1.02.39	Honorarium Pengelola Aplikasi SIMDA dan SISMIO		
5.2.1.02.40	Tunjangan Kinerja		
5.2.1.02.41	Belanja Kesejahteraan Pegawai		
5.2.1.02.42	Honorarium Guru Sekolah Negeri		
5.2.1.02.43	Honorarium Staf Sekolah Negeri		
5.2.1.02.44	Honorarium Nahkoda		
5.2.1.02.45	Honorarium Protokoler		
5.2.1.02.46	Honorarium Guru Sekolah Luar Biasa (SLB)		
5.2.1.03	Uang Lembur		
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS		
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS		
5.2.1.04	Honorarium Pengelola Dana BOS		
5.2.1.04.01	Honorarium Pengelola Dana BOS		
5.2.1.05	Insentif Tenaga Ahli		
5.2.1.05.01	Insentif Tenaga Ahli		
5.2.1.06	Belanja Honorarium Non Pegawai		
5.2.1.06.01			
5.2.1.06.02			
5.2.1.06.03	Honorarium Petugas MC dan Pembaca Doa		
5.2.1.07	Belanja Persalinan Pegawai		
5.2.1.07.01	Belanja Persalinan		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa		
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis		
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor		
5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender		
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)		
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya		
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih		
		D	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas		
5.2.2.01.07	Belanja Pengisian/Pembelian Tabung Pemadam Kebakaran		
5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas		
5.2.2.01.09	Belanja Bahan untuk Cendramata/Souvenir		
5.2.2.01.10	Belanja Spanduk / Umbul-umbul / Bendera / Baliho		
5.2.2.01.11	Belanja Bahan Pakai Habis Alat Kesehatan		
5.2.2.01.12	Belanja Alat Sarana Ibadah		
5.2.2.01.13	Belanja Buku Uji (KIR), Plat Uji, Stiker Tanda Samping		
5.2.2.01.14	Belanja Kembang Api		
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material		
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan		
5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman		
5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak		
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan		
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk		
5.2.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok		
5.2.2.02.07	Belanja Bahan/Barang Jadi untuk Pihak Ke-III		
5.2.2.02.08	Belanja Bangunan/Gedung untuk Pihak Ke-III		
5.2.2.02.09	Belanja Kendaraan/Alat Mobilitas untuk Pihak Ke-III		
5.2.2.02.10	Belanja Bahan/Suku Cadang Non Kendaraan Bermotor		
5.2.2.02.11	Belanja Sembako		
5.2.2.02.12	Belanja Bahan untuk Pakan Ternak		
5.2.2.02.13	Belanja Modal Kerja dan Dana Bergulir		
5.2.2.02.14	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Pendidikan		
5.2.2.02.15	Belanja Bahan untuk Produk KIAT		
5.2.2.02.16	Belanja Bahan Hadiah / Bahan Pembinaan		
5.2.2.02.17	Belanja Bahan Percontohan / Alat peraga		
5.2.2.02.18	Belanja Bahan Materi		
5.2.2.02.19	Belanja Papan Hibauan / Billboard		
5.2.2.02.20	Belanja Peralatan Olahraga		
5.2.2.02.21	Belanja Wall Paper		
5.2.2.02.22	Belanja Pot		
5.2.2.02.23	Belanja Perlengkapan Kesenian		
5.2.2.02.24	Belanja Perlengkapan Audio/Video Visual		
5.2.2.02.25	Belanja Patok Batas		
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor		
5.2.2.03.01	Belanja Telepon		
5.2.2.03.02	Belanja Air		
5.2.2.03.03	Belanja Listrik		
5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang		
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah		
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit		
5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman		
5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi		
5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan		
5.2.2.03.10	Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Penerangan Jalan Umum		
5.2.2.03.11	Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pengadaan Software / Aplikasi		
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Penyiaran/Peliputan		
5.2.2.03.14	Belanja Jasa Jaring Asmara untuk Pemerintah Kecamatan		
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi		
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Dekorasi		
5.2.2.03.17	Belanja Jasa Kebersihan		
5.2.2.03.18	Belanja Jasa Ketertiban Lalu Lintas dan Parkir		
5.2.2.03.19	Belanja Jasa Keamanan		
5.2.2.03.20	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan		
5.2.2.03.21	Belanja Jasa Akomodasi Tamu Pemerintah Daerah		
5.2.2.03.22	Belanja Jasa Pajak PKB dan BBNKB		
5.2.2.03.23	Belanja Jasa Lidik dan Sidik		
5.2.2.03.24	Belanja Kenang-kenangan Bagi PNS yang Pensiun		
5.2.2.03.25	Belanja Jasa Penari Tradisional		
5.2.2.03.26	Belanja Jasa Pembuatan Website		
5.2.2.03.27	Belanja Jasa Pengembangan Website		
5.2.2.03.28	Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Daerah		
5.2.2.03.29	Belanja Operasional Kelurahan		
5.2.2.03.30	Belanja Iuran Indovision		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
5.2.2.03.31	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan		
5.2.2.03.32	Belanja Jasa Pembinaan Kebudayaan		
5.2.2.03.33	Belanja Iuran Keanggotaan Apkasi		
5.2.2.03.34	Belanja Jasa Pengantar Surat		
5.2.2.03.35	Belanja Jasa Penampilan Korps Musik		
5.2.2.03.36	Belanja Jasa Pengembangan Software / Aplikasi		
5.2.2.03.37	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan JKN		
5.2.2.03.38	Belanja Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan		
5.2.2.03.39	Belanja Klaim/Non Kapitasi BPJS Kesehatan		
5.2.2.03.41	Belanja Iuran Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia		
5.2.2.03.42	Belanja Jasa Penampilan Paduan Suara		
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi		
5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan		
5.2.2.04.02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah		
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor		
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service		
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang		
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas		
5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR		
5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor		
5.2.2.05.06	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		
5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan		
5.2.2.05.08	Belanja Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi		
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan		
5.2.2.06.01	Belanja Cetak		
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan		
5.2.2.06.03	Belanja Foto Copy		
5.2.2.06.04	Belanja Penjilidan		
5.2.2.06.05	Belanja Cetak Foto/Dokumentasi		
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir		
5.2.2.07.01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas		
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat		
5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan		
5.2.2.07.04	Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas		
5.2.2.07.05	Belanja Sewa Kamar Hotel/Penginapan		
5.2.2.07.06	Belanja Sewa Tempat/Lahan Pertanian		
5.2.2.07.07	Belanja Sewa Stand Pameran		
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas		
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat		
5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air		
5.2.2.08.03	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara		
5.2.2.09	Belanja Sewa Alat Berat		
5.2.2.09.01	Belanja Sewa Eskavator		
5.2.2.09.02	Belanja Sewa Buldoser		
5.2.2.09.03	Belanja Sewa Traktor		
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor		
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi		
5.2.2.10.02	Belanja Sewa Komputer Dan Printer		
5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor		
5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator		
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda		
5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional		
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Peralatan Hiburan		
5.2.2.10.08	Belanja Sewa Navigasi		
5.2.2.10.09	Belanja Sewa Alat Kesehatan		
5.2.2.10.10	Belanja Sewa Perlengkapan Multimedia		
5.2.2.10.11	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Pameran		
5.2.2.10.12	Belanja Sewa Instalasi Listrik		
5.2.2.10.13	Belanja Sewa Sound System		
5.2.2.10.14	Belanja Sewa Papan Reklame/Billboard		
5.2.2.10.15	Belanja Sewa OS/Hardware/Software/Jaringan Komputer		
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman		
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat		
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu		
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan		
5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Rumah Tangga Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah		
5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan		
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya		
5.2.2.12.01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH		
5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)		
5.2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)		
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)		
5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)		
5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)		
5.2.2.12.07	Belanja Lencana/Name Tag		
5.2.2.12.08	Belanja Pakaian Jas		
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja		
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan		
5.2.2.13.02	Belanja Sepatu/Topi Lapangan/Atribut		
5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu		
5.2.2.14.01	Belanja Pakaian KORPRI		
5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah		
5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional		
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga		
5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Seragam Kegiatan		
5.2.2.14.06	Belanja Pakaian Dinas Instansi		
5.2.2.14.07	Belanja Pakaian Putih Hitam		
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas		
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		
5.2.2.15.03	Belanja perjalanan dinas luar negeri		
5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS		
5.2.2.16.01	Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3		
5.2.2.16.02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1		
5.2.2.16.03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2		
5.2.2.16.04	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3		
5.2.2.16.05	Belanja Beasiswa PNS Profesi Guru		
5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Seleksi MTQ		
5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan		
5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi		
5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis		
5.2.2.17.04	Belanja Seleksi MTQ Tingkat Kecamatan		
5.2.2.17.05	Belanja Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan		
5.2.2.17.06	Belanja Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan		
5.2.2.18	Belanja Perjalanan Pindah Tugas		
5.2.2.18.01	Belanja Perjalanan Pindah Tugas Dalam Daerah		
5.2.2.18.02	Belanja Perjalanan Pindah Tugas Luar Daerah		
5.2.2.19	Belanja Pemulangan Pegawai		
5.2.2.19.01	Belanja Pemulangan Pegawai Yang Pensiun Dalam Daerah		
5.2.2.19.02	Belanja Pemulangan Pegawai Yang Pensiun Luar Daerah		
5.2.2.19.03	Belanja Pemulangan Pegawai Yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas		
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan		
5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan		
5.2.2.20.02	Belanja Pemeliharaan Jembatan		
5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Tanah		
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		
5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		
5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Irigasi		
5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Saluran		
5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Taman		
5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Lapangan		
5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas		
5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Halaman Kantor		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Lampu Jalan		
5.2.2.20.14	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas		
5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Jaringan/Instalasi		
5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Papan Reklame		
5.2.2.20.17	Belanja Pemeliharaan Tanaman		
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi		
5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian		
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan		
5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan		
5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultansi Teknik		
5.2.2.21.05	Belanja Jasa Konsultansi Manajemen		
5.2.2.21.06	Belanja Jasa Penilai		
5.2.2.21.07	Belanja Jasa Aktuaris		
5.2.2.21.08	Belanja Jasa Akuntansi		
5.2.2.21.09	Belanja Jasa Pengujian/Laboratorium		
5.2.2.21.10	Belanja Jasa atas Promosi Kegiatan		
5.2.2.21.11	Belanja Jasa Sertifikasi dan Pemecahan Sertifikat Aset Tanah Milik Pemkab		
5.2.2.21.12	Belanja Jasa Konsultasi Hukum dan Phicychologi		
5.2.2.21.13	Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi		
5.2.2.21.14	Belanja Jasa Inventarisasi		
5.2.2.22	Belanja Barang Dana BOS		
5.2.2.22.01	Belanja Barang Dana BOS		
5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga		
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat		
5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga		
5.2.2.23.03	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pemerintah Pusat		
5.2.2.24	Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga		
5.2.2.24.01	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat		
5.2.2.24.02	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga		
5.2.2.25	Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional		
5.2.2.25.01	Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasu Jaminan Kesehatan Nasional		
5.2.2.26	Belanja Perawatan Peralatan Kantor		
5.2.2.26.01	Belanja Perawatan Komputer dan Printer		
5.2.2.26.02	Belanja Perawatan Meja Kursi		
5.2.2.26.03	Belanja Perawatan Mesin Tik		
5.2.2.26.04	Belanja Perawatan Mesin Genset		
5.2.2.26.05	Belanja Perawatan Alat Elektronik		
5.2.2.26.06	Belanja Perawatan Brankas		
5.2.2.26.07	Belanja Perawatan Lemari Arsip		
5.2.2.26.08	Belanja Perawatan AC		
5.2.2.26.09	Belanja Perawatan Alat-Alat Laboratorium		
5.2.2.26.10	Belanja Perawatan Sound System		
5.2.2.26.11	Belanja Perawatan Alat-Alat Inventaris Kantor Lainnya		
5.2.2.27	Belanja Beasiswa Pendidikan untuk Masyarakat		
5.2.2.27.01	Belanja Beasiswa (SD/SMP/SMA)		
5.2.2.27.02	Belanja Beasiswa S 1		
5.2.2.27.03	Belanja Beasiswa S 2		
5.2.2.27.04	Belanja Beasiswa S 3		
5.2.2.28	Belanja Pembinaan Olahraga		
5.2.2.28.01	Belanja Pembinaan Cabang Olahraga		
5.2.2.29	Belanja Pameran Pembangunan		
5.2.2.29.01	Belanja Pameran Pembangunan		
5.2.2.30	Belanja Jasa / Upah Penanaman		
5.2.2.30.01	Belanja Jasa / Upah Penanaman		
5.2.2.31	Belanja Jasa Pembuatan Lubang Resapan		
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Pembuatan Lubang Resapan		
5.2.2.32	Belanja Jasa Media RSUD		
5.2.2.32.01	Belanja Jasa Medis RSUD Kota Agung		
5.2.2.33	Belanja Pemberangkatan Haji dan Umroh		
5.2.2.33.01	Belanja Pemberangkatan Haji		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
5.2.2.33.02	Belanja Pemberangkatan Umroh		
5.2.2.34	Belanja Jasa/Upah Buruh		
5.2.2.34.01	Belanja Upah Tukang / Mandor		
5.2.2.35	Belanja Jasa Dewan Hakim / Juri Pertombaan		
5.2.2.35.01	Belanja Jasa Dewan Hakim / Juri MTQ		
5.2.2.36	Belanja Kontribusi Ke Kabupaten / Kota		
5.2.2.36.01	Belanja Kontribusi MTQ Tingkat Propinsi		
5.2.2.37	Belanja Ziarah Kerohanian		
5.2.2.37.01	Belanja Ziarah Kerohanian		
5.2.2.38	Belanja Jasa Pengabdian		
5.2.2.38.01	Belanja Jasa Pengabdian Bagi Mantan Pejabat		
5.2.2.39	Belanja Operasional Posyandu		
5.2.2.39.01	Belanja Operasional Posyandu		
5.2.2.40	Belanja Jasa Kesenian		
5.2.2.40.01	Belanja Jasa Penggandaan Lagu Mars Tanggamus		
5.2.2.41	Belanja Sewa Tanah		
5.2.2.41.01	Belanja Sewa Tanah		
5.2.2.42	Belanja Jasa Pelayanan Masyarakat		
5.2.2.42.01	Jasa Pelayanan Guru Ngaji, PPPN, Penceramah dan Majelis Taklim		
5.2.2.43	Belanja Pembinaan Pekon		
5.2.2.43.01	Belanja Pembinaan Pekon		
5.2.2.44	Belanja Jasa Narasumber / Pencaramah / Tenaga Ahli		
5.2.2.44.01	Belanja Jasa Penceramah		
5.2.2.44.02	Belanja Jasa Narasumber		
5.2.2.44.03	Belanja Jasa Widyaiswara		
5.2.2.44.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli		
5.2.2.45	Belanja Jasa Akademik / Universitas		
5.2.2.45.01	Belanja Jasa Pembuatan Materi Soal Ujian CPNS Formasi Umum		
5.2.2.45.02	Belanja Sharing Pendidikan		
5.2.2.46	Belanja Operasional Sekolah		
5.2.2.46.01	Belanja Operasional Sekolah		
5.2.2.47	Belanja Pengelolaan Gudang		
5.2.2.47.01	Biaya Pengelolaan Gudang SRG		
5.2.2.48	Belanja Jasa Instruktur		
5.2.2.48.01	Belanja Jasa Instruktur Senam		
5.2.2.48.02	Belanja Jasa Instruktur / Pembahas		
5.2.2.49	Belanja Jasa Moderator		
5.2.2.49.01	Belanja Jasa Moderator		
5.2.2.50	Belanja Jasa Notulen		
5.2.2.50.01	Belanja Jasa Notulen		
5.2.2.51	Belanja Jasa Pengajar / Penyaji		
5.2.2.51.01	Belanja Jasa Pengajar / Penyaji		
5.2.2.52	Belanja Perawatan Alat-Alat Operasional Pasar		
5.2.2.52.01	Belanja Perawatan Alat-Alat Operasional Pasar		
5.2.2.53	Belanja Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD RSUD Kota Agung		
5.2.2.53.01	Belanja Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD RSUD Kota Agung		
5.2.2.54	Belanja Jasa Perizinan		
5.2.2.54.01	Belanja Perizinan Billboard Bando		
5.2.2.55	Belanja Bantuan Operasional Kesehatan		
5.2.2.55.01	Bantuan Operasional Kesehatan		
5.2.2.56	Belanja Jasa Pemindahan Jaringan		
5.2.2.56.01	Belanja Jasa Pemindahan Jaringan Listrik		
5.2.2.56.02	Belanja Jasa Pemindahan Jaringan Telepon		
5.2.2.56.03	Belanja Jasa Pemindahan Rambu-Rambu Lalu Lintas		
5.2.2.56.04	Belanja Jasa Pemindahan Spanduk/Baliho		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
5.2.2.57	Belanja Jasa Assessor	D	
5.2.2.57.01	Belanja Jasa Assessor		
5.2.2.58	Belanja Jasa Pengolahan Data Peserta dengan System CAT		
5.2.2.58.01	Belanja Jasa Pengolahan Data Peserta dengan System CAT		
5.2.2.59	Belanja Jasa Piket Kelas		
5.2.2.59.01	Belanja Piket Kelas		
5.2.2.60	Belanja Operasional Kesehatan Puskesmas		
5.2.2.60.01	Belanja Operasional Kesehatan Puskesmas		
5.2.3	Belanja Modal		
5.2.3.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkampungan		
5.2.3.01.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kampung		
5.2.3.01.02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Emplasmen		
5.2.3.01.03	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kuburan		
5.2.3.02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Pertanian		
5.2.3.02.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Sawah Satu Tahun Ditanami		
5.2.3.02.02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Tegalan		
5.2.3.02.03	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Ladang		
5.2.3.03	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkebunan		
5.2.3.03.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkebunan		
5.2.3.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kebun Campuran		
5.2.3.04.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Bidang Tanah Kebun Yang Tidak Ada Jaringan Pengairan		
5.2.3.04.02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kebun Tumbuh Liar Bercampur Jenis Lain		
5.2.3.05	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan		
5.2.3.05.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan Lebat		
5.2.3.05.02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan Belukar		
5.2.3.05.03	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan Tanaman Jenis		
5.2.3.05.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan Alam Sejenis/Hutan Rawa		
5.2.3.05.05	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan Untuk Penggunaan Khusus		
5.2.3.06	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kolam Ikan		
5.2.3.06.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kolam Ikan Tambak		
5.2.3.06.02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kolam Ikan Air Tawar		
5.2.3.07	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Danau/Rawa		
5.2.3.07.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Rawa		
5.2.3.07.02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Danau		
5.2.3.08	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Tandus/Rusak		
5.2.3.08.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Tandus		
5.2.3.08.02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Rusak		
5.2.3.09	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Alang-alang dan Padang Rumput		
5.2.3.09.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Alang-alang		
5.2.3.09.02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Padang Rumput		
5.2.3.10	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Pengguna Lain		
5.2.3.10.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Penggalan		
5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung		
5.2.3.11.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan/G. Tempat Tinggal		
5.2.3.11.02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan		
5.2.3.11.03	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Industri		
5.2.3.11.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa		
5.2.3.11.05	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kosong		
5.2.3.11.06	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Peternakan		
5.2.3.11.07	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Pengairan		
KODE REKENING			

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
5.2.3.11.08	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan		
5.2.3.11.09	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lembiran/Bantaran/Lepe-lepe/Setren dst		
5.2.3.12	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Pertambangan		
5.2.3.12.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Pertambangan		
5.2.3.13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung		
5.2.3.13.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Olah Raga		
5.2.3.13.02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Parkir		
5.2.3.13.03	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Penimbun Barang		
5.2.3.13.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam		
5.2.3.13.05	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan		
5.2.3.13.06	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Terbang		
5.2.3.13.07	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan		
5.2.3.13.08	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Air		
5.2.3.13.09	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Instalasi		
5.2.3.13.10	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jaringan		
5.2.3.13.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bersejarah		
5.2.3.13.12	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Olah Raga		
5.2.3.13.13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah		
5.2.3.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat		
5.2.3.14.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Tractor		
5.2.3.14.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Grader		
5.2.3.14.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Excavator		
5.2.3.14.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pile Driver		
5.2.3.14.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Hauler		
5.2.3.14.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Asphal Equipment		
5.2.3.14.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Compacting Equipment		
5.2.3.14.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Aggregate & Concrete Equipment		
5.2.3.14.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Loader		
5.2.3.14.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengangkat		
5.2.3.14.11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Proses		
5.2.3.15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Apung		
5.2.3.15.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Dredger		
5.2.3.15.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Floating Excavator		
5.2.3.15.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Amphibi Dredger		
5.2.3.15.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kapal Tarik		
5.2.3.15.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Proses Agung		
5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu		
5.2.3.16.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penarik		
5.2.3.16.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Feeder		
5.2.3.16.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Compressor		
5.2.3.16.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set		
5.2.3.16.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa		
5.2.3.16.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Bor		
5.2.3.16.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan		
5.2.3.16.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor		
5.2.3.16.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pembangkit Uap Air Panas/Sistem Generator		
5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor		
KODE REKENING			

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
5.2.3.17.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan		
5.2.3.17.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang		
5.2.3.17.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang		
5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus		
5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua		
5.2.3.17.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga		
5.2.3.17.07	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Truck		
5.2.3.17.08	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Tangki (Air, Minyak, Tinja)		
5.2.3.17.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up		
5.2.3.17.10	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans		
5.2.3.17.11	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran		
5.2.3.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		
5.2.3.18.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang		
5.2.3.18.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang		
5.2.3.19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor		
5.2.3.19.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Barang		
5.2.3.19.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang		
5.2.3.19.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Khusus		
5.2.3.20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor		
5.2.3.20.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Untuk Barang		
5.2.3.20.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Penumpang		
5.2.3.20.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus		
5.2.3.21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Bermotor Udara		
5.2.3.21.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kapal Terbang		
5.2.3.22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin		
5.2.3.22.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi		
5.2.3.22.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah		
5.2.3.22.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik		
5.2.3.22.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Perkakas Bengkel Service		
5.2.3.22.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Pengangkat Bermesin		
5.2.3.22.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu		
5.2.3.22.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Khusus		
5.2.3.22.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Las		
5.2.3.22.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Pabrik Es		
5.2.3.23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin		
5.2.3.23.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Konstruksi Logam		
5.2.3.23.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik		
5.2.3.23.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Service		
5.2.3.23.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Pengangkat		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
5 . 2 . 3 . 23 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Standar (Standart Tool)		
5 . 2 . 3 . 23 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Khusus (Special Tool)		
5 . 2 . 3 . 23 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja		
5 . 2 . 3 . 23 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Tukang-tukang Besi		
5 . 2 . 3 . 23 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Tukang Kayu		
5 . 2 . 3 . 23 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Tukang Kulit		
5 . 2 . 3 . 23 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Ukur, Gip & Feting		
5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur		
5 . 2 . 3 . 24 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal		
5 . 2 . 3 . 24 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Test Intelegensia		
5 . 2 . 3 . 24 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Test Alat Kepribadian		
5 . 2 . 3 . 24 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur /Test Klinis Lain		
5 . 2 . 3 . 24 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kalibrasi		
5 . 2 . 3 . 24 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Oscilloscope		
5 . 2 . 3 . 24 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Universal Tester		
5 . 2 . 3 . 24 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Pembandingan		
5 . 2 . 3 . 24 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya		
5 . 2 . 3 . 24 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora		
5 . 2 . 3 . 24 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Anak Timbangan/Biasa		
5 . 2 . 3 . 24 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Takaran Kering		
5 . 2 . 3 . 24 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Takaran Bahan Bangunan 2 HL		
5 . 2 . 3 . 24 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Takaran Latex/Getah Susu		
5 . 2 . 3 . 24 . 15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Gelas Takar Berbagai Kapasitas		
5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan dan Alat Kebersihan		
5 . 2 . 3 . 25 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman		
5 . 2 . 3 . 25 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Panen/Pengolahan		
5 . 2 . 3 . 25 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Peternakan		
5 . 2 . 3 . 25 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian		
5 . 2 . 3 . 25 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian		
5 . 2 . 3 . 25 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Prosesing		
5 . 2 . 3 . 25 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pasca Panen		
5 . 2 . 3 . 25 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Produksi Perikanan		
5 . 2 . 3 . 25 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Tong Sampah		
5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan		
5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman		
5 . 2 . 3 . 26 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Panen		
5 . 2 . 3 . 26 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan		
5 . 2 . 3 . 26 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium		
5 . 2 . 3 . 26 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penangkap Ikan		
5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor		
5 . 2 . 3 . 27 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
5 . 2 . 3 . 27 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah		
5 . 2 . 3 . 27 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)		
5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor		
5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak		
5 . 2 . 3 . 27 . 06	Belanja Modal Pengadaan Mesin Jilid		
5 . 2 . 3 . 27 . 07	Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi		
5 . 2 . 3 . 27 . 08	Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi		
5 . 2 . 3 . 27 . 09	Belanja Modal Pengadaan Papan Tulis Elektronik		
5 . 2 . 3 . 27 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemetaan		
5 . 2 . 3 . 27 . 11	Belanja Modal Pengadaan Multi Media Display		
5 . 2 . 3 . 27 . 12	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Dinas		
5 . 2 . 3 . 27 . 13	Belanja Modal Meja Komputer		
5 . 2 . 3 . 27 . 14	Belanja Modal Pengadaan Papan Informasi		
5 . 2 . 3 . 27 . 15	Belanja Modal Sarana Kerja Petugas Lapangan KB		
5 . 2 . 3 . 27 . 17	Belanja Modal Pengadaan Papan Reklame Informasi		
5 . 2 . 3 . 27 . 18	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas		
5 . 2 . 3 . 27 . 19	Belanja Modal Pengadaan Tiang Bendera Kantor		
5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga/Kantor		
5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair		
5 . 2 . 3 . 28 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur Waktu		
5 . 2 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih		
5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin		
5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur		
5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Rak Arsip		
5 . 2 . 3 . 28 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran		
5 . 2 . 3 . 28 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan TV		
5 . 2 . 3 . 28 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga		
5 . 2 . 3 . 28 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Pengadaan Pompa Air		
5 . 2 . 3 . 28 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Pengadaan Tower Air		
5 . 2 . 3 . 28 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Pengadaan Kursi		
5 . 2 . 3 . 28 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Pengadaan Karpet		
5 . 2 . 3 . 28 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Spring Bed		
5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer		
5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan		
5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer		
5 . 2 . 3 . 29 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe		
5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer		
5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer		
5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan		
5 . 2 . 3 . 29 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Notebook		
5 . 2 . 3 . 29 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Pengadaan Scanner		
5 . 2 . 3 . 29 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Pengadaan Printer		
5 . 2 . 3 . 29 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display		
5 . 2 . 3 . 29 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer		
5 . 2 . 3 . 29 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer		
5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat		
5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat		
5 . 2 . 3 . 30 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat		
5 . 2 . 3 . 30 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat		
5 . 2 . 3 . 30 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat		
5 . 2 . 3 . 30 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat		
5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat		
5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio		
5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual		
5 . 2 . 3 . 31 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film		
5 . 2 . 3 . 31 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film A		
5 . 2 . 3 . 31 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak		
5 . 2 . 3 . 31 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Computing		
5 . 2 . 3 . 31 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur		
5 . 2 . 3 . 31 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perlengkapan Audio Visual		
5 . 2 . 3 . 31 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Proyektor/LCD		
5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi		
5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone		
5 . 2 . 3 . 32 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio SSB		
5 . 2 . 3 . 32 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM		
5 . 2 . 3 . 32 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF		
5 . 2 . 3 . 32 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF		
5 . 2 . 3 . 32 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial		
5 . 2 . 3 . 32 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Sandi		
5 . 2 . 3 . 33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar		
5 . 2 . 3 . 33 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar MF/MW		
5 . 2 . 3 . 33 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar HF/SW		
5 . 2 . 3 . 33 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar VHF/FM		
5 . 2 . 3 . 33 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar UHF		
5 . 2 . 3 . 33 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar SHF		
5 . 2 . 3 . 33 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena MF/MW		
5 . 2 . 3 . 33 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena HF/SW		
5 . 2 . 3 . 33 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena VHF/FM		
5 . 2 . 3 . 33 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena UHF		
5 . 2 . 3 . 33 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena SHF/Parabola		
5 . 2 . 3 . 33 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Translator VHF/VHF		
5 . 2 . 3 . 33 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Translator UHF/UHF		
5 . 2 . 3 . 33 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Translator VHF/UHF		
5 . 2 . 3 . 33 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Translator UHF/VHF		
5 . 2 . 3 . 33 . 15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Microvawe FPU		
5 . 2 . 3 . 33 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Microvawe Terestrial		
5 . 2 . 3 . 33 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Microvawe TVRO		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
5 . 2 . 3 . 33 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Dummy Load		
5 . 2 . 3 . 33 . 19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher Antena		
5 . 2 . 3 . 33 . 20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher/Menara Antena		
5 . 2 . 3 . 33 . 21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Feeder		
5 . 2 . 3 . 33 . 22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Humidity Control		
5 . 2 . 3 . 33 . 23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Program Input Equipment		
5 . 2 . 3 . 33 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena Penerima VHF		
5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran		
5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum		
5 . 2 . 3 . 34 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi		
5 . 2 . 3 . 34 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Keluarga Berencana		
5 . 2 . 3 . 34 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Mata		
5 . 2 . 3 . 34 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran T.H.T		
5 . 2 . 3 . 34 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rotgen		
5 . 2 . 3 . 34 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Farmasi		
5 . 2 . 3 . 34 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah		
5 . 2 . 3 . 34 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan		
5 . 2 . 3 . 34 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam		
5 . 2 . 3 . 34 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mortuary		
5 . 2 . 3 . 34 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Anak		
5 . 2 . 3 . 34 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Poliklinik Set		
5 . 2 . 3 . 34 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Penderita Cacat Tubuh		
5 . 2 . 3 . 34 . 15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Neurologi (syaraf)		
5 . 2 . 3 . 34 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Jantung		
5 . 2 . 3 . 34 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Nuklir		
5 . 2 . 3 . 34 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi		
5 . 2 . 3 . 34 . 19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin		
5 . 2 . 3 . 34 . 20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat		
5 . 2 . 3 . 34 . 21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Jiwa		
5 . 2 . 3 . 34 . 22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Hewan		
5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan		
5 . 2 . 3 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan		
5 . 2 . 3 . 35 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis		
5 . 2 . 3 . 35 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Matra Laut		
5 . 2 . 3 . 35 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Matra Udara		
5 . 2 . 3 . 35 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Kepolisian		
5 . 2 . 3 . 35 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga		
5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium		
5 . 2 . 3 . 36 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kimia Air		
5 . 2 . 3 . 36 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi		
KODE REKENING			

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
5 . 2 . 3 . 36 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Hidro Kimia		
5 . 2 . 3 . 36 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Model/Hidrolika		
5 . 2 . 3 . 36 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat laboratorium Buatan/Geologi		
5 . 2 . 3 . 36 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi		
5 . 2 . 3 . 36 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Aspal Cat & Kimia		
5 . 2 . 3 . 36 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat laboratorium Mekanik Tanah dan Batuan		
5 . 2 . 3 . 36 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Cocom Tanam		
5 . 2 . 3 . 36 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik		
5 . 2 . 3 . 36 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin Listrik A		
5 . 2 . 3 . 36 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum		
5 . 2 . 3 . 36 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum A		
5 . 2 . 3 . 36 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kedokteran		
5 . 2 . 3 . 36 . 15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi		
5 . 2 . 3 . 36 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kimia		
5 . 2 . 3 . 36 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi A		
5 . 2 . 3 . 36 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Patologi		
5 . 2 . 3 . 36 . 19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Immunologi		
5 . 2 . 3 . 36 . 20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Hematologi		
5 . 2 . 3 . 36 . 21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Film		
5 . 2 . 3 . 36 . 22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Makanan		
5 . 2 . 3 . 36 . 23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Standarisasi, Kalibrasi dan Instrumentasi		
5 . 2 . 3 . 36 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Farmasi		
5 . 2 . 3 . 36 . 25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika		
5 . 2 . 3 . 36 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Hidrodinamika		
5 . 2 . 3 . 36 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Klimatologi		
5 . 2 . 3 . 36 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Peleburan		
5 . 2 . 3 . 36 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pasir		
5 . 2 . 3 . 36 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan		
5 . 2 . 3 . 36 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pola		
5 . 2 . 3 . 36 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Metalography		
5 . 2 . 3 . 36 . 33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pengelasan		
5 . 2 . 3 . 36 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan		
5 . 2 . 3 . 36 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam		
5 . 2 . 3 . 36 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Matrologie		
5 . 2 . 3 . 36 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pelapisan Logam		
5 . 2 . 3 . 36 . 38	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas		
5 . 2 . 3 . 36 . 39	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Textil		
5 . 2 . 3 . 36 . 40	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Uji Tekstel		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
5 . 2 . 3 . 36 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik		
5 . 2 . 3 . 36 . 42	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit Karet		
5 . 2 . 3 . 36 . 43	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik		
5 . 2 . 3 . 36 . 44	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Uji Keramik		
5 . 2 . 3 . 36 . 45	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa		
5 . 2 . 3 . 36 . 46	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian		
5 . 2 . 3 . 36 . 47	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian A		
5 . 2 . 3 . 36 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian B		
5 . 2 . 3 . 36 . 49	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Elektronika dan Daya		
5 . 2 . 3 . 36 . 50	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium energi Surya		
5 . 2 . 3 . 36 . 51	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas		
5 . 2 . 3 . 36 . 52	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Oceanografi		
5 . 2 . 3 . 36 . 53	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Perairan		
5 . 2 . 3 . 36 . 54	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Biologi Peralatan		
5 . 2 . 3 . 36 . 55	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Biologi		
5 . 2 . 3 . 36 . 56	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Geofisika		
5 . 2 . 3 . 36 . 57	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Tambang		
5 . 2 . 3 . 36 . 58	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia		
5 . 2 . 3 . 36 . 59	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Industri		
5 . 2 . 3 . 36 . 60	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kesehatan Kerja		
5 . 2 . 3 . 36 . 61	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium Kearsipan		
5 . 2 . 3 . 36 . 62	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium Hematologi & Urinalisis		
5 . 2 . 3 . 36 . 63	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya		
5 . 2 . 3 . 36 . 64	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium Hematologi & Urinalisis A		
5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah		
5 . 2 . 3 . 37 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Bahasa Indonesia		
5 . 2 . 3 . 37 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Matematika		
5 . 2 . 3 . 37 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar		
5 . 2 . 3 . 37 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Lanjutan		
5 . 2 . 3 . 37 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Menengah		
5 . 2 . 3 . 37 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Atas		
5 . 2 . 3 . 37 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPS		
5 . 2 . 3 . 37 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Agama Islam		
5 . 2 . 3 . 37 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Ketrampilan		
5 . 2 . 3 . 37 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Kesenian		
5 . 2 . 3 . 37 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga		
5 . 2 . 3 . 37 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : PMP		
5 . 2 . 3 . 37 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
5 . 2 . 3 . 38	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir		
5 . 2 . 3 . 38 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Analytical instrument		
5 . 2 . 3 . 38 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Instrument Probe/Sensor		
5 . 2 . 3 . 38 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan General Laboratory Tool		
5 . 2 . 3 . 38 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Instrument Probe/Sensor A		
5 . 2 . 3 . 38 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Glassware Plastic/Utensils		
5 . 2 . 3 . 38 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratory Safety Equipment		
5 . 2 . 3 . 39	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika		
5 . 2 . 3 . 39 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Radiation Detector		
5 . 2 . 3 . 39 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Modular Counting and Scentific		
5 . 2 . 3 . 39 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Assembly/Accounting System		
5 . 2 . 3 . 39 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Recorder Display		
5 . 2 . 3 . 39 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan System/Power Supply		
5 . 2 . 3 . 39 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Measuring / Testing Device		
5 . 2 . 3 . 39 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Opto Electronics		
5 . 2 . 3 . 39 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Accelator		
5 . 2 . 3 . 39 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Reactor Experimental System		
5 . 2 . 3 . 40	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan		
5 . 2 . 3 . 40 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Fisika Kesehatan		
5 . 2 . 3 . 40 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kerja		
5 . 2 . 3 . 40 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Proteksi Lingkungan		
5 . 2 . 3 . 40 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meteorological Equipment		
5 . 2 . 3 . 40 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Sumber Radiasi		
5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Radiation Aplication and Non Destructive Testing Lab		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Radiation Application Equipment		
5 . 2 . 3 . 41 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Non Destructive Test (NDT) Device		
5 . 2 . 3 . 41 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Umum Kedoteran /Klinik Nuklir		
5 . 2 . 3 . 41 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Hidrologi		
5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat laboratorium Kualitas Air dan tanah		
5 . 2 . 3 . 42 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kualitas Udara		
5 . 2 . 3 . 42 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran		
5 . 2 . 3 . 42 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium Lingkungan		
5 . 2 . 3 . 42 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang		
5 . 2 . 3 . 43	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika		
5 . 2 . 3 . 43 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Towing Carriage		
5 . 2 . 3 . 43 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Wave Generator and Absorber		
5 . 2 . 3 . 43 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Data Accquistion and Analyzing System		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
5 . 2 . 3 . 43 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Cavitation Tunnel		
5 . 2 . 3 . 43 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Overhead Cranes		
5 . 2 . 3 . 43 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan umum		
5 . 2 . 3 . 43 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan : Model Ship Workshop		
5 . 2 . 3 . 43 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan : Propeller Model Workshop		
5 . 2 . 3 . 43 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan : Mechanical Workshop		
5 . 2 . 3 . 43 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan : Precision Mechanical Workshop		
5 . 2 . 3 . 43 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan Painting Shop		
5 . 2 . 3 . 43 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan : Ship Model Preparation Shop		
5 . 2 . 3 . 43 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan : Electrical Workshop		
5 . 2 . 3 . 43 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan MOB		
5 . 2 . 3 . 43 . 15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Photo and Film Equipment		
5 . 2 . 3 . 44	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Senjata Api		
5 . 2 . 3 . 44 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Senjata Genggam		
5 . 2 . 3 . 44 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Senjata Pinggang		
5 . 2 . 3 . 44 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang		
5 . 2 . 3 . 44 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Senapan Mesin		
5 . 2 . 3 . 44 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Mortir		
5 . 2 . 3 . 44 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Anti Lapis Baja		
5 . 2 . 3 . 44 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Artileri Medan (Armed)		
5 . 2 . 3 . 44 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Artileri Pertahanan Udara (Arhanud)		
5 . 2 . 3 . 44 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Peluru Kendali/Rudal		
5 . 2 . 3 . 44 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Kavaleri		
5 . 2 . 3 . 44 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Senjata Lain-lain		
5 . 2 . 3 . 45	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api		
5 . 2 . 3 . 45 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan		
5 . 2 . 3 . 45 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Non Senjata Api		
5 . 2 . 3 . 46	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Amunisi		
5 . 2 . 3 . 46 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Amunisi Umum		
5 . 2 . 3 . 46 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Amunisi Darat		
5 . 2 . 3 . 47	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Senjata Sinar		
5 . 2 . 3 . 47 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Laser		
5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan		
5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan		
5 . 2 . 3 . 48 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Perlindungan		
5 . 2 . 3 . 48 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan CCTV		
5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja		
5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor		
5 . 2 . 3 . 49 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang		
5 . 2 . 3 . 49 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang Untuk Bengkel		
5 . 2 . 3 . 49 . 04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi		
5 . 2 . 3 . 49 . 05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium		
5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan		
5 . 2 . 3 . 49 . 07	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Oceanarium/Opservatorium		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
5.2.3.49.08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah		
5.2.3.49.09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		
5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan		
5.2.3.49.11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga		
5.2.3.49.12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar		
5.2.3.49.13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga		
5.2.3.49.14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool		
5.2.3.49.15	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pemotongan Hewan		
5.2.3.49.16	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pabrik		
5.2.3.49.17	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Stasiun Bus		
5.2.3.49.18	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak		
5.2.3.49.19	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan		
5.2.3.49.20	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Museum		
5.2.3.49.21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar		
5.2.3.49.22	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Pengujian Kelaikan		
5.2.3.49.23	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Lembaga Pemasyarakatan		
5.2.3.49.24	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Tahanan		
5.2.3.49.25	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kramatorium		
5.2.3.49.26	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan		
5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Pasar		
5.2.3.49.28	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Teralis Kantor		
5.2.3.49.29	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Water Close		
5.2.3.49.30	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Papan Nama Dinas		
5.2.3.49.31	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pemasangan Paving Blok Kantor		
5.2.3.49.32	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Lantai Jemur Lumbung Pangan		
5.2.3.49.33	Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Tempat/Lahan Parkir Kantor		
5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal		
5.2.3.50.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I		
5.2.3.50.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II		
5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III		
5.2.3.50.04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan		
5.2.3.50.05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Asrama		
5.2.3.50.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Hotel		
5.2.3.50.07	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Motel		
5.2.3.50.08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Flat/Rumah Susun		
5.2.3.51	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara		
5.2.3.51.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai		
5.2.3.51.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Perambut Penerangan Pantai Tidak Bermenara		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
5.2.3.51.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara Telekomunikasi		
5.2.3.52	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah		
5.2.3.52.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Istana Peringatan		
5.2.3.52.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Adat		
5.2.3.52.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Peningggalan Sejarah		
5.2.3.52.04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Makam Sejarah		
5.2.3.52.05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah		
5.2.3.53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan		
5.2.3.53.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Kemerdekaan		
5.2.3.53.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Pembangunan		
5.2.3.53.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gapura		
5.2.3.54	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Candi		
5.2.3.54.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Candi Hindhu		
5.2.3.54.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Candi Budha		
5.2.3.54.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Candi Lainnya		
5.2.3.55	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya		
5.2.3.55.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah		
5.2.3.56	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti		
5.2.3.56.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas		
5.2.3.56.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas		
5.2.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu		
5.2.3.57.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat		
5.2.3.57.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar		
5.2.3.58	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara		
5.2.3.58.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Runway/Threshold Light		
5.2.3.58.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Visual Approach Slope Indicator (VASI)		
5.2.3.58.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Approach Light		
5.2.3.58.04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Runway Identification Light(Rells)		
5.2.3.58.05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Signal		
5.2.3.58.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Flood Light		
5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan		
5.2.3.59.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Negara/Nasional		
5.2.3.59.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Propinsi		
5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota		
5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa		
5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus		
5.2.3.59.06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Tol		
5.2.3.59.07	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kereta		
5.2.3.59.08	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Landasan Pacu Pesawat Terbang		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan		
5 . 2 . 3 . 60 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Negara/Nasional		
5 . 2 . 3 . 60 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Propinsi		
5 . 2 . 3 . 60 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota		
5 . 2 . 3 . 60 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa		
5 . 2 . 3 . 60 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Khusus		
5 . 2 . 3 . 60 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Pada Jalan Tol		
5 . 2 . 3 . 60 . 07	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Pada Jalan Kereta Api		
5 . 2 . 3 . 60 . 08	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang		
5 . 2 . 3 . 60 . 09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Penyeberangan		
5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi		
5 . 2 . 3 . 61 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Irigasi		
5 . 2 . 3 . 61 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi		
5 . 2 . 3 . 61 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi		
5 . 2 . 3 . 61 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi		
5 . 2 . 3 . 61 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi		
5 . 2 . 3 . 61 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi		
5 . 2 . 3 . 62	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut		
5 . 2 . 3 . 62 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Pasang Surut		
5 . 2 . 3 . 62 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Pasang Surut		
5 . 2 . 3 . 62 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Pasang Surut		
5 . 2 . 3 . 62 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pasang Surut		
5 . 2 . 3 . 62 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pasang Surut		
5 . 2 . 3 . 62 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pasang Surut		
5 . 2 . 3 . 62 . 07	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Sawah Pasang Surut		
5 . 2 . 3 . 63	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Rawa		
5 . 2 . 3 . 63 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder		
5 . 2 . 3 . 63 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembalian Pasang Rawa		
5 . 2 . 3 . 63 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Pasang Rawa		
5 . 2 . 3 . 63 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pasang Rawa		
5 . 2 . 3 . 63 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengamanan Pasang Surut		
5 . 2 . 3 . 63 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pasang Rawa		
5 . 2 . 3 . 63 . 07	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Sawah Pengembangan Rawa		
5 . 2 . 3 . 64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be		
5 . 2 . 3 . 64 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai		
5 . 2 . 3 . 64 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai		
5 . 2 . 3 . 64 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman		
5 . 2 . 3 . 64 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai		
KODE REKENING			

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
5.2.3.64.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai		
5.2.3.64.06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai		
5.2.3.65	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah		
5.2.3.65.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air		
5.2.3.65.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air		
5.2.3.65.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air		
5.2.3.65.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air		
5.2.3.65.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air		
5.2.3.65.06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air		
5.2.3.66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku		
5.2.3.66.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Waduk Bersih/Air Baku		
5.2.3.66.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku		
5.2.3.66.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Bersih		
5.2.3.66.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku		
5.2.3.66.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku		
5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor		
5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor		
5.2.3.67.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Air Kotor		
5.2.3.67.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor		
5.2.3.67.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Air Kotor		
5.2.3.67.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Kotor		
5.2.3.68	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air		
5.2.3.68.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Laut		
5.2.3.68.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Tawar		
5.2.3.69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih		
5.2.3.69.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Muka Tanah		
5.2.3.69.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Sumber /Mata Air		
5.2.3.69.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Tanah Dalam		
5.2.3.69.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Tanah Dangkal		
5.2.3.69.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya		
5.2.3.70	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor		
5.2.3.70.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor		
5.2.3.70.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Buangan Industri		
5.2.3.70.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Buangan Pertanian		
5.2.3.71	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah		
5.2.3.71.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik		
5.2.3.71.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
5.2.3.72	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan		
5.2.3.72.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan		
5.2.3.73	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik		
5.2.3.73.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Air		
5.2.3.73.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel		
5.2.3.73.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro (Hidro)		
5.2.3.73.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)		
5.2.3.73.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)		
5.2.3.73.06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)		
5.2.3.73.07	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)		
5.2.3.73.08	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)		
5.2.3.73.09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)		
5.2.3.73.10	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)		
5.2.3.73.11	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera (PLTSm)		
5.2.3.74	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik		
5.2.3.74.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Induk		
5.2.3.74.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi		
5.2.3.74.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik		
5.2.3.75	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pertahanan		
5.2.3.75.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pertahanan Di Darat		
5.2.3.76	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gas		
5.2.3.76.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Gas		
5.2.3.76.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Jaringan Pipa Gas		
5.2.3.77	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengaman		
5.2.3.77.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengaman Penangkal Petir		
5.2.3.78	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum		
5.2.3.78.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Pembawa		
5.2.3.78.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Induk Distribusi		
5.2.3.78.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Cabang Distribusi		
5.2.3.78.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum Jaringan Sambungan Kerumah		
5.2.3.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik		
5.2.3.79.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi		
5.2.3.79.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi		
5.2.3.80	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon		
5.2.3.80.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon Di atas Tanah		
5.2.3.80.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon Di bawah Tanah		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
5 . 2 . 3 . 80 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon Didalam Air		
5 . 2 . 3 . 81	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Gas		
5 . 2 . 3 . 81 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Pipa Gas Transmisi		
5 . 2 . 3 . 81 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Pipa Distribusi		
5 . 2 . 3 . 81 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Pipa Dinas		
5 . 2 . 3 . 81 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan BBM		
5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku		
5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum		
5 . 2 . 3 . 82 . 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Filsafat		
5 . 2 . 3 . 82 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan		
5 . 2 . 3 . 82 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial		
5 . 2 . 3 . 82 . 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa		
5 . 2 . 3 . 82 . 06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Matematika & Pengetahuan alam		
5 . 2 . 3 . 82 . 07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis		
5 . 2 . 3 . 82 . 08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga		
5 . 2 . 3 . 82 . 09	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah		
5 . 2 . 3 . 83	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan		
5 . 2 . 3 . 83 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan Berkala		
5 . 2 . 3 . 83 . 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Laporan		
5 . 2 . 3 . 84	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan		
5 . 2 . 3 . 84 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Peta		
5 . 2 . 3 . 84 . 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Naskah (Manuskrip)		
5 . 2 . 3 . 84 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Musik		
5 . 2 . 3 . 84 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Karya Grafika (Graphic Material)		
5 . 2 . 3 . 84 . 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Three Dimensional Artetacs and Realita		
5 . 2 . 3 . 84 . 06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Bentuk Micro (Microform)		
5 . 2 . 3 . 84 . 07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Rekaman Suara		
5 . 2 . 3 . 84 . 08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Berkas Komputer (Computer Files)		
5 . 2 . 3 . 84 . 09	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Film Bergerak dan Rekaman Video		
5 . 2 . 3 . 84 . 10	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Tarscalt		
5 . 2 . 3 . 85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan		
5 . 2 . 3 . 85 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Pahatan		
5 . 2 . 3 . 85 . 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Lukisan		
5 . 2 . 3 . 85 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian		
5 . 2 . 3 . 85 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Olah Raga		
5 . 2 . 3 . 85 . 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Tanda Penghargaan		
5 . 2 . 3 . 85 . 06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Maket dan Foto Dokumen		
5 . 2 . 3 . 85 . 07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Benda-benda Bersejarah		
5 . 2 . 3 . 85 . 08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Barang Kerajinan		
5 . 2 . 3 . 86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya		
KODE REKENING			

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
5.2.3.86.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Senam	K	
5.2.3.86.02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Air		
5.2.3.86.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Udara		
5.2.3.86.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga		
5.2.3.87	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan		
5.2.3.87.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Ternak		
5.2.3.87.02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Unggas		
5.2.3.87.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Melata		
5.2.3.87.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Ikan		
5.2.3.87.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan Kebun Binatang		
5.2.3.87.06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan Pengamanan		
5.2.3.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman		
5.2.3.88.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Perkebunan		
5.2.3.88.02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hortikultura		
5.2.3.88.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Kehutanan		
5.2.3.88.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias		
5.2.3.88.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Obat dan Kosmetika		
5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi		
5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi		
5.2.3.90	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Penerangan Jalan Umum		
5.2.3.90.01	Belanja Modal Penerangan Jalan Umum		
5.2.3.90.02	Belanja Modal Penerangan Taman		
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya		
6.1.1.01	Pelampauan Penerimaan PAD		
6.1.1.01.01	Pajak Daerah		
6.1.1.01.02	Retribusi Daerah		
6.1.1.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
6.1.1.01.04	Lain-Lain PAD yang Sah		
6.1.1.02	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan		
6.1.1.02.01	Bagi Hasil Pajak		
6.1.1.02.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam		
6.1.1.03	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
6.1.1.03.01	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya		
6.1.1.04.01	Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung		
6.1.1.04.02	Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung		
6.1.1.04.03	Belanja Barang dan Jasa		
6.1.1.04.04	Belanja Modal		
6.1.1.04.05	Belanja Bunga		
6.1.1.04.06	Belanja Subsidi		
6.1.1.04.07	Belanja Hibah		
6.1.1.04.08	Belanja Bantuan Sosial		
6.1.1.04.09	Belanja Belanja Bagi Hasil		
6.1.1.04.10	Belanja Bantuan Keuangan		
6.1.1.04.11	Belanja Belanja Tidak Terduga		
6.1.1.05	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Dengan Akhir Tahun Belum terselesaikan		
6.1.1.05.01	Uang Jaminan		
6.1.1.05.02	Potongan Taspen		
6.1.1.05.03	Potongan Beras		
6.1.1.05.04	ASKES		

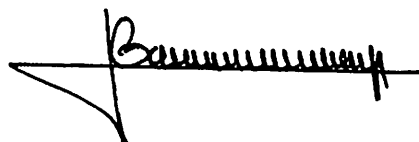
KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
6.1.1.06	Kegiatan Lanjutan		
6.1.1.06.01	Kegiatan Lanjutan		
6.1.1.06.02	Kegiatan Lanjutan Pembayaran Utang T.A 2011		
6.1.1.07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya		
6.1.1.07.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya		
6.1.1.08	Koreksi SILPA		
6.1.1.08.01	Koreksi SILPA		
6.1.1.08.02	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		
6.1.1.08.03	Lain-Lain		
6.1.1.09	Sisa Belanja DAK		
6.1.1.09.01	DAK Bidang Pendidikan		
6.1.1.09.02	DAK Bidang Kesehatan		
6.1.1.09.03	DAK Bidang Infrastruktur		
6.1.1.10	Sisa Belanja Dana Bagi Hasil		
6.1.1.10.01	Dana Bagi Hasil PBB		
6.1.1.10.02	Dana Bagi Hasil PPh		
6.1.1.10.03	Dana Bagi Hasil SDA Iuran Hak Pengusaha Hutan		
6.1.1.10.04	Dana Bagi Hasil SDA Sumber Daya Hutan		
6.1.1.10.05	Dana Bagi Hasil DR		
6.1.1.11	Sisa Belanja Dana Penyesuaian		
6.1.1.11.01	Dana Penyesuaian BOS		
6.1.1.11.02	Dana Penyesuaian Tambahan Penghasilan Guru PNSD		
6.1.1.11.03	Dana Penyesuaian Tunjangan Profesi Guru PNSD		
6.1.1.11.04	Dana Penyesuaian Tunjangan Sertifikasi Guru PNSD		
6.1.1.11.05	Dana Penyesuaian DID		
6.1.1.12	Sisa Belanja Dana Otonomi Khusus		
6.1.1.12.01	Dana Otonomi Khusus Aceh		
6.1.1.12.02	Dana Otonomi Khusus Papua		
6.1.1.12.03	Dana Otonomi Khusus Papua Barat		
6.1.1.13	Sisa Belanja Dana Tambahan Infrastuktur		
6.1.1.13.01	Dana Tambahan Infrastuktur Papua		
6.1.1.13.02	Dana Tambahan Infrastuktur Papua Barat		
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	K	
6.1.2.01	Pencairan Dana Cadangan		
6.1.2.01.01	Pencairan Dana Cadangan Nomor		
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	K	
6.1.3.01	Hasil Penjualan Perusahaan Milik Daerah/BUMD		
6.1.3.01.01	BUMD		
6.1.3.02	Hasil Penjualan Aset Milik Pemerintah Daerah yang Dikerjasamakan Dengan Pihak Ketiga		
6.1.3.02.01	Hasil Penjualan Aset Milik Pemerintah Daerah yang Dikerjasamakan Dengan Pihak Ketiga		
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	K	
6.1.4.01	Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Pemerintah		
6.1.4.01.01	Penerusan Pinjaman		
6.1.4.02	Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Pemerintah Daerah Lain		
6.1.4.02.01	Pemerintah Daerah		
6.1.4.03	Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Lembaga Keuangan Bank		
6.1.4.03.01	Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Lembaga Keuangan Bank		
6.1.4.04	Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank		
6.1.4.04.01	Lembaga Keuangan Bukan Bank		
6.1.4.05	Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah		
6.1.4.05.01	Obligasi Atas Nama		
6.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	K	
6.1.5.01	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
6.1.5.01.01	Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman		
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	K	
6.1.6.01	Penerimaan Piutang Daerah Dari Pendapatan Daerah		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
6.1.6.01.01	Penerimaan Piutang Daerah Dari Pendapatan Pajak Daerah		
6.1.6.01.02	Penerimaan Piutang Daerah Dari Pendapatan Retribusi Daerah		
6.1.6.01.03	Penerimaan Piutang Daerah Dari Lain-lain Pendapatan yang Sah		
6.1.6.02	Penerimaan Piutang Daerah Dari Pemerintah		
6.1.6.02.01	Penerimaan Piutang Daerah Dari Pemerintah		
6.1.6.03	Penerimaan Piutang Daerah Dari Pemerintah Daerah Lain		
6.1.6.03.01	Pemerintah Daerah		
6.1.6.04	Penerimaan Piutang Daerah Dari Lembaga Keuangan Bank		
6.1.6.04.01	Bank		
6.1.6.05	Penerimaan Piutang Daerah Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank		
6.1.6.05.01	Lembaga Keuangan Bukan Bank		
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH		
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	D	
6.2.1.01	Pembentukan Dana Cadangan		
6.2.1.01.01	Pembentukan Dana Cadangan Nomor		
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	D	
6.2.2.01	Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN)		
6.2.2.01.01	BUMN		
6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)		
6.2.2.02.01	Penyertaan Modal pada Bank		
6.2.2.02.02	Penyertaan Modal BUMD PT. Aneka Usaha Tanggamus Jaya		
6.2.2.03	Badan Usaha Milik Swasta		
6.2.2.03.01	Badan		
6.2.2.04	Penyertaan Modal		
6.2.2.04.01	Penyertaan Modal Kepada PDAM		
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	D	PERMENDAGRI 48 TAHUN 2106
6.2.3.01	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Pemerintah		
6.2.3.01.01	Penerusan Pinjaman		
6.2.3.02	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Pemerintah Daerah Lain		
6.2.3.02.01	Pemerintah Daerah		
6.2.3.03	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bank		
6.2.3.03.01	Pembayaran Pokok Hutang Kepada Bank		
6.2.3.04	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		
6.2.3.04.01	Lembaga Keuangan Bukan Bank		
6.2.3.05	Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo Kepada Pemerintah		
6.2.3.05.01	Penerusan Pinjaman		
6.2.3.06	Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo Kepada Pemerintah Daerah Lain		
6.2.3.06.01	Pemerintah Daerah		
6.2.3.07	Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bank		
6.2.3.07.01	Bank		
6.2.3.08	Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		
6.2.3.08.01	Lembaga Keuangan Bukan Bank		
6.2.3.09	Pelunasan Obligasi Daerah Pada Saat Jatuh Tempo		
6.2.3.09.01	Obligasi Atas Nama		
6.2.3.10	Pembelian Kembali Obligasi Daerah Sebelum Jatuh Tempo		
6.2.3.10.01	Obligasi Atas Nama		
6.2.3.11	Pembayaran		
6.2.3.11.01	Pembayaran Jaminan Pemeliharaan		
6.2.4	Hutang Retensi dan Pembayaran Kepada Pihak Ketiga	D	
6.2.4.01	Hutang Retensi dan Pembayaran Kepada Pihak Ketiga		
6.2.4.01.01	Pembayaran Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan dan Pembayaran Hutang Pada Pihak Ketiga		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
6.2.5	Pemberian Pinjaman Daerah	D	
6.2.5.01	Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Pemerintah		
6.2.5.01.01	Pemerintah		
6.2.5.02	Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Pemerintah Daerah Lain		
6.2.5.02.01	Pemerintah Daerah	D	
6.3	PEMBIAYAAN NETTO		
6.3.1	Pembiayaan Netto		
6.3.1.01	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan		
6.3.1.01.01	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	K	
6.4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		
6.4.1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan		
6.4.1.01	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan		
6.4.1.01.01	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	K	
7	PERHITUNGAN FIAK KETIGA (PFK)		
7.1	PENERIMAAN PERHITUNGAN FIAK KETIGA (PFK)		
7.1.1	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	K	
7.1.1.01	Penerimaan PFK - IWP		
7.1.1.01.01	Penerimaan PFK - IWP		
7.1.1.02	Penerimaan PFK - Taspen		
7.1.1.02.01	Penerimaan PFK - Taspen	D	
7.1.1.03	Penerimaan PFK - BPJS		
7.1.1.03.01	Penerimaan PFK - BPJS		
7.1.1.04	Penerimaan PFK - PPh Pusat		
7.1.1.04.01	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	D	
7.1.1.04.02	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		
7.1.1.04.03	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		
7.1.1.04.04	Penerimaan PFK - PPh Ps. 25		
7.1.1.04.05	Penerimaan PFK - PPh Ps. 4	D	
7.1.1.04.06	Penerimaan PFK - PPh Ps. 15		
7.1.1.04.07	Penerimaan PFK - PPh Ps. 26		
7.1.1.04.08	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 Tunjangan Perumahan dan TKI		
7.1.1.05	Penerimaan PFK - PPn Pusat	D	
7.1.1.05.01	Penerimaan PFK - PPn Pusat		
7.1.1.06	Penerimaan PFK - Taperum		
7.1.1.06.01	Penerimaan PFK - Taperum		
7.1.1.07	Penerimaan PFK - Lainnya	D	
7.1.1.07.01	Penerimaan PFK - Lainnya		
7.1.1.07.02	Penerimaan PFK - Sewa Rumah		
7.1.1.07.03	Penerimaan PFK - Beras (BULOG)		
7.1.1.08	Penerimaan LHP BPK-RI	D	
7.1.1.08.01	Penerimaan LHP BPK-RI		
7.1.1.09	Penerimaan Potongan Tim PHO		
7.1.1.09.01	Penerimaan Potongan Tim PHO		
7.1.1.10	Penerimaan LHP Inspektorat	D	
7.1.1.10.01	Penerimaan LHP Inspektorat		
7.1.1.11	Penerimaan PFK - JKM		
7.1.1.11.01	Penerimaan PFK - JKM		
7.1.1.12	Penerimaan PFK - JKK	D	
7.1.1.12.01	Penerimaan PFK - JKK		
7.1.1.13	Penerimaan Potongan Denda Keterlambatan		
7.1.1.13.01	Penerimaan Potongan Denda Keterlambatan		
7.2	PENGELUARAN PERHITUNGAN FIAK KETIGA (PFK)	D	
7.2.1	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		
7.2.1.01	Pengeluaran PFK - IWP		
7.2.1.01.01	Pengeluaran PFK - IWP		
7.2.1.02	Pengeluaran PFK - Taspen		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
7.2.1.02.01	Pengeluaran PFK - Taspen		
7.2.1.03	Pengeluaran PFK - BPJS		
7.2.1.03.01	Pengeluaran PFK- BPJS		
7.2.1.04	Pengeluaran PFK - PPh Pusat		
7.2.1.04.01	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21		
7.2.1.04.02	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22		
7.2.1.04.03	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23		
7.2.1.04.04	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 25		
7.2.1.04.05	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 4		
7.2.1.04.06	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 15		
7.2.1.04.07	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 26		
7.2.1.04.08	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 Tunjangan Perumahan dan TKI		
7.2.1.05	Pengeluaran PFK - PPn Pusat		
7.2.1.05.01	Pengeluaran PFK - PPn Pusat		
7.2.1.06	Pengeluaran PFK - Taperum		
7.2.1.06.01	Pengeluaran PFK - Taperum		
7.2.1.07	Pengeluaran PFK - Lainnya		
7.2.1.07.01	Pengeluaran PFK - Lainnya		
7.2.1.07.02	Pengeluaran PFK - Sewa Rumah		
7.2.1.07.03	Pengeluaran PFK - Beras (BULOG)		
7.2.1.08	Pengeluaran LHP BPK-RI		
7.2.1.08.01	Pengeluaran LHP BPK-RI		
7.2.1.09	Pengeluaran Potongan Tim PHO		
7.2.1.09.01	Pengeluaran Potongan Tim PHO		
7.2.1.10	Pengeluaran LHP Inspektorat		
7.2.1.10.01	Pengeluaran LHP Inspektorat		
7.2.1.11	Pengeluaran PFK - JKM		
7.2.1.11.01	Pengeluaran PFK - JKM		
7.2.1.12	Pengeluaran PFK - JKK		
7.2.1.12.01	Pengeluaran PFK - JKK		
7.2.1.13	Pengeluaran Potongan Denda Keterlambatan		
7.2.1.13.01	Pengeluaran Potongan Denda Keterlambatan		

BUPATI TANGGAMUS,



BAMBANG KURNIAWAN

ASS. BID. ADM.

32
==

H